



**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2017**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2016;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 10/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 55/G), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 31 Juli 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**

pada tanggal 31 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 17 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan yang terjadi dalam satu periode perencanaan dalam konstelasi perundangan diperlukan untuk diakomodasikan dalam sebuah dokumen perubahan. Kerangka berpikir yang digunakan adalah perubahan tersebut diupayakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut dilaksanakan untuk harmonisasi terhadap target dan sasaran baik yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian. Demikian juga guna melakukan integrasi terhadap RKPD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD). Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2017 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Dalam pelaksanaannya RKPD Tahun 2017 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014–2019, yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD tersebut maka substansi penetapan prioritas memiliki nilai strategis dan penting dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMD. Sesuai dengan RKPD 2017 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik;
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2017 tersebut di atas dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip 6 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah antara lain :

- a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya.
- b. sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- c. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPD.
- d. adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 2016 yang harus digunakan untuk tahun 2017.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014 -2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016;
18. Peraturan Walikota Madun Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

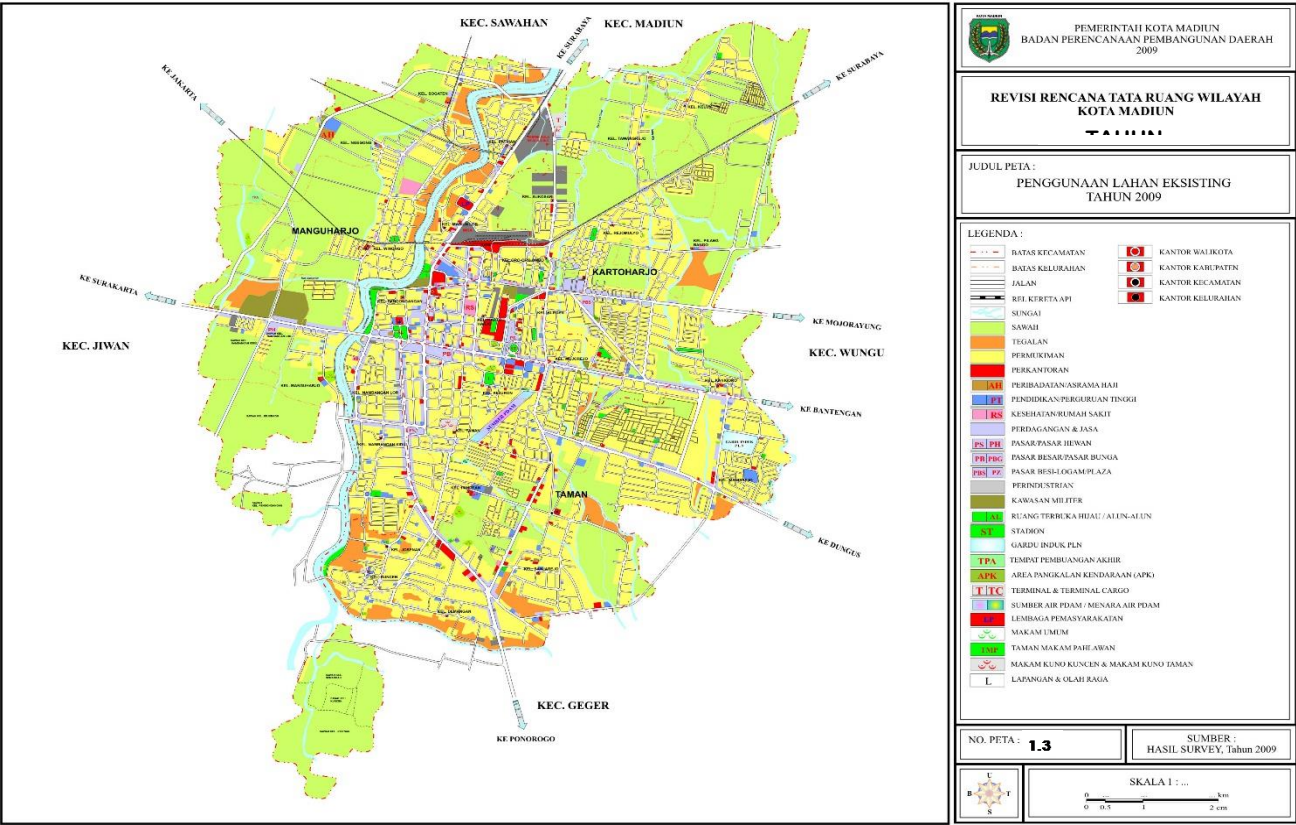
#### **1.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

##### **1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat  $111^{\circ}$  -  $112^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}$  -  $8^{\circ}$  Lintang Selatan, berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 m dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 m dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 m dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara  $20^{\circ}\text{C}$  hingga  $35^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. perbatasan sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,
2. perbatasan sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,
3. perbatasan sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan
4. perbatasan sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Sumber: madiunkota.go.id

**Gambar 1. 1.**  
**Peta Administratif Kota Madiun**

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km<sup>2</sup>. Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan.

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2016 sebanyak 210.037 jiwa, tersebar di 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 58.147 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.877 jiwa, dan Kecamatan Taman 89.013 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2012 s/d 2016**

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kartoharjo	55.970	57.090	58.125	57.777	58.147
2	Manguharjo	60.712	62.086	63.007	62.276	62.877
3	Taman	86.575	88.205	89.867	88.195	89.013
	Total	203.257	207.381	210.999	208.248	210.037

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2017

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 70.756 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 439 jiwa; D-III 5.557 jiwa; S-1 18.929 jiwa; S-2 1.238 jiwa, dan S-3 23 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 2.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 s/d 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	29.751	30.586	31.218	30.989	31.740
Tidak Tamat SD;	15.062	16.883	18.383	18.575	18.695
Tamat SD;	33.571	33.704	33.767	32.950	32.318
Tamat SLTP;	29.660	29.932	30.247	30.155	30.342
Tamat SLTA;	69.515	70.414	71.142	69.799	70.756
Tamat D-I/II;	438	449	448	440	439
Tamat D-III;	5.447	5.544	5.624	5.507	5.557
Tamat S-1;	18.731	18.740	18.985	18.608	18.929
Tamat S-2;	1.067	1.112	1.169	1.205	1.238
Tamat S-3.	15	17	16	20	23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2017

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2016 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3.**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2012 s/d 2016**

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
a. Belum/Tidak	39.935	39.525	39.214	38.404	35.539
b. PRT	34.131	34.560	35.064	34.603	35.328
c. Pelajar/Mahasiswa	37.768	40.077	43.158	43.581	45.352
d. Pensiunan	6.692	6.655	6.509	6.374	6.399
e. PNS	7.709	7.708	7.623	7.379	7.396
f. TNI	1.901	1.938	1.952	1.850	1.942
g. POLRI	1.040	1.062	1.060	1.048	1.057
h. Jasa	8.918	7.723	5.058	8.608	9.105
i. Karyawan	40.920	41.871	42.745	42.126	43.735
j. Buruh	4.900	5.054	5.115	5.082	4.690
k. Wiraswasta	18.753	20.039	18.687	18.727	19.060
l. Lain-lain	590	562	4.814	466	434

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2017

1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.4.  
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2012 s/d 2016 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2012	7.533,6	6.937,7	6,83
2013	8.390,4	7.470,7	7,68
2014	9.214,2	7.965,5	6,62
2015	10.191,6	8.455,4	6,15
2016*)	11.007,5	8.916,3	5,90

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017  
\*) Angka Sementara

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 1. 5.  
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2012 – 2016

Kategori	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pra KS	503	374	497	332	198
KS-I	7.805	7.896	7.402	7.643	7.710
KS-II	15.643	13.519	17.168	17.759	20.121
KS-III	24.244	25.724	24.372	23.815	21.692
KS-III Plus	2.662	4.560	2.991	3.096	3.183

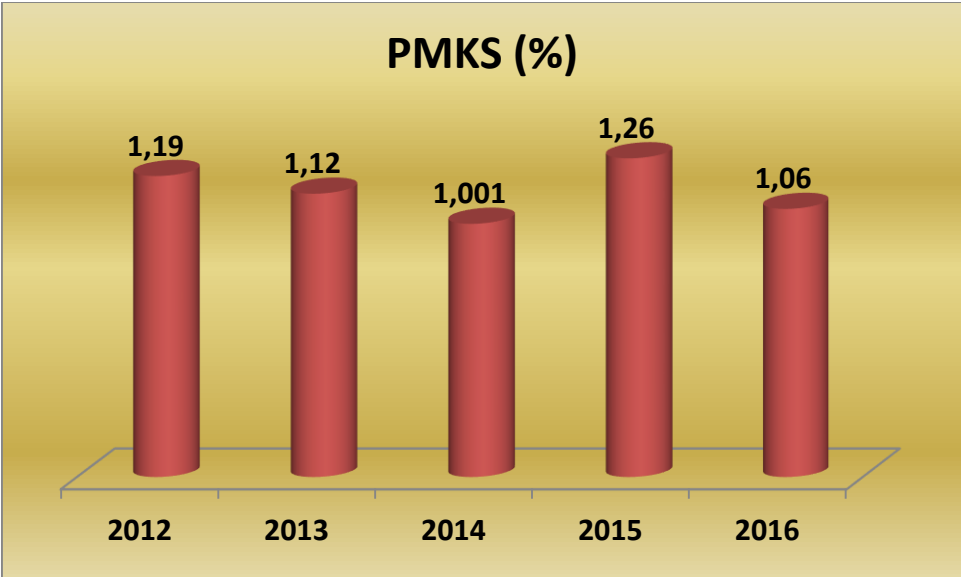
Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2017

Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan Tahun 2015 jumlahnya 7.975 keluarga, sedangkan Tahun 2016 jumlahnya 7.908 keluarga penurunan 67 keluarga atau 0,84%. Hal ini menunjukkan perubahan yang positif berarti semakin meningkat kesejahteraannya. Prosentase Keluarga Sejahtera II , III dan III Plus mengalami kenaikan 0,73% (326 KK) yaitu Tahun 2015

jumlahnya 44.670 menjadi 44.996 pada Tahun 2016, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 44.996 keluarga atau 85,05% dari jumlah KK 52.904, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 84,85% dari jumlah KK 52.645.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha.



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2017

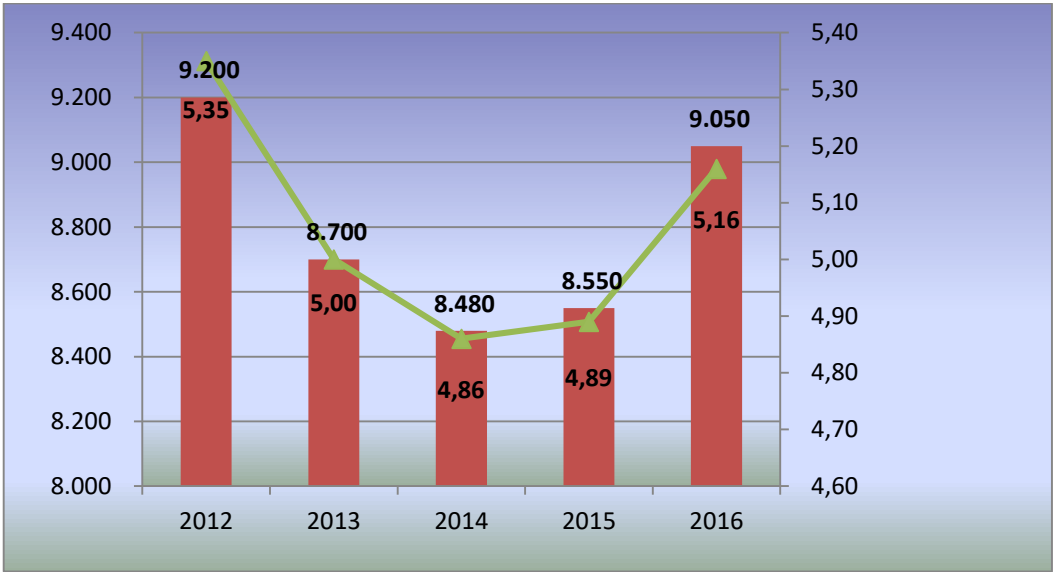
**Gambar 1. 2.**  
**Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kota Madiun**  
**Tahun 2012 – 2016**

Pada tahun 2016, jumlah PMKS di Kota Madiun mencapai 1,06% atau 2.235 orang dari total penduduk yakni 210.037 jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,20% dibandingkan dengan PMKS di tahun 2015 yang berjumlah 2.630 orang. Dari jumlah PMKS yang ada pada tahun 2016, sejumlah 2.235 orang atau 100% telah mendapat penanganan dari pemerintah Kota Madiun. Penanganan PMKS di tahun 2016 meliputi



pembinaan, pengiriman ke panti rehabilitasi sosial, dan pemulangan ke tempat asal/keluarga jika PMKS berasal dari hasil sidak di jalanan. Selain itu, persentase PMKS terhadap jumlah penduduk setiap Tahun memiliki tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat Kota Madiun yang mengalami masalah kesejahteraan sosial menurun semenjak Tahun 2012 yang lalu sampai Tahun 2014, tetapi pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit dan Tahun 2016 mengalami penurunan kembali.

Berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun mengalami tren yang sangat baik karena terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

**Gambar 1.3**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan 2016**

**c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2016 meningkat dibandingkan Tahun 2015, yaitu 7 (tujuh) prestasi di bidang olahraga sedangkan pada tahun 2015 prestasinya 5 (lima). Beberapa keikutsertaan dalam event regional maupun nasional diantaranya : Festival Pedalangan, Festival Karya Tari, Lomba Bina Kreatifitas SDLB dalam rangka HAN dan Pekan Seni Pelajar (Ada 8 (delapan) jenis lomba

Tingkat SD/MI, 6 (enam) jenis lomba tingkat SMP, dan 4 (empat) jenis lomba tingkat SLTA).

Di sisi lain, dalam mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan event seni budaya dalam Tahun 2016 sebanyak 11 (sebelas) event. hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang juga hanya 11 (sebelas) event, diantaranya: Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun, Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW, Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD dan SMP, Pembinaan Seniman, Pentas Seni Secara Periodik, Lomba Keroncong dan campursari Tingkat Kota, Pentas Dalang Kecil, dan Pagelaran Wayang Kulit. Indikator ini menunjukkan jumlah even seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah secara tahunan. Semakin banyak even wisata, seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan seni budaya dan pariwisata di Kota Madiun, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya.

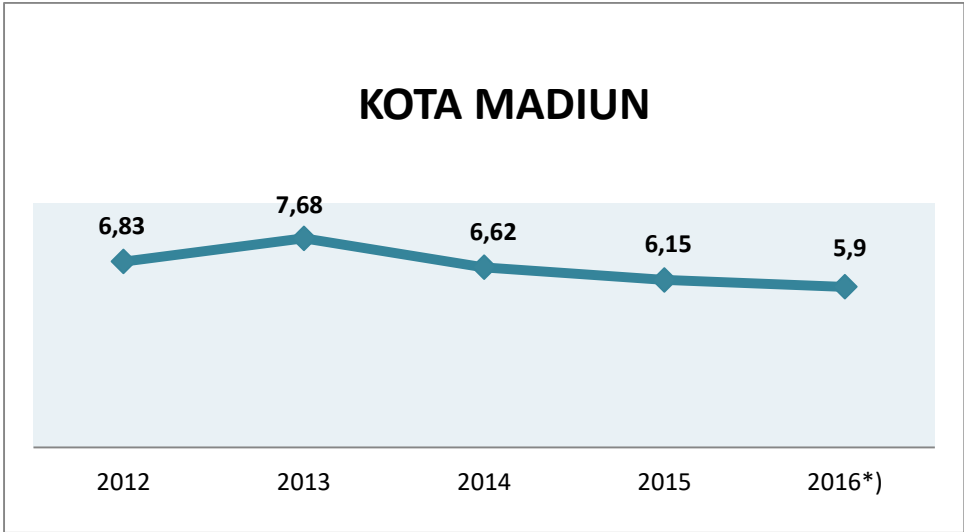
Sementara itu, pembinaan generasi muda di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan. Perkembangan prestasi olahraga pelajar pada Tahun 2016 di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur ada 7, sedangkan prestasi olahraga pelajar untuk tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 Kota Madiun memperoleh sejumlah 5 medali yang diantaranya berupa medali emas, perak dan perunggu.

#### **1.4.3 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

##### **a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK).



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

**Gambar 1. 4.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun**  
**Tahun 2012 s/d 2016 (%)**

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2012 s/d 2016 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 6.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)**  
**Tahun 2012 s/d 2016**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,93	0,7	0,98	1,58	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	1,99	3,69	1,69	1,98	1,91
3	Industri Pengolahan	5,3	7,57	7,78	6,49	7,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,97	4,13	3,15	3,28	3,86
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,08	4,68	2,15	2,58	3,82
6	Konstruksi	6,59	7,69	4,98	5,48	4,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	7,84	7,91	5,46	4,48	5,11
8	Transportasi dan Pergudangan	6,05	7,18	8,45	6,78	7,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	7,77	7,28	7,28	7,30
10	Informasi dan Komuniasi	9,11	9,45	8,13	8,13	6,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,15	11,61	7,81	7,52	7,11
12	Real Estate	6,95	7,28	6,76	6,76	5,64
13	Jasa Perusahaan	5,43	7,48	8,41	8,41	5,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	1	0,78	3,88	3,05
15	Jasa Pendidikan	6,01	6,08	7,71	6,30	5,14

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,48	6,5	7,87	9,35	5,85
17	Jasa Lainnya	3,21	4,25	5,35	4,28	4,17
<b>PDRB</b>		<b>6,83</b>	<b>7,68</b>	<b>6,62</b>	<b>6,15</b>	<b>5,90</b>

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

\*) Angka Sementara

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2012 s/d 2016 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 7.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s/d 2016**  
**(Milyar Rupiah)**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	82,0	86,5	92,2	98,0	102,3
2	Pertambangan dan Penggalian	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6
3	Industri Pengolahan	1.252,0	1.369,7	1.490,9	1.636,8	1.807,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,4	6,0	6,9	7,8	8,4
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	18,0	19,9	21,1	22,6	24,5
6	Konstruksi	516,3	568,7	612,5	664,1	718,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.839,1	2.094,7	2.296,1	2.530,0	2.792,0
8	Transportasi dan Pergudangan	211,5	242,2	280,8	321,2	360,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	346,6	379,6	415,4	464,8	523,6
10	Informasi dan Komunikasi	1.060,7	1.165,2	1.264,9	1.394,0	1.524,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	708,4	827,9	942,4	1.056,6	1.177,7
12	Real Estate	193,4	217,1	237,3	274,0	298,8
13	Jasa Perusahaan	51,1	56,2	61,8	69,3	75,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288,1	298,0	306,2	329,4	350,2
15	Jasa Pendidikan	576,3	643,8	725,3	803,0	863,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90,9	101,1	114,2	131,1	142,0
17	Jasa Lainnya	291,9	311,5	343,9	386,7	413,6
<b>PDRB</b>		<b>7.533,6</b>	<b>8.390,4</b>	<b>9.214,1</b>	<b>10.192,1</b>	<b>11.185,1</b>

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

\*) Angka Sementara

PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2012 s/d 2016 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 8.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 s/d 2016**  
**(Milyar Rupiah)**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	73,0	73,5	74,2	75,4	76,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
3	Industri Pengolahan	1.174,3	1.262,6	1.360,3	1.448,9	1.553,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	6,3	6,8	7,0	7,3
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	16,8	17,5	17,9	18,4	19,1
6	Konstruksi	459,9	495,3	520,0	548,5	572,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.665,4	1.796,7	1.894,9	1.979,8	2.080,9
8	Transportasi dan Pergudangan	195,6	209,6	227,4	242,8	260,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	328,8	354,3	380,1	407,8	437,6
10	Informasi dan Komuniasi	1.041,2	1.139,6	1.232,3	1.332,6	1.421,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	603,5	673,6	726,2	780,7	836,3
12	Real Estate	178,0	191,0	203,9	217,7	230,0
13	Jasa Perusahaan	48,6	52,3	56,7	61,5	65,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	266,1	268,8	270,9	281,4	290,0
15	Jasa Pendidikan	513,4	544,6	586,6	623,5	655,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85,8	91,4	98,6	107,8	114,1
17	Jasa Lainnya	279,6	291,5	306,6	319,7	333,0
<b>PDRB</b>		<b>6.937,7</b>	<b>7.470,7</b>	<b>7.965,3</b>	<b>8.455,4</b>	<b>8.954,7</b>

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

\*) Angka Sementara

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 9.**  
**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s/d 2016 (%)**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,05	0,98	0,93	0,89	0,86
2	Pertambangan dan	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
	Penggalian					
3	Industri Pengolahan	16,93	16,90	17,08	17,14	17,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
6	Konstruksi	6,63	6,63	6,53	6,49	6,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,01	24,05	23,79	23,41	23,34
8	Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,81	2,85	2,87	2,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,74	4,77	4,82	4,91
10	Informasi dan Komuniasi	15,01	15,25	15,47	15,76	15,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,70	9,02	9,12	9,23	9,38
12	Real Estate	2,57	2,56	2,56	2,57	2,58
13	Jasa Perusahaan	0,70	0,70	0,71	0,73	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,60	3,40	3,33	3,25
15	Jasa Pendidikan	7,40	7,29	7,36	7,37	7,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,22	1,24	1,27	1,28
17	Jasa Lainnya	4,03	3,90	3,85	3,78	3,74
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

\*) Angka Sementara

PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

**Tabel 1. 10.**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2012 s/d 2016**

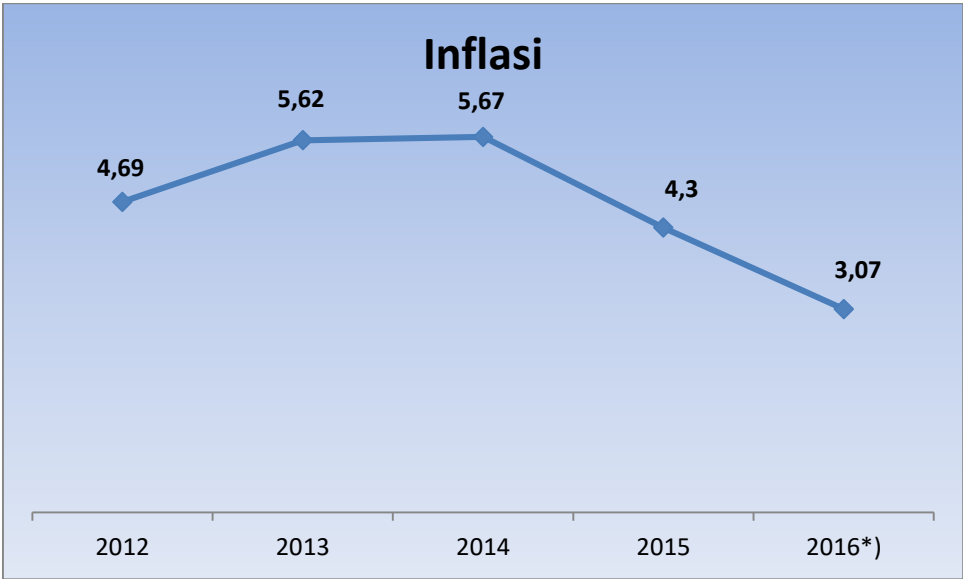
No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,48	0,50	0,53	0,56	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	
3	Industri Pengolahan	7,17	7,76	8,44	9,35	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,11	0,12	0,13	
6	Konstruksi	3,00	3,27	3,51	3,79	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	10,67	12,03	13,17	14,46	
8	Transportasi dan Pergudangan	0,00	0,00	0,00	1,84	

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	1,39	1,61	2,66	
10	Informasi dan Komuniasi	2,01	2,18	2,38	7,97	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,15	6,69	7,25	6,04	
12	Real Estate	4,11	4,75	5,40	1,57	
13	Jasa Perusahaan	1,12	1,25	1,36	0,40	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,30	0,32	0,35	1,88	
15	Jasa Pendidikan	1,67	1,71	1,76	4,59	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,34	3,70	4,16	0,75	
17	Jasa Lainnya	0,53	0,58	0,65	2,21	
PDRB		43,71	48,19	52,84	58,24	

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

\*) data belum tersedia

Tingkat inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.



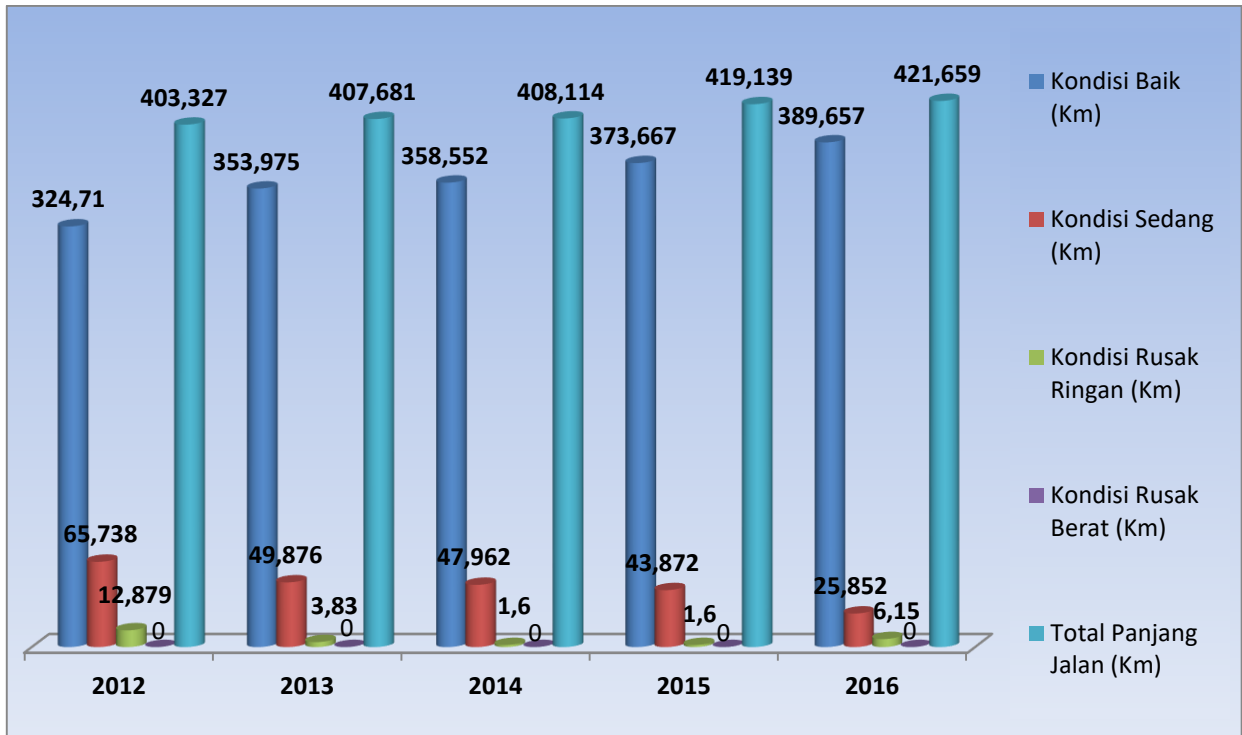
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017

\*) Angka Sementara

**Gambar 1. 5.**  
**Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2012 s/d 2016 (%)**

**b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara dan jalan kota.



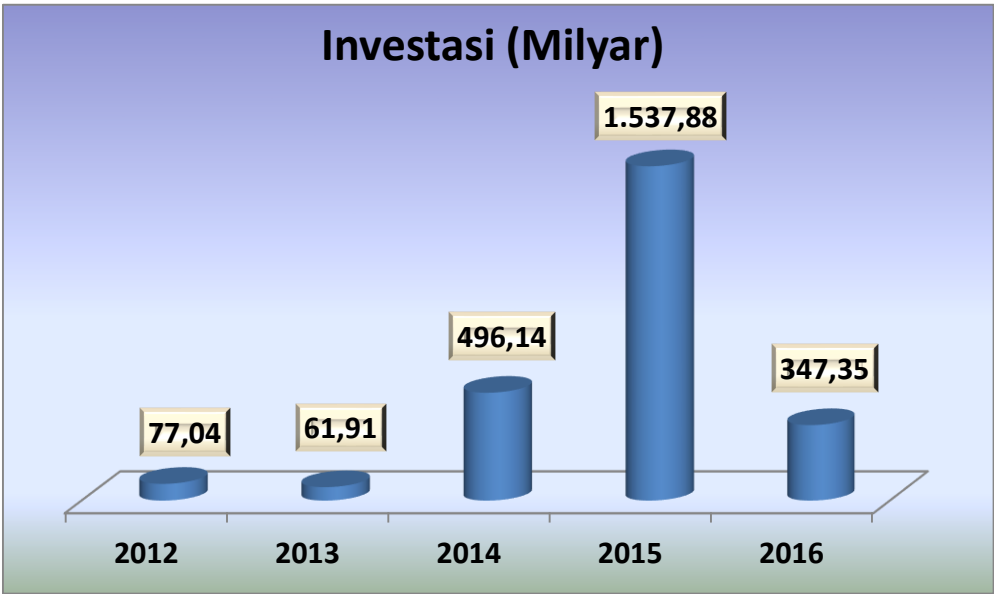
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Tahun 2017

**Gambar 1. 6.**  
**Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun**

### c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMK, sementara pada Tahun sebelumnya (2016) berada di sub bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun. Besarnya investasi pada Tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding dengan Tahun 2015, ini terjadi pada Tahun 2015 adanya perpanjangan izin dari PT. INKA, PT. IMS dan PT. Wilindo(lima tahun sekali) memberi kontribusi yang besar pada nilai investasi.



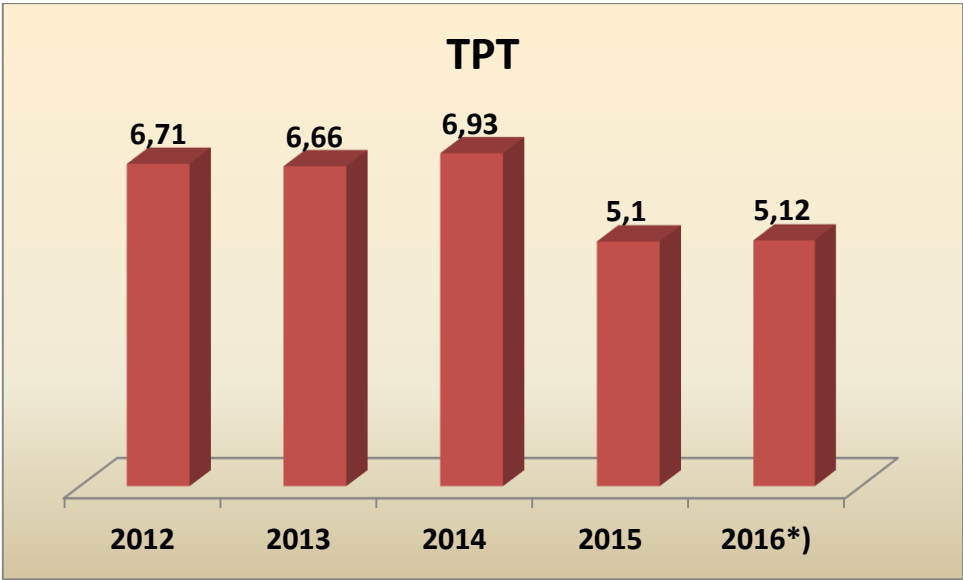


Sumber : Dinas Penanaman Modal, KUMKM dan PTSP, Tahun 2017

**Gambar 1. 7.**  
**Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

**d. Fokus Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017  
\*) Angka Sementara

**Gambar 1. 8.**  
**Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2012 – 2016**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel 1. 11.**  
**Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2012 s/d 2016**

<b>Indeks</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016*)</b>
IPM	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01
Indeks Kesehatan	081	0,81	0,81	0,81	0,81
Angka Harapan Hidup	72,33	72,38	72,41	72,41	72,44
Indeks Pendidikan	0,70	0,73	0,74	0,76	0,76
Angka Harapan Lama Sekolah	12,56	13,33	13,64	14,06	14,19
Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,68	10,86	10,90	11,08	11,09
Indeks PPP	0,81	0,82	0,82	0,82	0,83
Daya Beli (000 Rp)	14.317	14.604	14.643	14.723	15,300

*Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2017*

*\*) Angka Sementara*

IPM Kota Madiun pada Tahun 2016 mencapai 80,01 atau naik sebesar 0,53 poin dibanding Tahun 2015 yang mencapai 79,48. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RKPD**

Sebagaimana dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program dan kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD, berdasarkan perubahan asumsi-asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD.

Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Perubahan RKPD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi RKPD Kota Madiun Tahun 2017 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah. Perkembangan tersebut disebabkan antara lain adanya perubahan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,2%, yang berarti mengalami perubahan dari APBN 2017 yang ditetapkan sebesar 5,1%, juga mendasarkan adanya asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun Tahun 2017 yang diproyeksikan sebesar 6,16 %, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun diproyeksikan sedikit menurun menjadi 6,15 % yang diharapkan akan mampu dicapai melalui peningkatan investasi dan adanya keserasian pengelolaan APBD. Penurunan target disebabkan karena realisasi pertumbuhan 2016 hanya 5,90 % dari target sebesar 6,11 %, dan beberapa faktor ekonomi yang lain seperti adanya kenaikan tarif dasar listrik dan BBM, maka Pemerintah Kota Madiun berpikiran realistis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 % dan berharap bisa tercapai.

Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2017 didasarkan pada upaya sinkronisasi program dan kegiatan, antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional maupun provinsi, dimana pada Tahun 2017 masih diupayakan optimalisasi pencapaiannya. Perubahan ini juga didasarkan pada upaya percepatan pencapaian sasaran dan program dimana percepatan pencapaian program dan sasaran ini lebih ditujukan pada program prioritas yang menyangkut antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik; dan
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Upaya pencapaian program prioritas ini seiring dengan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga.

## **2.1 Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2017**

### **2.1.1 Perubahan Asumsi Dasar APBN-P 2017**

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik pada Tahun 2017 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia.

Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari APBN tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2017, sebagai berikut :

### **1) Pertumbuhan ekonomi dari 5,1 % berubah menjadi 5,2 persen.**

Pada kuartal I Tahun 2017, pertumbuhan PDB menunjukkan tren perbaikan ekonomi domestik. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,0 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,9 persen (yoy). Peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan sejak akhir Tahun 2016 menjadi faktor pendorong ekonomi. Selain itu, konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil turut mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I Tahun 2017.

Sepanjang Tahun 2017, tren kenaikan harga komoditas global, termasuk batu bara, diprediksi akan terus berlanjut dan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke depan. Tidak hanya pada perdagangan internasional, tren tersebut juga diperkirakan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua Tahun 2017. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik diharapkan turut mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP Tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN Tahun 2017.

### **2) Inflasi dari 4,0 % berubah menjadi 4,3 %.**

Pada bulan Mei Tahun 2017, laju inflasi mencapai 1,7% (ytd) atau secara tahunan mencapai 4,3 % (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir yang mencapai 5,5 persen (yoy). Pada bulan tersebut, perkembangan laju inflasi komponen inti berada pada tingkat 3,2 % (yoy), sedangkan komponen *administered price* mencapai 9,1 % (yoy) dan komponen *volatile food* cukup terjaga pada tingkat 3,3 % (yoy). Pada paruh pertama Tahun 2017, laju inflasi masih akan dipengaruhi oleh tekanan dari sisi *administered price*. Tekanan lain dari sisi eksternal diperkirakan akan sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas dunia terutama minyak. Pemerintah tetap menempuh upaya-upaya untuk mengelola risiko tekanan inflasi khususnya melalui penguatan sisi penawaran dan distribusi pasokan.

Dalam menguatkan sisi penawaran, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga akan mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa sehingga dapat menekan biaya distribusi dan logistik. Dalam

menghadapi dampak risiko inflasi, Pemerintah juga tetap menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat secara umum. Upaya-upaya tersebut juga didukung oleh sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank Indonesia dalam melaksanakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, laju inflasi tahun 2017 tetap diperkirakan berada pada sasaran inflasi  $4,0 \pm 1,0$  % yaitu akan mencapai level 4,3 %, atau meningkat dari angka asumsi APBN yang sebesar 4,0 %.

### **3) Nilai tukar dari Rp 13.400/US\$ berubah menjadi Rp 13.300/US\$.**

Sampai akhir Mei Tahun 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp 13.336 per US\$, sedikit melemah dibanding rata-rata tahun 2016 yang mencapai Rp13.307. Secara umum, perkembangan nilai tukar di Tahun 2017 diperkirakan masih mengalami depresiasi dengan tingkat *volatilitas* yang rendah. Risiko yang berpotensi menyebabkan tekanan pelemahan Rupiah antara lain datang dari dampak rencana kenaikan kembali *FFR* sebanyak dua kali di Tahun 2017, menyusul kenaikan pertama sebesar 25 basis poin pada bulan Maret 2017. Suku bunga acuan *FFR* diperkirakan akan mencapai tingkat 1,4-1,6 persen di akhir tahun 2017. Selain itu, tekanan eksternal juga akan datang dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Pemerintahan baru, rebalancing ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat berpotensi mendorong *flight to quality* ke Amerika Serikat dalam jangka panjang.

Sementara itu, faktor positif domestik yang berpotensi menghambat depresiasi Rupiah lebih dalam adalah membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, menurunnya defisit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Modal asing juga diperkirakan masih akan masuk terutama karena masih berlangsungnya program quantitative easing di Eropa dan Jepang serta upgrade rating Indonesia oleh S&P.

Dengan tantangan internal dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di bawah koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di Tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp13.400 per US\$, atau mengalami depresiasi dibandingkan dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp13.300 per US\$.

### **4) Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,3 % tetap menjadi 5,3 %.**

Sampai Mei Tahun 2017, rata-rata suku bunga SPN 3 Bulan mencapai 5,1%. Beberapa faktor risiko global yang diperkirakan akan memengaruhi kinerja suku bunga

SPN 3 bulan sampai akhir Tahun 2017 antara lain adalah potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelonggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih akan dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mengendalikan inflasi, sentimen positif terhadap kebijakan front loading dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat. Dengan tantangan domestik dan eksternal tersebut, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan di Tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,2 %, atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017.

**5) Harga minyak Indonesia (ICP) US\$ 45,0 per barel berubah menjadi US\$ 50,0 per barel.**

Peningkatan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Hingga Mei Tahun 2017, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 47,1 US\$ per barel, meningkat 5 % dibandingkan dengan realisasi rata-rata harga ICP tahun 2016 pada periode yang sama. Meskipun demikian, beberapa negara non-OPEC termasuk Amerika Serikat memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak untuk meningkatkan jumlah pengeboran. Selain itu, tingkat konsumsi minyak mentah Asia juga masih relatif stabil dan belum menunjukkan peningkatan.

Badan Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memperkirakan tren harga minyak mentah terus berlanjut hingga akhir Tahun 2017. Proyeksi rata-rata harga minyak mentah Brent mencapai 52,7 US\$ per barel pada Tahun 2017, meningkat 21 % dari Tahun 2016. Berdasarkan pergerakan harga minyak mentah dunia dan pola perhitungan ICP, Pemerintah memperkirakan rata-rata ICP tahun 2017 akan mencapai 50 US\$ per barel, lebih tinggi dari angka APBN Tahun 2017 sebesar 45 US\$ per barel.

**6) Lifting minyak dari 815 ribu barel per hari tetap 815 ribu barel per hari.**

Dalam periode Tahun 2012- 2016, realisasi lifting minyak bumi menunjukkan tren yang terus menurun. Di Tahun 2012, lifting minyak mencapai 860 ribu barel per hari (bph) dan turun menjadi 778 ribu bph di tahun 2015. Selain itu, dalam rentang waktu tersebut, realisasi lifting minyak selalu lebih rendah dari target APBN dan APBNP kecuali pada tahun 2016 dimana realisasi lifting minyak lebih tinggi dari target pada APBNP. Tren penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan alamiah sejalan dengan sumur produksi dan fasilitas operasi yang sudah menua, sementara eksplorasi yang dilakukan belum memberikan hasil yang memadai. Selain itu, rendahnya harga minyak yang rendah pada periode tersebut mengakibatkan banyaknya proyek yang tidak memenuhi skala keekonomian yang menyebabkan rendahnya aktivitas investasi pada sektor hulu migas

Untuk tahun 2017, lifting minyak diperkirakan masih sesuai dengan target APBN yaitu 815 bph untuk lifting minyak. Upaya untuk mencapai target produksi migas dimaksud antara lain dengan:

- i. menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian wilayah kerja;
- ii. penerapan teknologi tepat guna;
- iii. penerapan metode-metode baru untuk penemuan sumberdaya dan cadangan migas;
- iv. monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu; serta
- v. pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi. Adapun sumber utama produksi migas nasional akan dihasilkan dari lapangan-lapangan minyak utama pada Blok Rokan, Blok Indonesia, Blok Mahakam, dan Blok Cepu, serta lapangan gas utama pada Blok Mahakam, Blok Berau Muturi Wiriagar, Blok Corridor, dan Blok Indonesia.

#### **7) Lifting gas dari 1.150 ribu barel per hari tetap 1.150 ribu barel per hari.**

Dalam periode Tahun 2012- 2016, realisasi Lifting gas pada periode Tahun 2013-2016 juga selalu berada di bawah target APBN kecuali pada Tahun 2016 dimana realisasi lifting gas sebesar 1,18 juta barel setara minyak per hari (bsmph) mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu 1,15 juta bsmph pada APBN dan 1,11 juta bsmph pada APBNP. Lifting gas bumi juga mengalami tren penurunan yaitu turun dari lifting di tahun 2013 sebesar 1,22 juta bsmph menjadi 1,18 juta bsmph di tahun 2016. Selain dikarenakan oleh kendala produksi dan penurunan alamiah yang terjadi pada lapangan gas, lifting gas menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan kargo yang belum memiliki komitmen penjualan (uncontracted gas).

Untuk Tahun 2017, lifting gas diperkirakan masih sesuai dengan target APBN yaitu 1,15 juta bsmph untuk lifting gas. Upaya untuk mencapai target produksi migas dimaksud antara lain dengan:

- i. menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian wilayah kerja;
- ii. penerapan teknologi tepat guna;
- iii. penerapan metode-metode baru untuk penemuan sumberdaya dan cadangan migas;
- iv. monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu; serta
- v. pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi. Adapun sumber utama produksi migas nasional akan dihasilkan dari lapangan-lapangan minyak utama pada Blok Rokan, Blok Indonesia, Blok Mahakam, dan Blok Cepu, serta lapangan gas utama pada Blok Mahakam, Blok Berau Muturi Wiriagar, Blok Corridor, dan Blok Indonesia.



**Tabel. 2.1**  
**Asumsi Indikator Makro Ekonomi APBNP 2017**

<b>Indikator</b>	<b>APBN</b>	<b>APBN-P</b>
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2
- Inflasi (%) y-o-y	4,0	4,3
- Nilai tukar (Rp/USD)	13.300	13.400
- Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	5,2
- Harga minyak Mentah (US\$/barrel)	45	50
- Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	815	815
- Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.150	1.150

*Sumber : NK RAPBNP 2017*

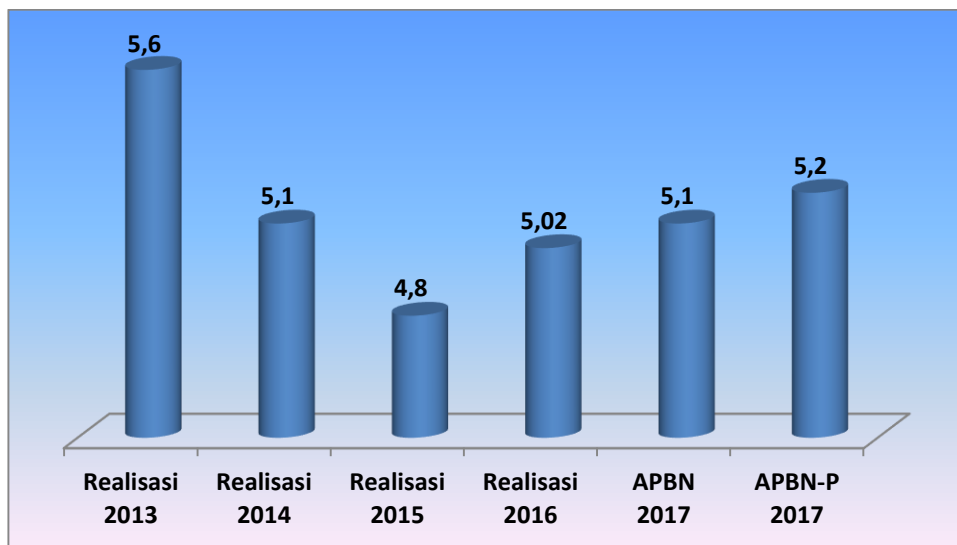
Pada kuartal I Tahun 2017, pertumbuhan PDB menunjukkan tren perbaikan ekonomi domestik. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,0 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,9 persen (yoy). Peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan sejak akhir Tahun 2016 menjadi faktor pendorong ekonomi. Selain itu, konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil turut mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I Tahun 2017.

Sepanjang Tahun 2017, tren kenaikan harga komoditas global, termasuk batu bara, diprediksi akan terus berlanjut dan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke depan. Tidak hanya pada perdagangan internasional, tren tersebut juga diperkirakan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua Tahun 2017. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik diharapkan turut mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP Tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN Tahun 2017.

Sepanjang periode Tahun2012-2016, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRRT) dapat tumbuh rata-rata sebesar 5,2 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang relatif terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Selain itu, adanya kegiatan pemilihan umum kepala daerah di beberapa wilayah turut menyumbang kontribusi pada pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRRT dalam RAPBNP Tahun 2017

diperkirakan sebesar 5,1 %, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan APBN Tahun 2017. Hal ini diupayakan melalui kebijakan stabilitas inflasi, peningkatan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok dan pemberian program bantuan sosial yang komprehensif sehingga pemerataan pendapatan antar masyarakat juga dapat tercapai. Selain faktor-faktor tersebut, perkiraan peningkatan kinerja ekspor dan investasi serta sektor-sektor kunci dalam perekonomian juga diperkirakan memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga sehingga mampu tumbuh lebih baik pada Tahun 2017.

Selama periode tahun 2012-2016, konsumsi Pemerintah menunjukkan perbaikan meskipun tercatat mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 2016. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2016 terkait adanya penyesuaian belanja Pemerintah nonproduktif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja Pemerintah. Pada Tahun 2017, belanja Pemerintah tetap diarahkan untuk pemenuhan program prioritas Pemerintah dengan memerhatikan kemampuan fiskal tahun berjalan. Komitmen Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional akan terus dijaga melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektif baik melalui belanja yang langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah. Dalam RAPBNP Tahun 2017, konsumsi Pemerintah diperkirakan sebesar 4,6 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN Tahun 2017.



Sumber : NK RAPBNP 2017

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2016 Serta Proyeksi Tahun 2017**

Pada periode Tahun 2012-2016, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) rata-rata tumbuh sebesar 5,6 %. Pertumbuhan PMTB cenderung melambat dengan pertumbuhan terendah sebesar 4,4 % di Tahun 2014. Kecenderungan perlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakpastian dan belum stabilnya

perekonomian global yang berpengaruh terhadap investasi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun demikian, kinerja PMTB tetap mampu tumbuh positif seiring dengan berbagai pembangunan infrastruktur, serta kebijakan perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan prosedur investasi.

Pada Tahun 2017, risiko ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih membayangi kinerja investasi. Namun demikian, berbagai upaya perbaikan iklim dan kemudahan berinvestasi terus dilanjutkan diantaranya melalui keberlanjutan pembangunan proyekproyek infrastruktur agar menjadi pendorong pertumbuhan PMTB kedepan. Berbagai reformasi birokrasi yang dilakukan melalui implementasi Paket-Paket Kebijakan Ekonomi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dunia usaha dan meningkatkan daya saing industri. Selain itu, pemberian status *investment grade* oleh S&P diharapkan dapat meningkatkan persepsi positif bagi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, sinergi Pemerintah dengan BUMN dan swasta juga akan terus dibangun guna mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi, seperti kredit perbankan, pasar modal, PMA-PMDN dan *capital expenditure (capex)* BUMN. Berdasarkan risiko dan potensi yang ada, PMTB dalam RAPBNP 2017 diupayakan untuk tumbuh sebesar 5,4 % agar tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 merupakan tahun yang cukup berat bagi kinerja ekspor dan impor Indonesia dengan pertumbuhan kedua komponen tersebut terus mengalami penurunan. Tekanan pada kinerja ekspor dan impor selama periode tersebut terutama bersumber dari pelemahan permintaan oleh mitra dagang Indonesia dan penurunan harga komoditas di pasar global. Dalam kurun Tahun 2012-2014, pertumbuhan ekspor dan impor melambat namun tidak sampai mengalami kontraksi. Perkembangan tersebut telah mendorong terjadinya defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Penurunan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor terus berlanjut di tahun 2015 dan 2016, bahkan hingga mencatat pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pertumbuhan. Di kedua tahun tersebut, kontraksi pertumbuhan impor tercatat lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekspor. Kondisi tersebut telah membawa dampak positif bagi kinerja neraca perdagangan dimana kembali tercapai surplus perdagangan. Namun di sisi lain tetap perlu diwaspadai bahwa walaupun terjadi surplus perdagangan, kontraksi ekspor dan impor yang terjadi juga mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi dan produksi di dalam negeri.

Pada akhir Tahun 2016, pertumbuhan ekspor dan impor mulai mencatat kenaikan. Tren perbaikan kedua faktor tersebut diprediksi terus berlanjut hingga Tahun 2017. Dalam RAPBNP Tahun 2017, ekspor dan impor masing-masing diperkirakan

mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,8 % dan 3,9 %. Peningkatan ekspor dilakukan melalui strategi pembukaan pasar baru bagi produk-produk nontradisional dan diversifikasi produk ekspor unggulan. Selain itu, peningkatan citra positif akan produk-produk nasional (nation branding) juga akan dilakukan sebagai strategi untuk peningkatan akses pasar baru.

**Tabel. 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan**  
**Tahun 2016 – 2017 (persen, y-o-y)**

URAIAN	2016	2017	
	REALISASI	APBN	RAPBNP
<b>Pengeluaran</b>			
1. Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,0	5,0	5,1
2. Konsumsi Pemerintah	-0,14	4,8	4,6
3. PMTB	4,5	6,0	5,
4. Ekspor Barang dan Jasa	-1,7	0,2	4,8
5. Impor Barang dan Jasa	-2,3	0,7	3,9
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>

Sumber : NK RAPBNP 2017

**2.1.2 Perubahan Laju Inflasi**

Pada Maret 2017 Kota Madiun mengalami inflasi sebesar 0,45 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 125,94. Dari 8 kota penghitung inflasi Nasional di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,48 % dengan IHK sebesar 124,08. Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,14 % dengan IHK 124,62.

Inflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami kenaikan indeks sebesar 0,22 %; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,77 %; kelompok Sandang sebesar 0,56 %; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,05 %; dan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,99 %. Kelompok Bahan Makanan dan kelompok Kesehatan menekan inflasi masing-masing sebesar -0,44 dan -0,12 %.

Tingkat inflasi Tahun kalender April 2017 (April 2016 – Desember 2016) dan inflasi tahun ke Tahun (April 2017 terhadap April 2016) masing-masing sebesar 2,61 dan 4,37 %.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK.

Inflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami kenaikan indeks sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,77 persen; kelompok Sandang sebesar 0,56 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,05 persen; dan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,99 persen. Kelompok Bahan Makanan dan kelompok Kesehatan menekan inflasi masing-masing sebesar -0,44 dan -0,12 persen.

Komoditas yang dominan mempengaruhi terjadinya inflasi pada April 2017 diantaranya: tarip listrik, bawang putih, tarip pulsa ponsel, sepeda motor, dan kue kering berminyak. Komoditas yang menekan inflasi antara lain: cabai rawit, bawang merah, gula pasir, kayu balokan dan jeruk.

Berdasarkan kelompok komoditas, dari 7 (tujuh) kelompok yang ada, 5 (lima) kelompok mengalami inflasi dan 2 (dua) kelompok mengalami deflasi. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil inflasi terbesar pada bulan April yaitu sebesar 0,2862 %, disusul kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,1726 %, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau sebesar 0,0429 %, kelompok Sandang sebesar 0,0316 %, dan kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga sebesar 0,0040 %. Kelompok Bahan Makanan dan kelompok Kesehatan menekan inflasi dengan andil masing-masing sebesar -0,0829 dan - 0,0069 %.

Tabel 2.3.

**IHK dan Tingkat Inflasi Kota Madiun April 2017, Tahun Kalender 2017, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)**

Kelompok Pengeluaran		IHK April 2016	IHK Desember 2016	IHK April 2017	Inflasi April 2017	Laju Inflasi Tahun Kalender 2017	Inflasi Tahun ke Tahun
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Umum ( Headline)</b>	<b>120,67</b>	<b>122,74</b>	<b>125,94</b>	<b>0,45</b>	<b>2,61</b>	<b>4,37</b>
1	Bahan Makanan	124,57	123,89	122,84	-0,44	-0,85	-1,39
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	126,94	130,95	133,05	0,22	1,60	4,81
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	119,70	122,04	128,36	1,17	5,18	7,23
4	Sandang	114,14	115,63	117,25	0,56	1,40	2,72
5	Kesehatan	115,37	119,20	120,15	-0,12	0,80	4,14
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	117,49	120,59	122,43	0,05	1,53	4,20
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	116,91	118,66	125,28	0,99	5,58	7,16

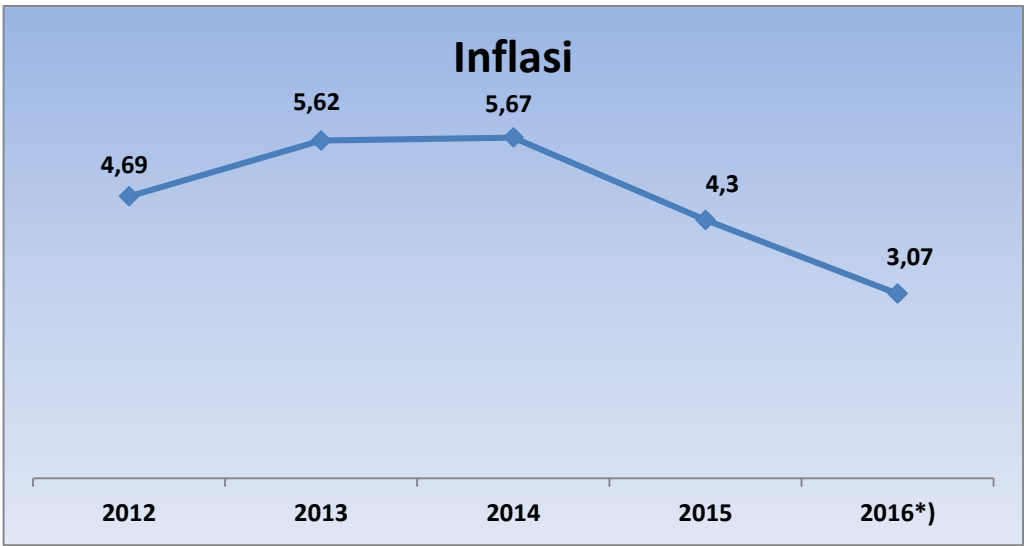
(1) Persentase perubahan IHK April 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya

(2) Persentase Perubahan IHK April 2017 terhadap IHK Maret 2017

(3) Persentase perubahan IHK April 2017 terhadap IHK April 2016

Sumber : BPS Kota Madiun, 2017

Berdasarkan PDRB Kota Madiun, tingkat inflasi Kota Madiun Tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,23 dibanding Tahun 2015 yaitu dari 4,30% menjadi 3,07%. Tingkat inflasi di Kota Madiun pada Tahun 2012-2016 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2017  
\*) Angka Sementara

**Gambar 2.2**  
**Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2012-2016 (%)**

**2.1.3 Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan sektor usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah/regional. Dengan demikian PDRB secara agregat dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Hal ini digunakan untuk melihat gejolak harga pada tahun berjalan dan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Di bawah ini nilai PDRB Kota Madiun dihitung atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan Tahun 2016 dengan Tahun dasar 2010.

**Tabel. 2.4**  
**Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2016 (Milyar Rupiah)**

No	Uraian	ADHB*) (Milyar)	ADHK*) (Milyar)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	102,3	76,4
2	Pertambangan dan Penggalian	2,6	2,1
3	Industri Pengolahan	1.807,90	1.553,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,4	7,3
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	24,5	19,1

No	Uraian	ADHB*) (Milyar)	ADHK*) (Milyar)
6	Konstruksi	718,1	572,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.792,00	2.080,9
8	Transportasi dan Pergudangan	360,1	260,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	523,6	437,6
10	Informasi dan Komuniasi	1.524,60	1.421,0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.177,70	836,3
12	Real Estate	298,8	230,0
13	Jasa Perusahaan	75,7	65,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	350,2	290,0
15	Jasa Pendidikan	863	655,6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142	114,1
17	Jasa Lainnya	413,6	333,0
<b>PDRB</b>		<b>11.077,47</b>	<b>11.185,10</b>

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2017

\*) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2016 mencapai 5,90% atau melambat dibandingkan Tahun 2015 sebesar 6,05%, karena dipengaruhi berbagai faktor perekonomian. Pertumbuhan terjadi pada seluruh sektor usaha, di mana sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,30 %. Posisi berikutnya, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,13 %. Kemudian, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,11 %. Dari kondisi tersebut ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor konstruksi, sektor Pertambangan dan Penggalian, Real Estate, Jasa Perusahaan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami penurunan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakpastian ekonomi global dan tren pelemahan volume perdagangan dunia sepanjang periode ini turut memengaruhi ekonomi domestik, termasuk realisasi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor tersebut, tren penurunan harga komoditas dunia, kebijakan taper tantrum oleh Amerika Serikat, kebijakan *debt ceiling* oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, serta tren penurunan pertumbuhan Tiongkok turut memengaruhi kinerja ekonomi global. Namun demikian, masih cukup baiknya permintaan domestik

yaitu stabilnya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi yang salah satunya ditandai dengan pemberian peringkat utang menjadi investment grade oleh the Standard & Poor's (S&P), perkiraan perbaikan perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di tahun-tahun mendatang.

**Tabel. 2.5**  
**Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi**

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,93	0,7	0,98	1,58	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	1,99	3,69	1,69	1,98	1,91
3	Industri Pengolahan	5,3	7,57	7,78	6,49	7,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,97	4,13	3,15	3,28	3,86
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,08	4,68	2,15	2,58	3,82
6	Konstruksi	6,59	7,69	4,98	5,48	4,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	7,84	7,91	5,46	4,48	5,11
8	Transportasi dan Pergudangan	6,05	7,18	8,45	6,78	7,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	7,77	7,28	7,28	7,30
10	Informasi dan Komuniasi	9,11	9,45	8,13	8,13	6,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,15	11,61	7,81	7,52	7,11
12	Real Estate	6,95	7,28	6,76	6,76	5,64
13	Jasa Perusahaan	5,43	7,48	8,41	8,41	5,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	1	0,78	3,88	3,05
15	Jasa Pendidikan	6,01	6,08	7,71	6,3	5,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,48	6,5	7,87	9,35	5,85
17	Jasa Lainnya	3,21	4,25	5,35	4,28	4,17
<b>PDRB</b>		<b>6,83</b>	<b>7,68</b>	<b>6,62</b>	<b>6,15</b>	<b>5,90</b>

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2017  
\*) Angka Sangat Sementara

**Tabel. 2.6**  
**Prospek dan Prediksi Kinerja Pembangunan Kota Madiun**

Indikator	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Real 2016*)	Proyeksi 2017 M	Proyeksi 2017 P
Pertumbuhan Ekonomi	7,68	6,62	6,05	5,90	6,16	6,15
PDRB ADHB (Milyar Rp)	8.390,40	9.214,20	10.191,70	11.077,40	11.758,16	11.758,16
PDRB ADHK (Milyar Rp)	7.470,70	7.965,50	8.447,40	8.916,30	9.389,57	9.389,57



Indikator	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Real 2016*)	Proyeksi 2017 M	Proyeksi 2017 P
PDRB per Kapita (Juta Rp)	48,19	52,84	58,24	60,55	63,85	63,85
TPT (%)	6,66	6,93	5,1	5,12	3,81	4,56
IPM	78,17	78,81	79,48	80,01	80,16	80,46
Inflasi	5,62	5,67	4,3	3,07	4,5 ± 1%	4,5± 1%
Kemiskinan (%)	5	4,8	4,89	5,16	4,38	4,76

Proyeksi capaian kinerja Tahun 2017 pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah direncanakan mengalami perubahan dari perencanaan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, hal ini disebabkan adanya beberapa kebijakan yang secara ekonomi sangat mengganggu bagi masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan tarif dasar listrik yang menambah beban masyarakat.

#### 2.1.4.Lain-lain asumsi

Beberapa asumsi lainnya yang menyebabkan Perubahan Asumsi dasar Perubahan RKPD Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

##### a. Yang menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut :

- Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 305.857.486.594,13.**
- Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2017, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.
- Adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru juga memerlukan penyesuaian Anggaran Belanja disesuaikan dengan Program dan Kegiatan OPD tersebut.
- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/12.472/202/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebesar **Rp. 711.850.000,00.**
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, bahwa Kota Madiun mendapat Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau sebesar **Rp. 13.507.650.000,00.**
- surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten/Kota. Bahwa untuk Dana BOS agar dianggarkan dalam Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan untuk Belanja Dana BOS Dimasukkan Dalam Belanja Langsung

**b. Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja yaitu sebagai berikut :**

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017, ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Honorarium bagi Tenaga Kontrak kerja pada Pemerintah Kota Madiun.

**2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali.

**Tabel. 2.7**  
**Pendapatan dan Perubahan Pendapatan**

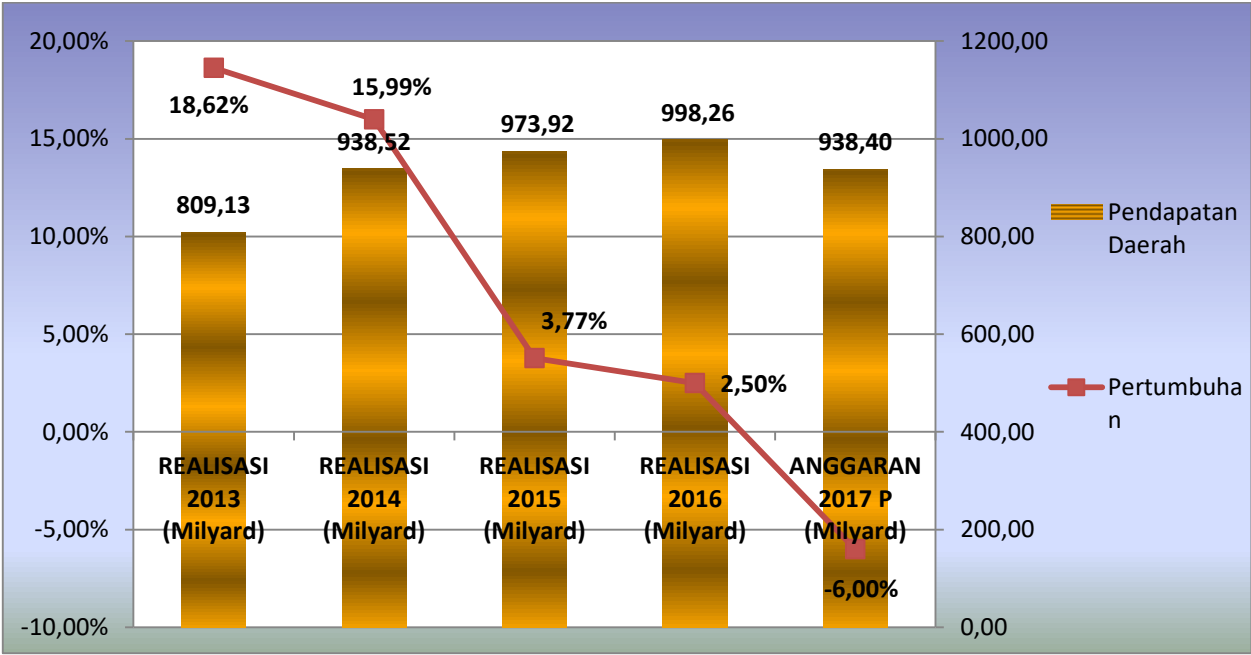
KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>159.324.617.000,00</b>	<b>185.240.952.000,00</b>	<b>25.916.335.000,00</b>	<b>16,27%</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	55.000.000.000,00	58.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5,45%
1.1.2.	Retribusi Daerah	13.144.200.000,00	13.411.593.000,00	267.393.000,00	2,03%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.093.398.000,00	12.093.398.000,00	0,00	FALSE
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	79.087.019.000,00	101.735.961.000,00	22.648.942.000,00	28,64%
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>698.953.575.000,00</b>	<b>684.297.654.000,00</b>	<b>(14.655.921.000,00)</b>	<b>-2,10%</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak	32.102.749.000,00	37.028.777.000,00	4.926.028.000,00	15,34%
	Bagi Hasil Bukan Pajak	27.536.706.000,00	27.754.865.000,00	218.159.000,00	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	529.893.643.000,00	511.375.289.000,00	(18.518.354.000,00)	-3,49%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	97.665.700.000,00	94.614.322.000,00	(3.051.378.000,00)	-3,12%
1.2.4.	Dana Bagi Hasil Cukai	11.754.777.000,00	13.524.401.000,00	1.769.624.000,00	15,05%
1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>68.711.660.000,00</b>	<b>68.860.260.000,00</b>	<b>148.600.000,00</b>	<b>0,22%</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0.00	0.00	0,00	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.648.410.000,00	60.648.410.000,00	0,00	0,00%
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	563.250.000,00	711.850.000,00	148.600.000,00	26,38%
	Jumlah Pendapatan	926.989.852.000,00	938.398.866.000,00	11.409.014.000,00	1,23%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas nampak bahwa jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat, menurun dan tetap adalah:

- Jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, DBH pajak dari provinsi dan DBHCHT.
- jenis pendapatan yang diproyeksi menurun Dana Alokasi Umum
- Jenis pendapatan yang diproyeksi tetap adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.



Gambar 2.3  
Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Pertumbuhannya

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah pada

Tahun 2017 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan. Potensi pendapatan daerah tersebut antara lain :

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

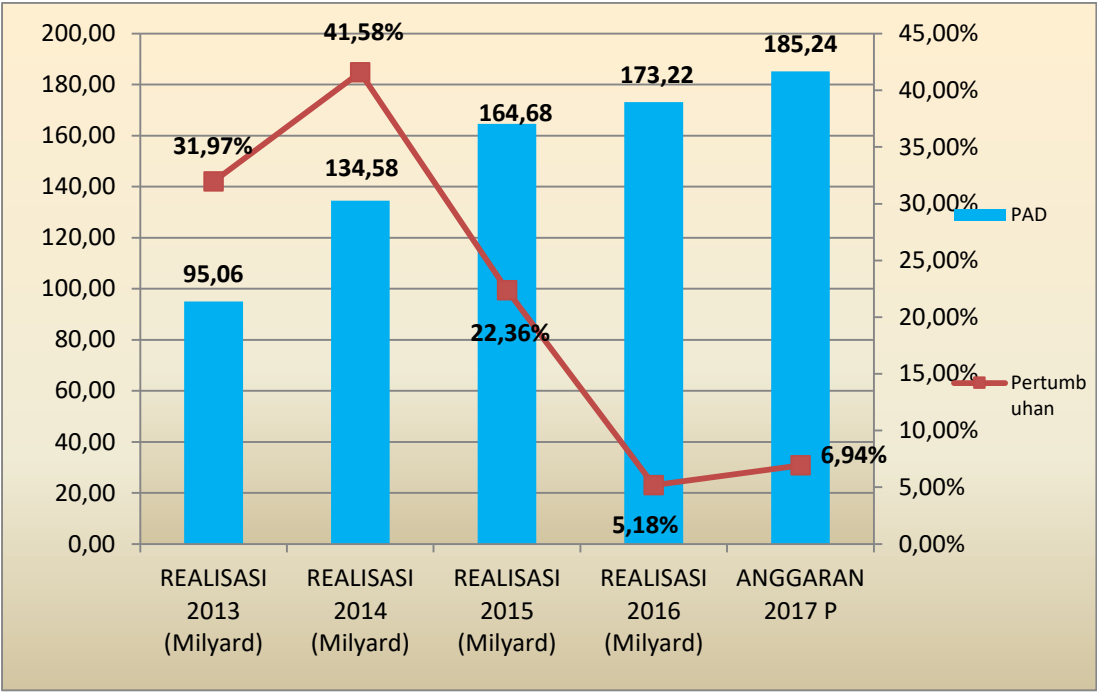
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Disamping sumber-sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang menjadi hak daerah, maka Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

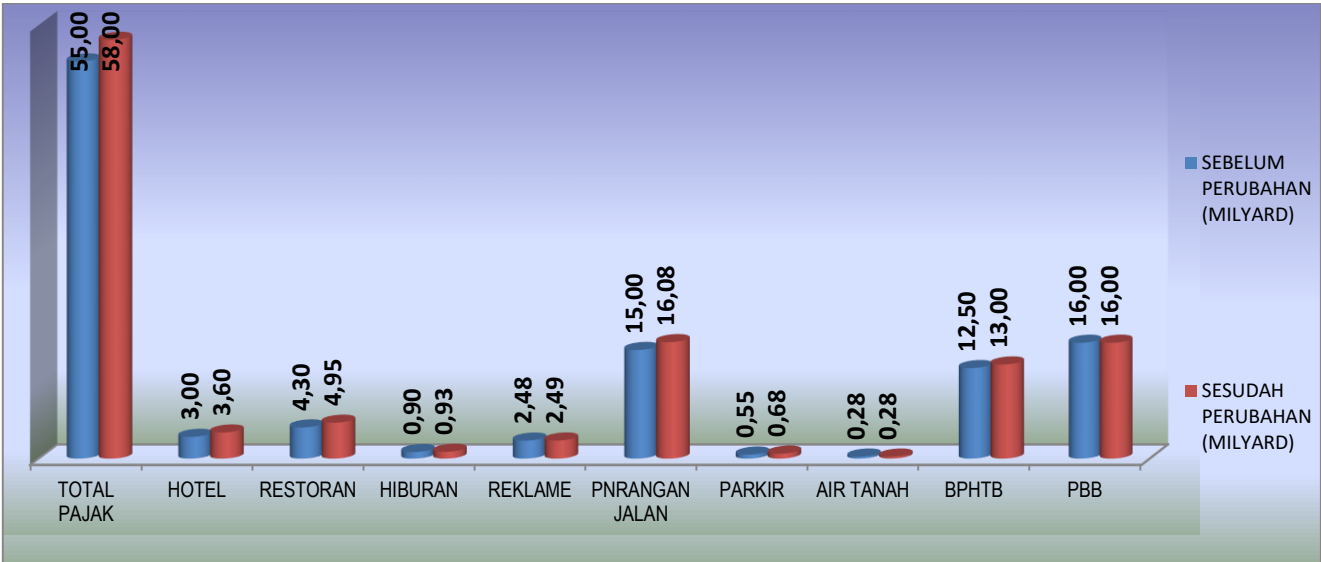
Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan mulai Tahun 2014 pelaksanaan pemungutan PBB sudah diserahkan ke daerah. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun efektifitas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya pada sisi pendayagunaannya dikelola secara proporsional dan profesional,

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah, bahwa PAD sebagian didayagunakan untuk memenuhi Kedudukan Keuangan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD, dan selebihnya direncanakan untuk membiayai Belanja Langsung yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

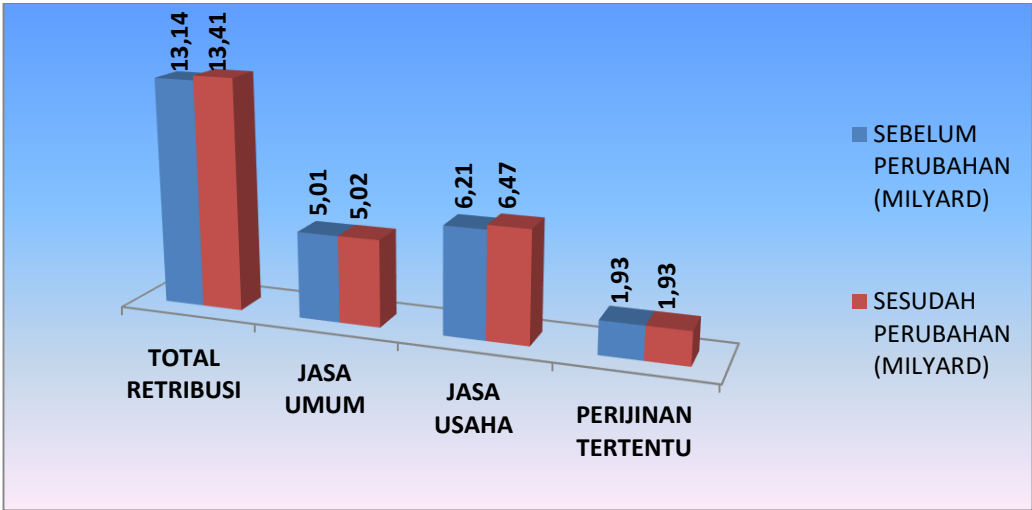
Perubahan PAD sampai akhir Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan mampu mencapai Rp. 175.913.357.000,00 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.588.740.000,00 atau naik sebesar 10,41 % dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 159.324.617.000,00.



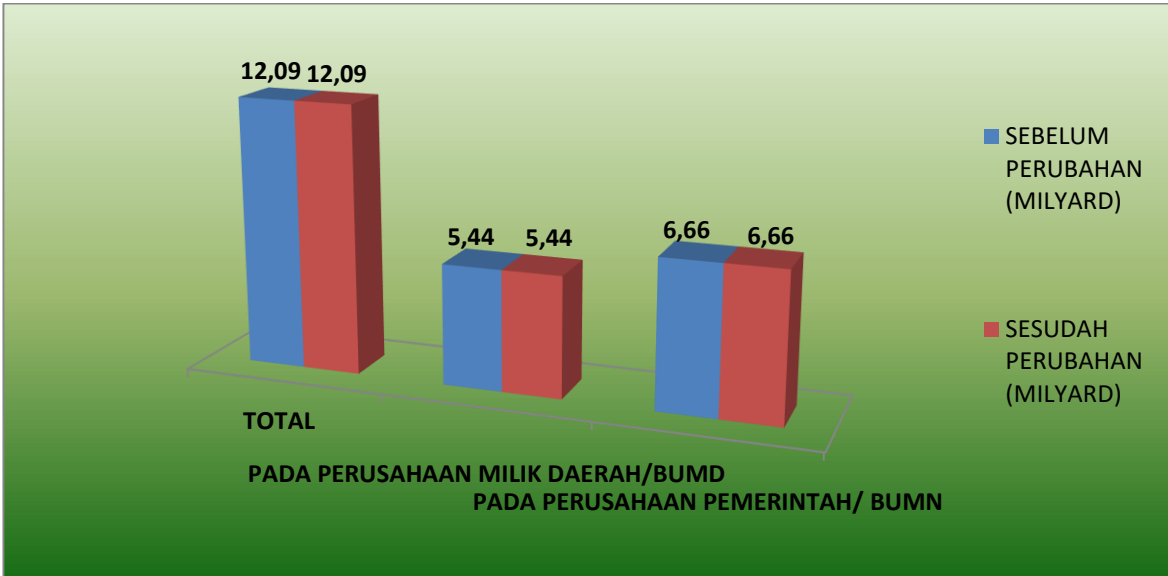
Gambar 2.4  
PAD dan Pertumbuhannya



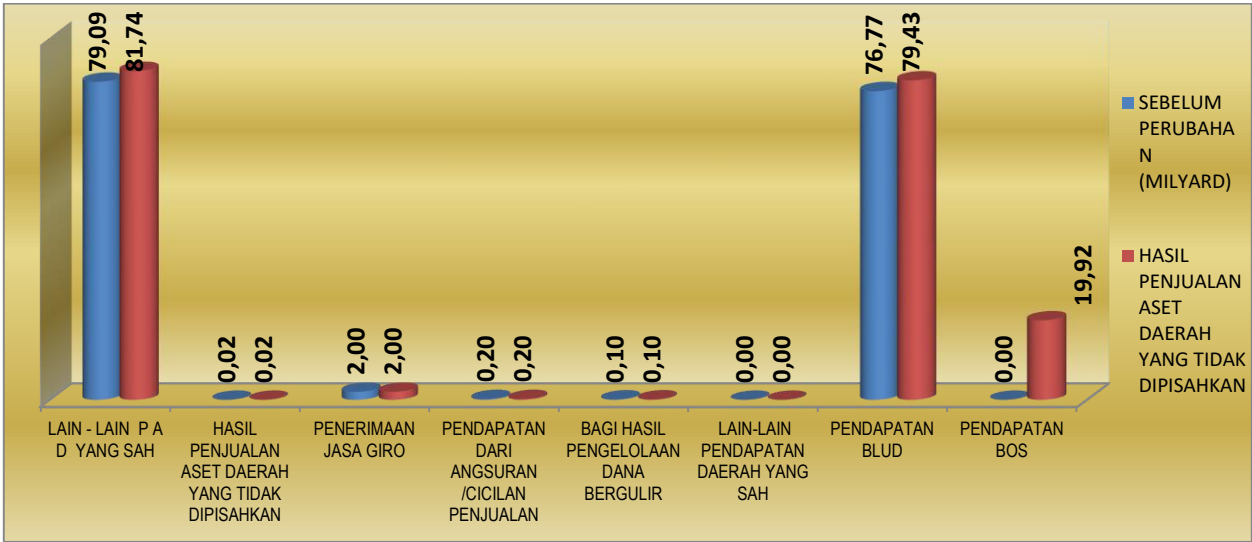
Gambar 2.5  
Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



Gambar 2.6  
Penerimaan Retribusi Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



**Gambar 2.7**  
**Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**

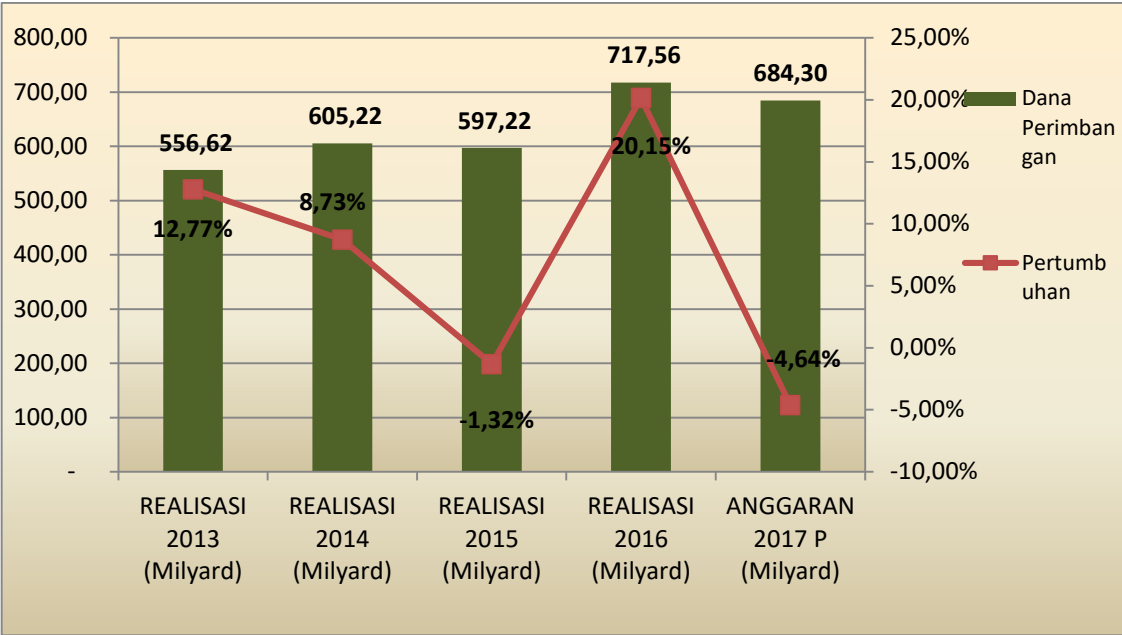


**Gambar 2.8**  
**Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**

**2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kota Madiun dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2017 sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini mengalami penurunan sebesar 2,10 % yaitu sebesar Rp. 687.349.032.000,00 yang sebelumnya Rp. 684.297.654.000,00. Penurunan yang signifikan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

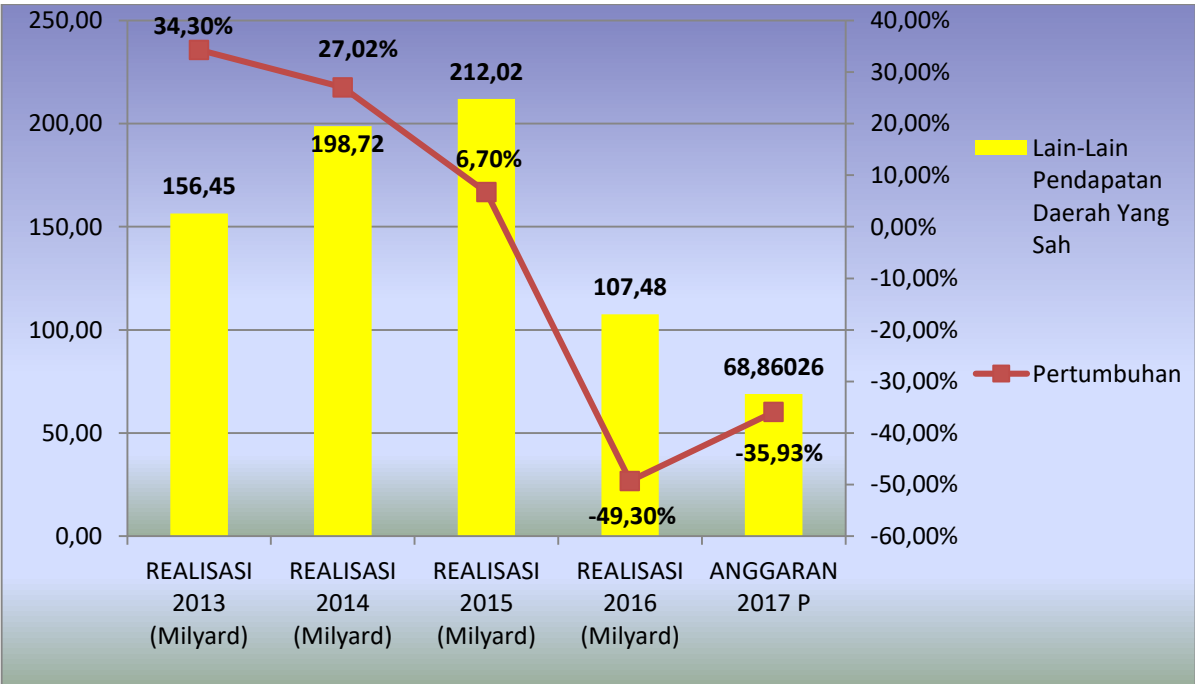


Gambar 2.9  
Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu adanya kenaikan sebesar Rp. 148.600.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,22% dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 68.711.660.000,00 menjadi Rp. 68.860.260.000,00, kenaikan ini berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.



Gambar 2.10  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai konsekuensi penerapan prinsip keadilan anggaran, maka rencana perubahan dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian hasil dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penetapan rencana perubahan belanja daerah, pada umumnya diarahkan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017. Karena adanya faktor keterbatasan data, waktu serta alokasi dana yang ada, Rencana Kerja dimaksud belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya.

Tabel. 2.8  
Belanja dan Perubahan Belanja

KOD E	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	478.346.613.000,00	536.887.810.334,13	58.541.197.334,13	12,24%
2.1.1.	Belanja Pegawai	388.100.674.000,00	385.748.873.000,00	-2.351.801.000,00	-0,61%
2.1.2.	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	
2.1.4.	Belanja Hibah	7.076.082.000,00	13.574.866.000,00	6.498.784.000,00	91,84%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.276.980.000,00	8.052.880.000,00	2.775.900.000,00	52,60%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	627.851.000,00	627.851.000,00	0,00	0,00%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	77.265.026.000,00	128.883.340.334,13	51.618.314.334,13	66,81%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	587.128.478.000,00	707.348.147.473,00	120.219.669.473,00	20,48%
2.2.1.	Belanja Pegawai	56.724.154.000,00	60.831.940.683,00	4.107.786.683,00	7,24%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.902.931.000,00	335.283.021.902,00	20.380.090.902,00	6,47%
2.2.3.	Belanja Modal	215.501.393.000,00	311.233.184.888,00	95.731.791.888,00	44,42%
	JUMLAH BELANJA	1.065.475.091.000,00	1.244.235.957.807,13	178.760.866.807,13	16,78%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-138.485.239.000,00	-305.837.091.807,13	-167.351.852.807,13	120,84%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terjadi pada Belanja Tidak Langsung demikian juga Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar Rp. 58.541.197.334,13 atau naik sebesar 12,24% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 478.346.613.000,00 menjadi Rp. 536.887.810.334,13. Belanja Tidak Langsung yang mengalami pengurangan pada Belanja Pegawai, dan kenaikan terbesar pada Belanja Tidak Terduga sebesar 66,81%.

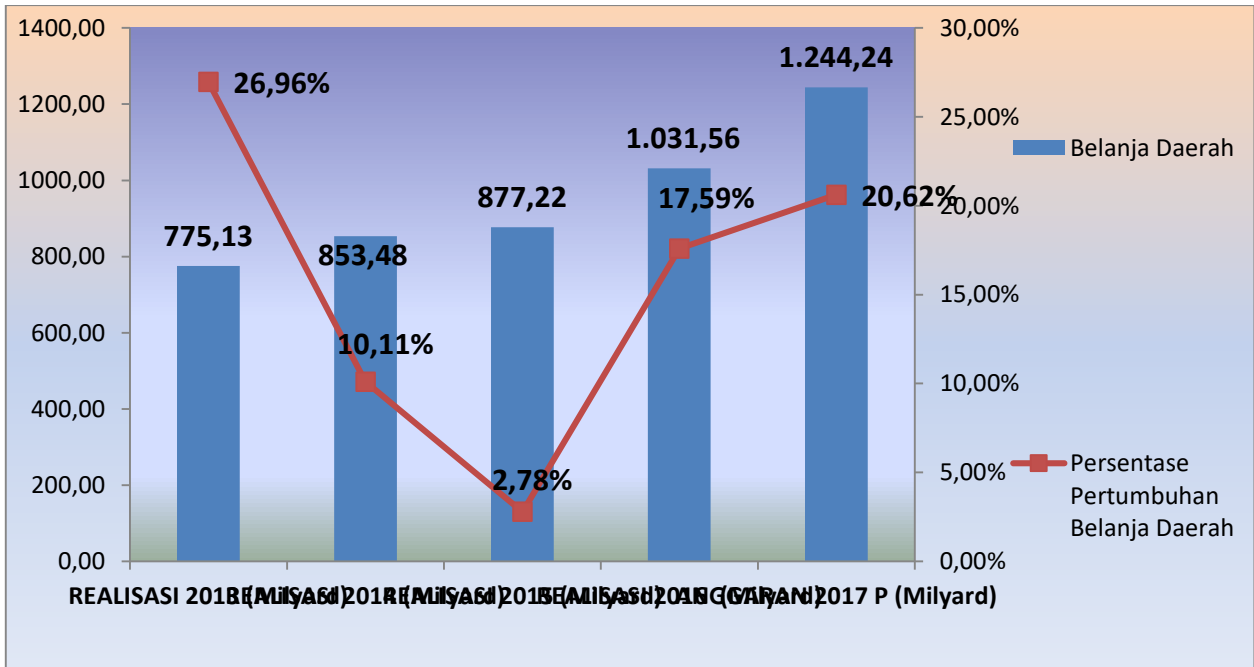


Belanja Langsung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 120.219.669.473,00 yang berarti kenaikannya mencapai 20,48% dari APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 587.128.478.000,00 menjadi Rp. 707.348.147.473,00. Kenaikan anggaran tersebut digunakan sebagai tambahan Belanja Program dan Kegiatan pada setiap SKPD sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian hasil prioritas pembangunan dan merealisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Tabel program prioritas yang akan didanai dalam APBD perubahan beserta target kinerjanya berdasarkan RPJMD, RKPD tahun 2017 dan Perubahan RKPD 2017 sebagai dasar perubahan anggaran, sebagai berikut.

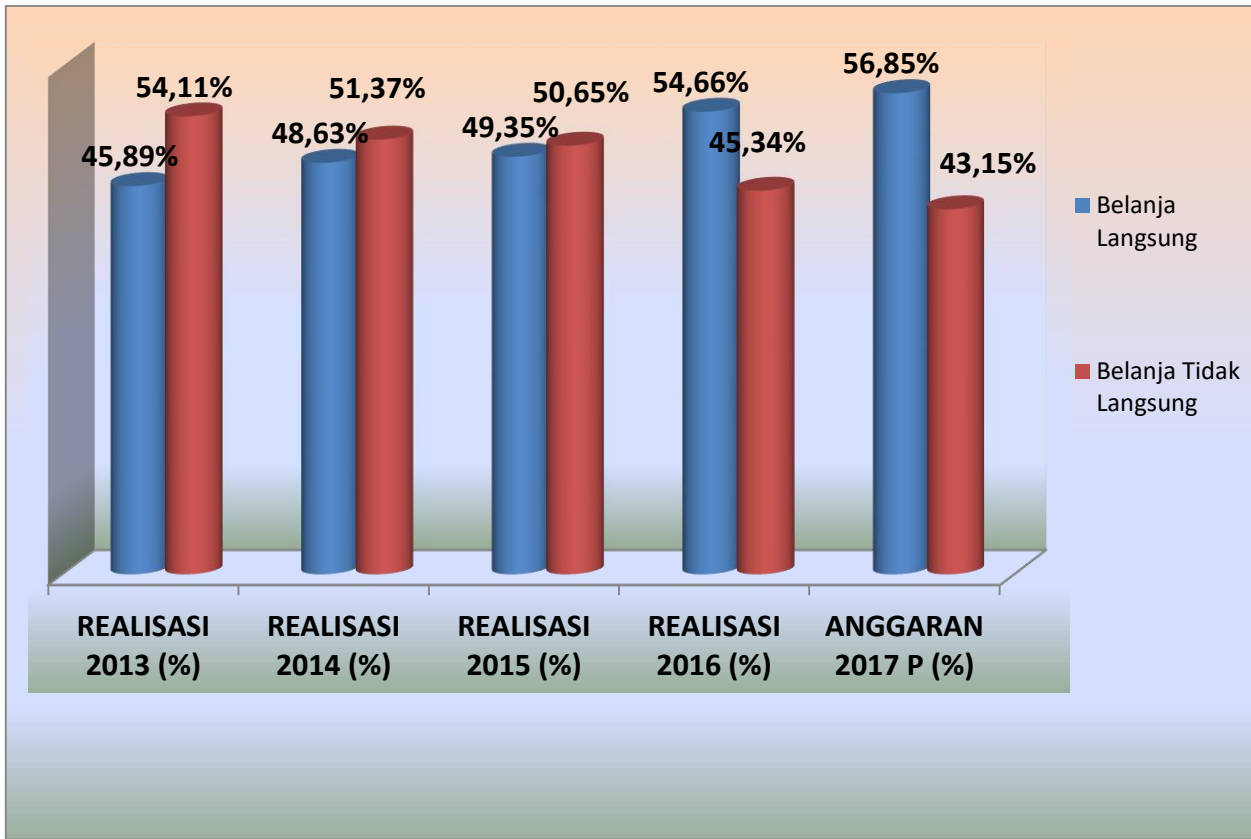
**Tabel. 2.9**  
**Program Prioritas RPJMD, RKPD 2017 dan Perubahan RKPD 2017**

NO	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH THN 2017 (RKPD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH THN 2017 (PERUBAHAN RKPD)
1	Meningkatnya Kuaitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kesehatan
3	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Ekonomi Masyarakat (iklim investasi, penguatan lembga ekonomi serta pemberdayaan masyarakat)	Peningkatan Ekonomi Masyarakat (iklim investasi, penguatan lembga ekonomi serta pemberdayaan masyarakat)
4	Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencanaan	Penurunan Angka Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan
5	Maningkatkan Kualitas Pelayanan dasar Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6	Meningkatknya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan infrastruktur kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya saing daerah	Peningkatan infrastruktur kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya saing daerah



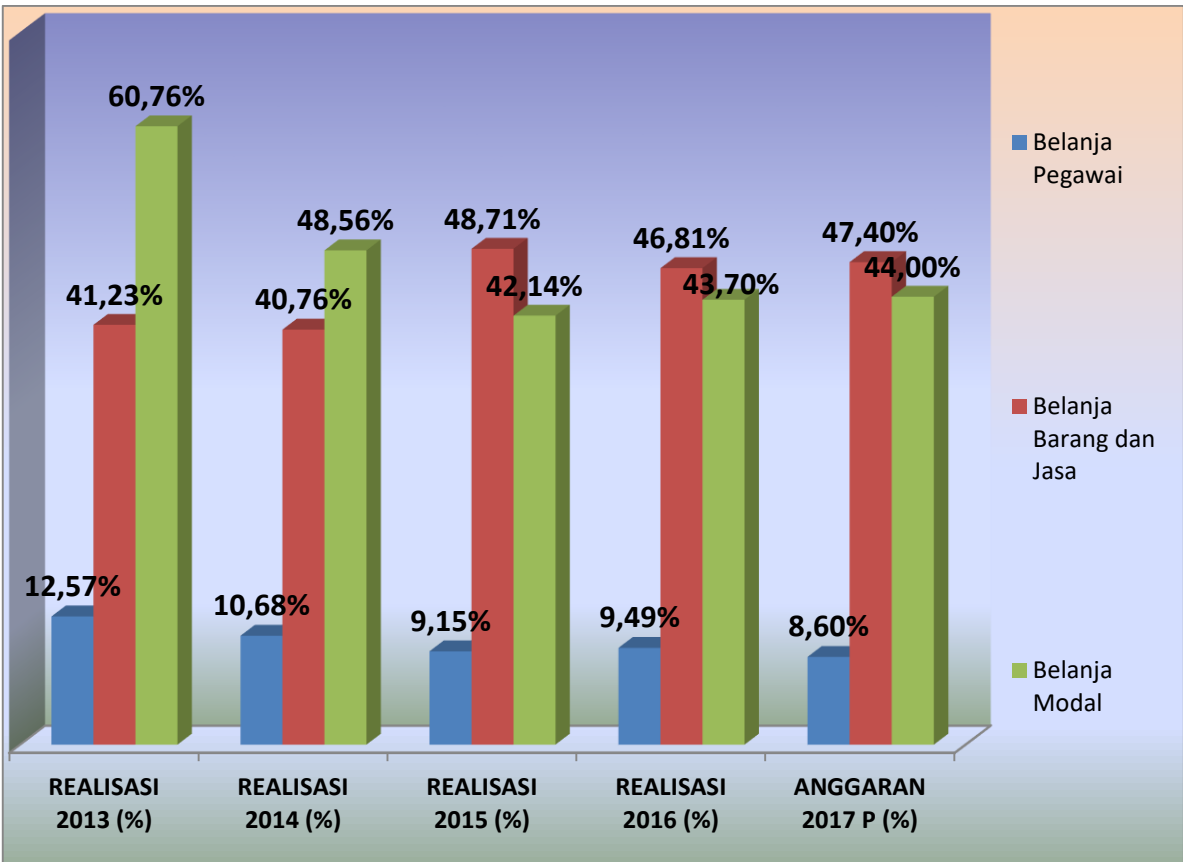
**Gambar 2.11**  
**Belanja Daerah dan Pertumbuhannya**

Tren belanja daerah Tahun 2017 dalam KUPA dan PPAS-P mengalami kenaikan yang signifikan dimana belanja daerah dialokasikan tumbuh 20,62%, pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut menunjukkan perencanaan anggaran yang konsisten dengan tahun pemantapan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai RPJMD 2014–2019.



**Gambar 2.12**  
**Komposisi Belanja Daerah**

Komposisi belanja daerah antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung juga menunjukkan tren yang semakin baik, dimana tahun 2017 setelah perubahan komposisinya Belanja Tidak Langsung 43,15% ini berarti Belanja Langsung lebih dari 50%, yang berarti belanja publik yang langsung ke masyarakat lebih besar.



Gambar 2.13  
Komposisi Belanja Langsung

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan, merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung “Transaksi Keuangan” guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, apabila terjadi defisit anggaran, maka ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari obyek Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan nomenklatur : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi Surplus Anggaran, maka pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagaimana Obyek Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan dengan nomenklatur : Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

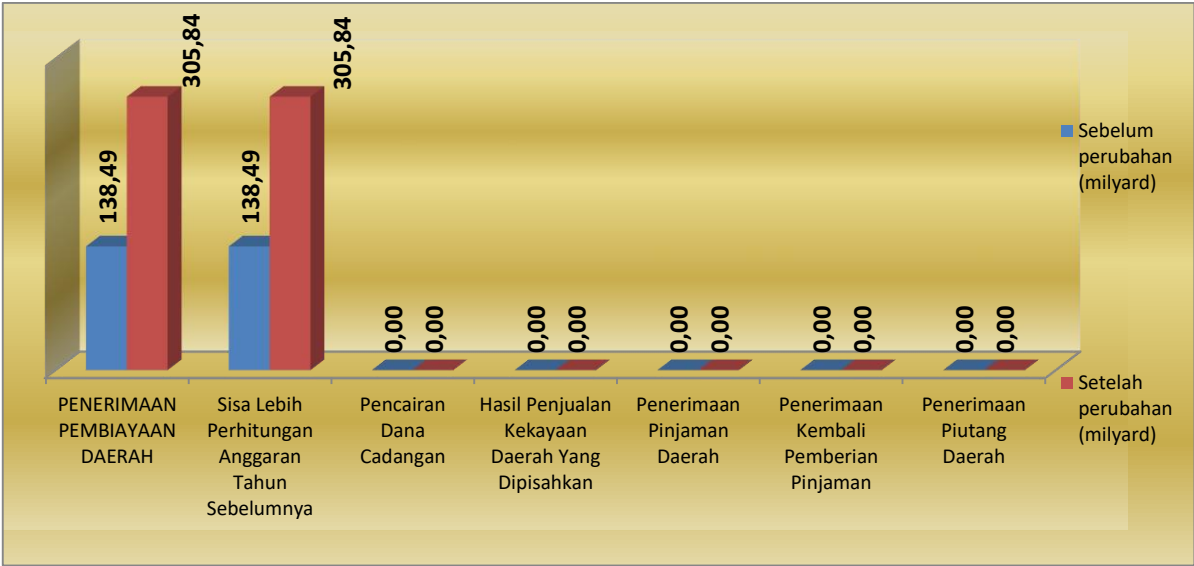
**Tabel. 2.10**  
**Pembiayaan dan Perubahan Pembiayaan**

KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	138.485.239.000,00	305.837.091.807,13	167.351.852.807,13	120,84%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.485.239.000,00	305.837.091.807,13	167.351.852.807,13	120,84%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAHPEMBIAYAAN NETO	138.485.239.000,00	305.837.091.807,13	167.351.852.807,13	120,84%
	SILPA	0.00	0.00	0.00	

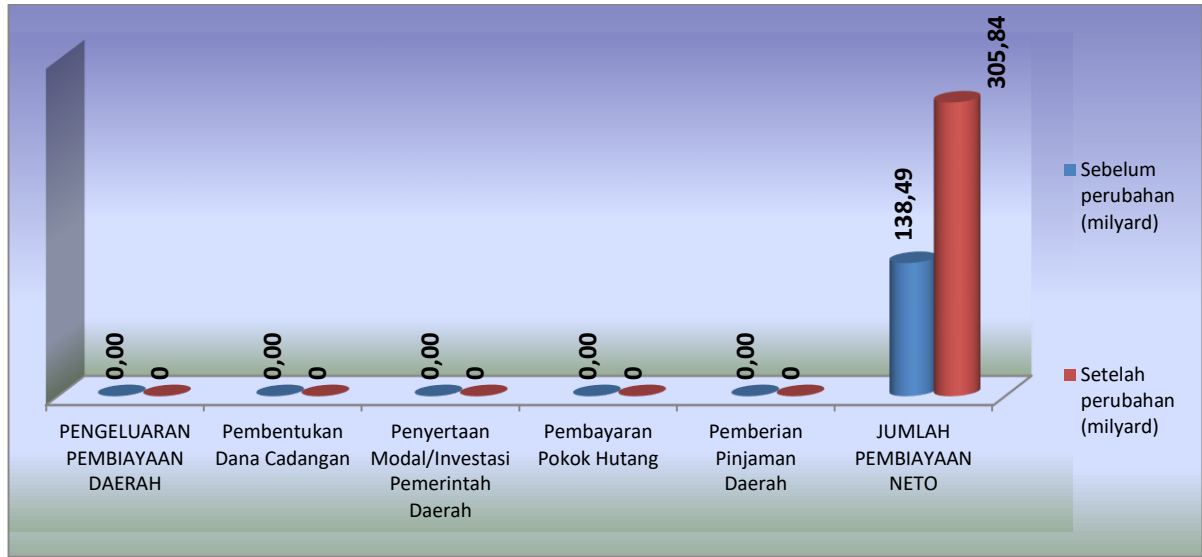
*Sumber : BPKAD Kota Madiun*

Untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan Keuangan Daerah yang tertuang dalam APBD beserta perubahannya, maka dari sisi Kebijakan Pembiayaan akan diarahkan untuk menutup defisit anggaran antara Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal serta pembayaran hutang. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, diarahkan untuk mendayagunakan sepenuhnya SiLPA tahun anggaran 2016 untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan yang dilakukan diupayakan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dan tidak mencari dana dari luar, seperti pinjaman atau yang lainnya.

Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2017 yang diperoleh dari SiLPA tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 138.485.239.000,00 setelah dilakukan perhitungan maka terdapat SiLPA Rp. 305.837.091.807,13 yang akan digunakan untuk menutup defisit, penyertaan modal dan membayar hutang.



**Gambar 2.13**  
**Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**



**Gambar 2.14**  
**Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan**

**2.5 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II**

Realisasi Anggaran pelaksanaan APBD tahun 2017 sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017**  
**Sampai Dengan 30 Juni 2017**

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	LEBIH/KURANG	
				%	Rp
1	2	3	4	5	6
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	159.324.617.000,00	94.910.598.273,90	59,57	64.414.018.726,10
1.1.1.	Pajak Daerah	55.000.000.000,00	30.029.622.657,37	54,6	24.970.377.342,63
1.1.2.	Retribusi Daerah	13.144.200.000,00	6.431.585.462,00	48,93	6.712.614.538,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	LEBIH/KURANG	
				%	Rp
1	2	3	4	5	6
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.093.398.000,00	13.320.249.415,39	110,14	-1.226.851.415,39
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	79.087.019.000,00	45.129.140.739,14	57,06	33.957.878.260,86
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>698.953.575.000,00</b>	<b>368.006.056.075,00</b>	<b>52,65</b>	<b>330.947.518.925,00</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	59.639.455.000,00	29.952.474.246,00	50,22	29.686.980.754,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	529.893.643.000,00	298.302.242.000,00	56,29	231.591.401.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	97.665.700.000,00	32.980.763.670,00	33,77	64.684.936.330,00
1.2.4.	Dana Bagi Hasil Cukai	11.754.777.000,00	6.770.576.159,00	57,6	4.984.200.841,00
1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>68.711.660.000,00</b>	<b>36.263.933.470,00</b>	<b>52,78</b>	<b>32.447.726.530,00</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.648.410.000,00	28.052.083.470,00	46,25	32.596.326.530,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	0,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	563.250.000,00	711.850.000,00	126,38	-148.600.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>926.989.852.000,00</b>	<b>499.180.587.818,90</b>	<b>53,85</b>	<b>427.809.264.181,10</b>
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>478.346.613.000,00</b>	<b>181.363.079.375,00</b>	<b>37,91</b>	<b>296.983.533.625,00</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	388.100.674.000,00	151.422.229.375,00	39,02	236.678.444.625,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0	0	0,00	0
2.1.3.	Belanja Subsidi	0	0	0,00	0
2.1.4.	Belanja Hibah	7.076.082.000,00	434.850.000,00	6,15	6.641.232.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.276.980.000,00	1.290.000.000,00	24,45	3.986.980.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0,00	0
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	627.851.000,00	0	0	627.851.000,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	77.265.026.000,00	28.216.000.000,00	36,52	49.049.026.000,00
2.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>587.128.478.000,00</b>	<b>121.229.911.945,12</b>	<b>20,65</b>	<b>465.898.566.054,88</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	56.724.154.000,00	16.521.107.760,00	29,13	40.203.046.240,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.902.931.000,00	87.142.488.967,62	27,67	227.760.442.032,38
2.2.3.	Belanja Modal	215.501.393.000,00	17.566.315.217,50	8,15	197.935.077.782,50
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.065.475.091.000,00</b>	<b>302.592.991.320,12</b>	<b>28,40</b>	<b>762.882.099.679,88</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(138.485.239.000,00)</b>	<b>196.587.596.498,78</b>	<b>(141,96)</b>	<b>(335.072.835.498,78)</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>138.485.239.000,00</b>	<b>36.131.236,47</b>	<b>0,03</b>	<b>138.449.107.763,53</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138.485.239.000,00	36.131.236,47	0,03	138.449.107.763,53
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00	0
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0,00	0
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	LEBIH/KURANG	
				%	Rp
1	2	3	4	5	6
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0.00	0
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0.00	0
3.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0.00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0.00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0.00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0.00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>138.485.239.000,00</b>	<b>36.131.236,47</b>	<b>0,03</b>	<b>138.449.107.763,53</b>
3	<b>SiLPA Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>196.623.727.735,25</b>	<b>0.00</b>	<b>(196.623.727.735,25)</b>

**Tabel 2.12**  
**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017**

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1	2		3	4	5	6	7	(8) = (7/6)		(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
'1.01.01.02			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1	58%	58%	1,58	158%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99 kali	99 kali	99	48,05%	0%	99,48	100%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 paket	1	0	0%	1 paket	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit	1 Unit kendaraan Roda 4 dan 122 Unit kendaraan roda dua	1 Unit kendaraan Roda 4 dan 122 Unit kendaraan roda dua	1 Unit kendaraan Roda 4 dan 122 Unit kendaraan roda dua	24,97%	0%	127,25	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Lembaga	1 Dinas 3 UPTD	1 Dinas 3 UPTD	1 Dinas 3 UPTD	0	0%	1 Dinas 3 UPTD	100%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Paket	1 Paket	1	1	0	0%	1	100%



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	8	8	0,00%	0%	8	100%
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
1	1		<b>Pendidikan.</b>								
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional							
			Kegiatan Sertifikasi Guru	Jumlah Guru	300	300	300	39,65%	0%	300,40	100%
			Kegiatan Pelatihan SDM Guru PAUD di Kota Madiun	Jumlah Guru	100	100	100	100	100%	200	200%
			Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru Kelas	Jumlah Guru	100	100	100	78,06	78%	178,06	178%
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Lembaga	253	253	253	35,03%	0%	253,35	100%
			Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan OSN	Jumlah Orang	125	125	125	46,87%	0%	125,47	100%
			Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah	156	156	156	0	0%	156	100%
			Kegiatan Bantuan Pendidikan S1/S2/S3 PGSD	Jumlah Guru	65	65	65	0	0%	65	100%
			Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik	Jumlah Guru	1000	1000	1000	77,66%	0%	1000,78	100%
			Kegiatan Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Jumlah Guru	255	255	255	40,29%	0%	255,40	100%
			Kegiatan Workshop Kurikulum TK	Jumlah lembaga	97 lembaga	97 lembaga	97 lembaga	100%	100%	98	101%
			Kegiatan Penyelenggaraan TK Pembina	Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	40,15%	0%	1,40	140%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Manajemen Pelayan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan Evaluasi pelaporan berbasis TIK							
			Kegiatan Entri Data Peserta didik, PTK, dan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah lembaga	141 lembaga	141 lembaga	141 lembaga	0	0%	141 lembaga	100%
			Kegiatan operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)	Jumlah lembaga	49 lembaga	49 lembaga	49 lembaga	39,77%	0%	49,40	101%
			Kegiatan Asistensi pelatihan WEB/ Updating data pendidikan	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	0	0%	5 dokumen	100%
			Kegiatan Operasional BOS TK Kota	Jumlah Lembaga	142 lembaga	142 lembaga	142 lembaga	11%	0%	142,11	100%
			Kegiatan pembinaan Komite Sekolah dalam pengelolaan sumber daya pendidikan	Jumlah orang	316 orang	316 orang	316 orang	0	0%	316 orang	100%
			Kegiatan pengembangan dan Implementasi informasi pendidikan berbasis IT	Jumlah Lembaga	142 lembaga	142 lembaga	142 lembaga	0	0%	142 lembaga	100%
			Kegiatan operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSA MADIN) Bk Prov	Jumlah Lembaga	49 lembaga	49 lembaga	49 lembaga	18,42%	0%	49,18	100%
			Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi murni SD/ SMP							
			Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Lembaga	18 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	27,08%	2%	18,27	102%
			Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo	Jumlah Lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	22,87%	1%	20,23	101%
			Peningkatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Agama Islam (SMP, SMA/SMK)	Jumlah Lembaga	80 orang	80 orang	80 orang	100,00%	100%	81	101%
			Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf							
			Kegiatan Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Lembaga	80 lembaga	80 lembaga	80 lembaga	0	0%	80 lembaga	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C	Jumlah Wajib Belajar	120	120	120	67,45%	1%	120,67	101%
			Kegiatan Akreditasi Pendidikan Non Formal dan PAUD	Jumlah lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	53,19%	2%	30,53	102%
			Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Orang	90 orang	90 orang	90 orang	100%	1%	31	34%
			Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Perpustakaan Sekolah Secara Periodik	Jumlah Paket	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	11,07%	0%	40,11	100%
			Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina Pramuka	Jumlah Lembaga	135 lembaga	135 lembaga	135 lembaga	0	0%	135 lembaga	100%
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD							
			Kegiatan Pagelaran HAN Tingkat Kota	Jumlah Paket	2000 siswa	2000 siswa	2000 siswa	19,00%	19%	2000,19	100%
			Kegiatan Pagelaran Tari Masal	Jumlah Paket	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa	0,00%	34%	1000 siswa	100%
			Kegiatan Hari Anak Nasional	Jumlah Siswa	65 siswa	65 siswa	65 siswa	100,00%	100%	66	102%
			Kegiatan Bantuan BOP PAUD	Jumlah Lembaga	75 lembaga	75 lembaga	75 lembaga	36,50%	37%	75,37	100%
			Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Jumlah Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	100%	2	200%
			Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	Jumlah Gugus	20 gugus	20 gugus	20 gugus	0,00%	0%	20	100%
			Kegiatan Workshop Kurikulum TK	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Penyelenggaraan TK pembina	Jumlah Lembaga							
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK							

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Entri Data Peserta Didik, PTK dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Asistensi Pelatihan Web/updating data pendidikan	Jumlah Dokumen							
			Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	Jumlah Orang							
			Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	Jumlah Lembaga							
			Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP							
			Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo	Jumlah Lembaga							
			Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga	19 lembaga	19 lembaga	19 lembaga	23,56%	1%	19,24	101%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	33,18%	33%	1,33	133%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	33,13%	33%	1,33	133%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	39,97%	40%	1,40	140%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	50,76%	51%	1,51	151%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	24,03%	24%	1,24	124%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	44,36%	44%	1,44	144%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	32,78%	33%	1,33	133%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	16,57%	17%	1,17	117%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	37,05%	37%	1,37	137%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	36,04%	36%	1,36	136%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	55,13%	55%	1,55	155%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	38,61%	39%	1,39	139%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	3,68%	4%	1,04	104%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	44,07%	44%	1,44	144%
			Kegiatan Gerakan Disiplin Siswa	Jumlah Lembaga	262 lembaga	262 lembaga	262 lembaga	0	0%	262 lembaga	100%
			Kegiatan Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)	Jumlah Lembaga	260 lembaga	260 lembaga	260 lembaga	0	0%	260 lembaga	100%
			Kegiatan Pelaksanaan USBN Pendidikan Agama	Jumlah Lembaga	168 lembaga	168 lembaga	168 lembaga	0	41%	168 lembaga	100%
			Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus TK, SD	Jumlah Gugus	34 gugus	34 gugus	34 gugus	0	0%	34 gugus	100%
			Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP	Jumlah Siswa	90 siswa	90 siswa	90 siswa	0	14%	90 siswa	100%
			Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Sekolah	Jumlah Lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	0	0%	40 lembaga	100%
			Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kantin Kejujuran SD dan SMP	Jumlah Lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	0	79%	5 lembaga	100%
			Kegiatan Best Practise Pendidikan Karakter	Jumlah Lembaga	92 lembaga	92 lembaga	92 lembaga	0	0%	92 lembaga	100%
			Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	Jumlah Siswa	192 siswa	192 siswa	192 siswa	0	34%	192 siswa	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Komunitas Pembelajaran	Jumlah Peserta	240 peserta	240 peserta	240 peserta	0	0%	240 peserta	100%
			Kegiatan Penjaminan Mutu	Jumlah Lembaga	92 lembaga	92 lembaga	92 lembaga	0	0%	92 lembaga	100%
			Kegiatan KeBeasiswa Bakat dan Prestasi Siswa TK, SD, SMP, SMA.	Jumlah Lembaga			0				
			Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Bidang Kesenian	Jumlah Dokumen			0				
			Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah Lembaga	142 lembaga	142 lembaga	142 lembaga	0	36%	142 lembaga	100%
			Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional	Jumlah Lembaga	162 lembaga	162 lembaga	162 lembaga	0	63%	162 lembaga	100%
			Kegiatan Uji Coba Ujian Nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa	7500 siswa	7500 siswa	7500 siswa	0	95%	7500 siswa	100%
			Kegiatan Olimpiade Sains SD, SMP	Jumlah Siswa	248 siswa	248 siswa	248 siswa	0	83%	248 siswa	100%
			Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP SMA/SMK Tahap I	Kota Madiun	200 orang	200 orang	200 orang	0	0%	200 orang	100%
			Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pendidikan MGMP dan KKG	Jumlah Lembaga	97 lembaga	97 lembaga	97 lembaga	0	0%	97 lembaga	100%
			Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional	Jumlah Siswa	117 siswa	117 siswa	117 siswa	0	36%	117 siswa	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	0	41%	1 lembaga	100%
			Kegiatan Lomba Siswa Teladan Tingkat SD dan SMP	Jumlah Siswa	184 siswa	184 siswa	184 siswa	0	0%	184 siswa	100%
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLB	Jumlah Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	0	0%	1 lembaga	100%
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)	Jumlah Lembaga	9 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	0	0%	9 lembaga	100%
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	Jumlah Lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	0	0%	8 lembaga	100%

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			RUTIN								
1	1		Rutin								
'1.02.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat kelengkapan administrasi perkantoran	100	100	100	68	68,00	68	68
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	68	68,00	68	68
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	100	100	100	100	100,00	100	100
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang milik daerah yang layak dipakai	100	100	100	79	79,00	79	79
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100	100	100	100	100,00	100	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	100	100	100	93	93,00	93	93
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100	100	100	65	65,00	65	65

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	60	60,00	60	60
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Prosentase rehab gedung yang dilaksanakan	100	100	100	60	60,00	60	60
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	11 dokumen		11 dokumen	7 dokumen	63,64	7 dokumen	63,64
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	7 dokumen	63,64	7 dokumen	63,64
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	2		Kesehatan.								
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase upaya kesehatan masyarakat yang mencapai target	65,00		55	22,22	40,40	22,22	34,19
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase kunjungan ibu hamil paripurna	100,00		100	41,1	41,10	41,1	41,10
			Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resti Gizi tertangani	100,00	100	100	100	100,00	100	100,00
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan kunjungan balita paripurna	98,00	97,87	96	41,2	42,92	41,2	42,04
			Kegiatan Penanggulangan masalah gizi pada balita.	Prosentase Balita Gizi Kurang	10,50	10,53	11,52	8,6	74,65	8,6	81,90
			Kegiatan Upaya Kesehatan Reproduksi	Angka kehamilan pada usia remaja (15-19 th)	21/1000	8,48/1.000	25/1000	15/1000	140,00	15/1000	128,57
			Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	Prosentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan	60,00	55	55	60,45	109,91	60,45	100,75
			Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Prosentase TTU dan TPM sehat	85,00	74,67	83	55	66,27	55	64,71
			Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Prosentase kelurahan ber-Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	66,67		22,22	22,22	100,00	22,22	33,33



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman	Prosentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	85	75,77	82	68	82,93	68	80,00
			Kegiatan Pengembangan media Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah jenis media promosi kesehatan yang diadakan	14 jenis	14 jenis	14 jenis	8 jenis	57,14	8 jenis	57,14
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah sehat	89,57		83,23	83,23	100	83,23	92,92
			Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase kelurahan yang mendapatkan promosi kedehatan minimal 18 kali	80,00		70	66,67	95,24	66,67	83,34
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	75,00	62,96	67	66,67	99,51	66,67	88,89
			Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV)	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu			42	40,86	97,29	40,86	0,00
			Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita	Prosentase terbentuknya Posyandu PURI	100%	95,19	96	95,19	99,16	95,19	9519,00
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91,36		90,67	59,7	65,84	59,7	65,35
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	92		90	37,5	41,67	37,5	40,76
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	93		81	67,13	82,88	67,13	72,18
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91		89	66,67	74,91	66,67	73,26
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91,5		89,5	86,09	96,19	86,09	94,09
			Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	94,1		93,76	64	68,26	64	68,01
			Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	80		78,9	64,7	82,00	64,7	80,88

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan(DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	84		82	41,66	50,80	41,66	49,60
			Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	84		75	58,33	77,77	58,33	69,44
			Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	70		80	54,82	68,53	54,82	78,31
			Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oro-Oro Ombo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	95		89	91,7	103,03	91,7	96,53
			Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)	Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	95		85	66,6	78,35	66,6	70,11
			Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan jaminan persalinan			2739 bumil	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan			81,74	0	0,00	0	0,00
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah Kasus pada KLB	66%		54	97,14	179,89	97,14	14782,17
			Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	<50/100.000 penduduk	152,04/100.000 penduduk	100/100.000 penduduk	19,93/100.000 penduduk	180,07	19,93/100.000 penduduk	160,14
			Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	Prosentase Case Notification Rate pada TB	5,00	23	3	-3	-100,00	-3	-60,00
			Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	Prosentase RFT Rate		100	100	100	100,00	100	0,00
			Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Prosentase penemuan kasus HIV	4,00	2,59	3	8,35	278,33	8,35	208,75
			Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)	Prosentase cakupan penyakit menular langsung yang ditemukan dan ditangani	100,00	119,60	100	53,77	53,77	53,77	53,77
			Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Prosentase cakupan penyakit bersumber binatang yang ditemukan dan ditangani	100,00	100	100	100	100,00	100	100,00
			Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Prosentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam	100,00	100	100	100	100,00	100	100,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	Persentase Imunisasi TT pada wanita Usia Subur	90,00		70	34	48,57	34	37,78
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Prosentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100		92	81,48	88,57	81,48	81,48
			Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Prosentase jumlah penduduk usia > 20 th di skrining PTM	100,00		80	42,34	52,93	42,34	42,34
			Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	Prosentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100,00		40	56	140,00	56	56,00
			Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100,00	100	100	94	94,00	94	94,00
			Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100,00		50	50	100,00	50	50,00
			Kegiatan Pengelolaan Alat Kesehatan	Prosentase alat kesehatan yang terkalibrasi	100,00		90	64	71,11	64	64,00
			Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan.	Prosentase terpantaunya pengelolaan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	100	94	50	32	64,00	32	32,00
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun sesuai ketentuan	6 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50,00	3 dokumen	50,00
			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan yang disusun	2 dokumen		2 dokumen	1 dokumen	50,00	1 dokumen	50,00
			Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Prosentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	100,00	100	70	19,16	27,37	19,16	19,16
			Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang profesional/berkompeten meningkatkan dan kelancaran penilaian angka kredit tenaga kesehatan	532 org	440 orang	400 orang	317 orang	79,25	317 orang	59,59
			Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai ijin	550 org	455 org	455 org	293	64,40	293	53,27

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	200	140	155	85 sarana	54,84	85 sarana	42,50
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelun	Jumlah gedung yang direhabilitasi			1 buah	0	0,00	0	0,00
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pilangbango	Jumlah gedung yang direhabilitasi			1 buah	0	0,00	0	0,00
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rejomulyo	Jumlah gedung yang direhabilitasi			1 buah	0	0,00	0	0,00
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Klegen	Jumlah gedung yang direhabilitasi			1 buah	0	0,00	0	0,00
			Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Demangan	Jumlah gedung yang direhabilitasi			1 buah	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Prosentase pengelolaan obat sesuai standar	100,0	94,52	100	43,29	43,29	43,29	43,29
			Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan	Prosentase penyediaan tenaga P3K sesuai kebutuhan		100	100	100	100	100	0,00
			Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Prosentase puskesmas dan klinik terakreditasi	85	30	40	42	105	42	49,41
			Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan rujukan yang dibina	8 RS/RSK	8 RS/RSK	8 RS/RSK	8 RS/RSK	100	8 RS/RSK	100,00
			Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100	1 orang	100,00
			Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus	Prosentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	100,00	74	96	66	68,75	66	66,00
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan pada Gudang Perbekalan Kesehatan	Persentase obat kadaluarsa	<1%		<1%	32,13	-3013,00	32,13	-3013,00
			Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	90,00		80		0,00	0	0,00
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00		80	100	125,00	100	100,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00		80	80	100,00	80	80,00
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00		80	100	125,00	100	100,00
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00		80	82,91	103,64	82,91	82,91
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00		80	85	106,25	85	85,00
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo.	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00		80	100	125,00	100	100,00
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	8		<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</b>								
			Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peserta KB aktif	79,5		78,5	74,6	95,03	74,6	93,84
			Kegiatan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi			1 kelurahan	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan			1200 PUS, IUD 50, Implant 40, MOW 80,MOP 30	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah media informasi			8 kali kegiatan	4 keg	50,00	4 keg	0,00
			Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dan Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan jumlah peserta			2 kali,210 peserta	2 kali, 210 peserta	100,00	2 kali, 210 peserta	0,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah pertemuan, penyusunan profil, penilaian lapangan dan jumlah peserta			5 kali, 190 orang	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Jumlah penyuluh KB yang DUPAKnya dinilai			22 orang	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi	Jumlah pemeriksaan papsmear, kasus kompilasi berat KB MKPJ, kasus kegagalan KN MKJP dan pertemuan			2 pertemuan, 160 peserta, 4 ko,plikasi dan 6 kegagalan MKIP	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)	Jumlah pertemuan dan pemeliharaan balai PKP dan kampung KB			53 pertemuan dan 3 balai PKB	2 balai, 3 pertemuan	66,67	2 balai, 3 pertemuan	0,00
			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga	Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB	Jumlah pertemuan profil dan jumlah peserta			16 kali, 340 peserta	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS, IMP dan Keluarga Harmonis	Jumlah lomba yang dilaksanakan			6 lomba	4	66,67	4	0,00
			Kegiatan Pembinaan dan Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan			4 kali	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS	Jumlah pameran yang diikuti			2 kali,210 peserta	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Kelompok Keluarga Sejahtera	Jumlah keluarga dan sektap pusyan gatra			90 keluarga dan 1 sektap	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pembinaan Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK), Sub.PPKBK dan Keluarga Kecil Bahagia dan Kesejahteraan (KKBS)-RT	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan			4 kali	2 kali	100,00	2 kali	0,00
			Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan	Jumlah rakor yang dilaksanakan dan dokumen pandataan			1 dokumen	0	0,00	0	0,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS	Jumlah dokumen laporan SPM			1 dokumen	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Orientasi dan Pembinaan Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Jumlah peserta pembinaan			300 orang	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			27 kali	8 kali	25,81	8 kali	0,00
			Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta			17 kali pertemuan, 1020 peserta	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Sosialisasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah pertemuan dan peserta			2 kegiatan	0	0,00	0	0,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			RUTIN								
1	1		Rutin								
1	2	10202	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%				
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	258	102	52	52	100%	154	59,69%
1	2	10202	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%				

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	25	16	3	3	100%	19	76%
1	2	10202	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%				
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	60	24	12	7	58,33%	31	51,67%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	2		Kesehatan.								
1	2	10202	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	94,44%	100%				
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	Jenis barang dan jasa yang disediakan	212	83	43	38	88,37%	121	57,08%
1	2	10202	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		95%	82,89%	86,74%				
			Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	113	83	15	9	60%	92	81,42%

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			RUTIN								
1	1		Rutin								
'1.03.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100	100	100	43	0,43	143	1,43
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik,Perangko, Materai, Surat Kabar,Foto copy dll)	24	10	8	4	0,5	4	0,166666667
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	197	30	70	20	0,285714286	50	0,253807107
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	1	200	2
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	4	4	4	2	0,5	6	1,5
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	53	53	53	18	0,339622642	71	1,339622642
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	12	3	11	8	0,727272727	11	0,916666667
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100	100	100	75	0,75	175	1,75
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	10	10	15	7	0,466666667	17	1,7
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.								
			Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pem buangan air tidak tersumbat	90	100	89,5	89,5	1	189,5	2,105555556

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah daerah bebas banjir	7,5	1,5	1,5	0	0	1,5	0,2
			Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	Jumlah daerah bebas banjir	101	2	2	0	0	2	0,01980198
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah daerah bebas banjir	3	3	3	3	1	6	2
			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	Jumlah Dokumen	22	1	1	1	1	2	0,090909091
			Program Pengendalian Banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir	100	100	100	0	0	100	1
			Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	90	90	90	60	0,666666667	150	1,666666667
			Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	1	1	1	0	0	1	1
			Kegiatan DED Pembangunan Daerah Tangkapan Air Pengendali Banjir Sumber Umis	Dokumen DED	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	Jumlah daerah bebas banjir	15	6	5	20	4	26	1,733333333
			Kegiatan DED Levelling Pompa Pandan	Dokumen DED	1	0	1	0	0	0	0
			Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	100	0	100		0	0	0
			Kegiatan Penataan Lapangan Olah Raga.	Jumlah Lokasi Lapangan Olah Raga	4	0	3	0	0	0	0
			Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	398	350	60	30	0,5	380	0,954773869
			Kegiatan Pembangunan Pujasera Sumber Umis (DED)	Jumlah Gedung	1	0	1	0	0	0	0

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum (WorkShop)	Jumlah Gedung	1	1	1	1	1	2	2
			Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan (Graha Krida Praja, Wisma Haji dan Stadion Wilis)	Jumlah Gedung	4	3	4	2	0,5	5	1,25
			Kegiatan Pembangunan Embung Lanjutan	Jumlah pekerjaan	3	0	3	0	0	0	0
			Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah.	23	0	23	19	0,826086957	19	0,826086957
			Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Dinas Kesehatan (DED)	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	0	3	0	0	0	0
			Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	Jumlah gedung instalasi farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Pembangunan Paviliun Rumah Sakit (perencanaan dan MK)	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan paviliun rumah sakit yang disusun dan jumlah lahan pembangunan paviliun rumah sakit yang diurug dan dipadatkan	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran ( Garasi Damkar Satpol PP)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana / korban bencana ( Pengadaan Hydran )	1	0	1	1	1	1	1
			Kegiatan Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Review DED Pasar Bunga)	Jumlah Pasar yang dikembangkan	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Pembangunan Puskesmas Manguharjo	Jumlah paket rehab puskesmas yang dilaksanakan	7	0	7	0	0	0	0
			Kegiatan Pembangunan Gedung Loundry Rumah Sakit	Jumlah gedung loundry rumah sakit yang dibangun	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhab	1	0	1	0	0	0	0
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik	93	92,41	92,5	92,5	1	184,91	1,98827957

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembangunan Jalan Inspeksi	Panjang jalan yang dibangun							
			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen DED	9	0	2	1	0,5	1	0,11111111
			Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yng dibangun	12,5	0	2,5	0	0	0	0
			Kegiatan Survey dan Pengukuran.	Tersedianya dokumen usulan kegiatan	1	0	1	1	1	1	1
			Kegiatan Pembangunan Jalan.	Jumlah lokasi	12	5	6	0	0	5	0,41666667
			Kegiatan Pembangunan Jembatan.	Jumlah jembatan yang dikerjakan	10	3	1	1	1	4	0,4
			Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah jalan yang dibangun	15	0	15	0	0	0	0
			Kegiatan Pembangunan Pelengkap jalan.	Jumlah lokasi yang dibangun	79	13	13	0	0	13	0,164556962
			Kegiatan Monitoring Teknis	Jumlah dokumen	20	0	1	1	1	1	0,05
			Kegiatan Inspeksi Jalan	Jumlah dokumen	5	1	1	1	1	2	0,4
			Kegiatan Inspeksi Jembatan	Jumlah dokumen	5	1	1	1	1	2	0,4
			Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan Jembatan	Jumlah sistem	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen	3	0	1	0	0	0	0
			Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	400.000	369.500	395.000	395.000	1	764.500	1,91125
			Kegiatan Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen	4	0	1	1	1	1	0,25
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	Jumlah lokasi	41	0	11	0	0	0	0
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	Jumlah lokasi	85	0	25	0	0	0	0
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	Jumlah lokasi	88	0	28	0	0	0	0

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	jumlah lokasi	70	0	20	0	0	0	0
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	Jumlah lokasi	1	1	1	1	1	2	2
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	Jumlah lokasi	1	1	1	1	1	2	2
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	Jumlah lokasi	1	1	1	1	1	2	2
			Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road.	Jumlah lokasi	1	0	1	1	1	1	1
			Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan	5	2	1	1	1	3	0,6
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah paket pekerjaan	1	0	1	1	1	1	1
			Kegiatan Bimbingan Teknis Kebinamargaan	Jumlah bimtek	1	0	1	0	0	0	0
			Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen	3	0	1	1	1	1	0,33333333
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	1	200	2
			Kegiatan Pendataan IMB	Jumlah data bangunan yang belum ber IMB	3	2	2	0	0	2	0,66666667
			Kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Tanah	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsolidasi	1	1	1	0	0	1	1
			Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yg diperdakan	100	100	100	65	0,65	165	1,65
			Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase Surat Teguran yg diterbitkan	100	100	100	40	0,4	140	1,4
			Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah Dokumen SKRK	50	0	50	40	0,8	40	0,8
			Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	250	0	250	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			RUTIN								
1	1		Rutin								
'1.04.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	75 jenis	75 jenis	75 jenis	40 jenis	53,33%	75 jenis	100%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	40 kali	40 kali	40 kali	20 kali	50%	40 kali	100%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	13 unit	4 unit	4 unit	2 unit	50%	4 unit	30,76%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang rutin di maintain	45 unit		32 unit	20 unit	62,50%	20 unit	44,44%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	10 dok	10 dok	10 dok	6 dok	60%	6 dok	60%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.								
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah layak huni	99,42%	98,37%	99,40%				
			Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan (DAK)	Terwujudnya perumahan yang sehat	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
			Sosialisasi Pembangunan MCK dan Penyusunan PEDUM, JUKLAK PMDPK	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 peserta	-	300 peserta	-	0%	-	0%
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								
			Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun	jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	100%
			Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU	jumlah titik	350 titik	327 titik	335 titik	-	0%	327	93,43%
			Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran	jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	100%
			Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	jumlah lampu hemat energi	216 buah	80 buah	66 buah	89	134,85%	155	71,76%
			Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau	jumlah lokasi	4 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	3 lokasi	75%	4 lokasi	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	jumlah lokasi	6 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	6 lokasi	100%
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU	jumlah kendaraan operasional	10 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	4 unit	40%
			Kegiatan Penyusunan Raperda Pengelolaan RTH	Jumlah Dokumen	1 dok	-	1 dokumen	-	0%	-	0%
			Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	3 jenis	-	3 jenis	1 jenis	33,33%	1 jenis	33,33%
			Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih).	Jumlah Pekerja	72 orang	55 orang	57 orang	57 orang	100%	57 orang	79,16%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan..	Tanaman yang dirawat	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan lampu	4502 titik	3750 titik	4017 titik	4017 titik	100%	4017 titik	89,22%
			Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	Pemeliharaan TMP	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.	Jumlah Lokasi Pemakaman	36 lokasi	12 lokasi	8 lokasi	5 lokasi	62,50%	17 lokasi	47,22%
			Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras	Jumlah Lokasi Pemakaman	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun	Jumlah lokasi pemeliharaan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	100%
			Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	Luas Kawasan Hutan Kota	2 ha	2 ha	2 ha	2 ha	100%	2 ha	100%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	4		Pertanahan.								
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah							
			Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	100%
			Kegiatan Fasilitasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	jumlah fasilitasi ijin lokasi dan IPPT	6 kali	6 kali	6 kali	4 kali	25%	4 kali	25%
			Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan	Jumlah Sosialisasi	1 kali	1 kali	1 kali	-	0%	-	0%



1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
							Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
								(%)		(%)
1	2		3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			RUTIN							
1	1		Rutin							
'1.05.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	93,36	100%	67,5	44	283,33
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	14	200
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	36 kali	16 kali	40 kali	14 kali	30	83,33
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%					
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	0	1 gedung	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	100	20 unit	200
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	4 jenis	4 jenis	4 jenis	50	6 jenis	150
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur						
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	80 orang	73	72	131,94	168	210

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan/Pelaporan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	10 dokumen	200
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
1	5		<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.</b>								
			Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk							
			Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Yang Diikuti	39 orang	0	39 orang	40 orang	102,56	40 orang	102,56
			Kegiatan Pelatihan Outbond	Jumlah Peserta Pelatihan Outbond	25 orang	30 orang	25 orang	96 orang	384	126 orang	504
			Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	72 orang	2052 orang	72 orang	1652 orang	2294,44	3704 orang	5144,44
			Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	25 orang	25 orang	24 orang			25 orang	100
			Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Perhari							
			Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Pelanggaran K3 Yang terselesaikan	1430 pelanggaran	1739 pelanggaran	1400 pelanggaran				
			Kegiatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Pelanggar Perda di Daerah dan Persamaan Persepsi ke Luar Daerah	1288 pelanggaran	1080 pelanggaran	1198 pelanggaran	490 pelanggaran	40,90	1570 pelanggaran	121,89
			Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi	150 orang	630 orang	180 orang	100 orang		630 orang	420

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	Jumlah Patroli per Hari	6 kali per hari	6 kali per hari	6 kali per hari	6 kali per hari	100	12 kali	100
			Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Jumlah Giat Pemerintah Pengamanan	120 kali	304 kali	120 kali	341 kali	284,17	645 kali	537,50
			Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota							
			Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peyeleaian Pelanggaran Perda dan Perwal	100%	98,36%	100%				
			Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							
			Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana ( Kebakaran )			150 orang				
			Kegiatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (DAMKAR), Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta yang mengikuti Apel Siaga HUT Damkar, Rakornas, dan Rakorda Penanggulangan Bencana			67 orang				
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana / korban bencana ( Pengadaan Hydran )			1 paket				
			Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota							
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayakan Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	801 orang	801 orang	801 orang	771 orang	96,25	1572 orang	196,25
			Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pos Kamling	830 kamling	812 kamling	815 kamling			812 kamling	97,83

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Kapasitas anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Anggota Satlinmas			1300 orang				
			Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	Jumlah Personil Satlinmas Yang Ikut Dalam Upacara Hari-Hari Besar Nasional	868 orang	536 orang	868 orang	30 orang	3,46	566 orang	65,21

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
'1.05.02			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	11 unit	15 unit	11 unit	6 unit	0,55	21	1,91
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 kali	35 kali	10 kali	13 kali	1,30	48	4,80
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0,00	1	1,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	13 unit	9 unit	10 unit	5 unit	0,50	14	1,08
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang dipelihara	7 unit	7 unit	7 unit	4 unit	0,57	11	1,57
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket		1	1,00
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan yang disusun	7 dok	7 dok	7 dok	5 dok	0,71	12	1,71
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	5		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.								
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam							
			Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	1095 shift	1095 shift	1095 shift	364 shift	0,33	1459	1,33
			Kegiatan Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	Jumlah Peserta Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	450 orang	150 orang	450 orang	720 orang	1,60	870	1,93
			Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	300 orang	0 orang	300 orang	1639 orang	5,46	1639	5,46
			Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	1 dok	2 dok	1 dok	0 dok	0,00	2	2,00
			Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Latihan SAR	150 orang	450 orang	150 orang	150 orang	1,00	600	4,00

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
							Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
								(%)		(%)
1	2		3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN							
0	0		Rutin							
'1.06.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%			
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	100%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	205 kali	100 kali	115 kali	6%	107	52,20%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%			
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	22 unit	22 unit	22 unit	9,09%	2	9,09%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	5 paket	5 paket	5 paket	60%	3	60%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%			

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang harus dipenuhi	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	57,14%	4	57,14%
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
1	6		<b>Sosial.</b>								
			Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	8	8	8				
			Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Bimbingan motivasi kepada keluarga miskin	375 orang	0	75	0	0	0	0
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Bagi PMKS	Bimbingan motivasi pelayanan dan bantuan sosial	1600 orang	320	320	0	0	320	40%
			Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan/Keluarganya, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah sarasehan perintis kemerdekaan	400 orang	75	75	0	0	75	18,75
			Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial..	berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKS	1117 orang	1117 orang	1117 orang	1117	100	1117	100
			Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan PSM	Jumlah pemberdayaan kelembagaan masyarakat bidang sosial	135 orang	135 orang	135 orang	0	0	135	100
			Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah kesiap siagaan penanganan bencana	23 orang	23 orang	23 orang	19	82,61	19	82,61
			Kegiatan Pembinaan Pelatihan Karang Taruna	Bimbingan kewirausahaan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) karang taruna dan motivasi Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	27 kelurahan	27 kelurahan	27 kelurahan	27 kelurahan	100%	27 kelurahan	100%
			Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah Kesejahteraan Lanjut Usia dan tertib administrasi Karang Werda dan lanjut usia	27 kelurahan	27 kelurahan	27 kelurahan	27 kelurahan	100%	27 kelurahan	100%
			Kegiatan Pembinaan WKSBM	Jumlah WKSBM yang peduli pada peranan PSKS	27 kelurahan	27 kelurahan	27 kelurahan	0	0	0	0

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Lomba Karang Werda Tingkat Kota dan Provinsi	prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial	27 kelurahan	27 kelurahan	27 kelurahan	0	0	0	0
			Kegiatan Pembinaan Pelatihan Pantu Asuhan	Jumlah potensi pantu asuhan	10 pantu	10 pantu	10 pantu	10 pantu	100%	10 pantu	100%
			Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	Tersedianya data fakir miskin kota madiun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	0
			Kegiatan Sunat Masal	Jumlah Peserta Sunat Masal	100 anak	-	100 anak	0	0	0	0
			Kegiatan Nikah Masal	Jumlah Peserta Nikah Masal	20 pasang	-	20 pasang	0	0	0	0
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.								
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan							
			Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Kelurahan Kota dan Provinsi kegiatan Evaluasi	Tk. Kota = 6 kel, Tk. Prov = 1 kel		Tk. Kota = 6 kel, Tk. Prov = 1 kel	0	0	0	0
			Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS	Jumlah Kelurahan kegiatan Evaluasi	1 kelurahan		1 kelurahan	0	0	0	0
			Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah peserta kegiatan Hari Kesatuan gerak PKK dan Hari Ibu	600 orang		600 orang	300	50	300	50
			Kegiatan Pelatihan Produk Daur Ulang Sampah (PPSP)	Jumlah peserta kegiatan pelatihan PPSP	100 orang		100 orang	100	100	100	100
			Kegiatan Pelatihan dan Pameran Karya Perempuan di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan Pelatihan	120 orang, 4 kegiatan		120 orang, 4 kegiatan	120 orang, 3 kegiatan	75	120 orang, 3 kegiatan	75
			Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Pelatihan	6 kali		6 kali	1 kali	16,67	1 kali	16,67
			Kegiatan Pemantapan Focal Point dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan Pemantapan Focal Point	4 kali, 3 dokumen dan 70 orang		4 kali, 3 dokumen dan 70 orang	0	0	0	0



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	Jumlah posyandu yang dimonitoring	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100	6 kelompok	100
			Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan.	Jumlah Kegiatan pertemuan Fasilitasi	35 kali	35 kali	35 kali	23	65,71	23	65,71
			Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas	Jumlah kegiatan Penguatan lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100	30 lembaga	100
			Kegiatan Pameran BBGRM, HKG PKK Tk Provinsi Jawa Timur dan Tk. Nasional	Jumlah Kegiatan Pameran	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	50	1 kali	50
			Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Kegiatan lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	3 peserta	0	3 peserta	0	0	0	0
			Kegiatan Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik	Jumlah Pencanangan	4 kelurahan	3 kelurahan	4 kelurahan	3 kelurahan	75	3 kelurahan	75
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan							
			Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Upaya perlindungan Perempuan dan anak	8 relawan, 5 kegiatan dan 12 sekolah	8 relawan, 5 kegiatan dan 12 sekolah	8 relawan, 5 kegiatan dan 12 sekolah	8 relawan, 3 kegiatan	44%	8 relawan, 3 kegiatan	44%
			Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	250	250	250	0	0	0	0
			Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak	500	500	500	0	0	0	0
			Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
			Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	4 kali, 1 dokumen	4 kali, 1 dokumen	4 kali, 1 dokumen	2 kali	40	2 kali	40

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

DINAS TENAGA KERJA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
'1.07.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan bahan penunjang ATK, alat listrik dan elektronik, benda pos, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, cetak dan penggandaan	40	6	8	1	12,5	7	17,5
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	5	1	1	1	100	2	40
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	15	6	1	0	0	6	40
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional	15	3	1	1	100	4	26,66666667
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	5	1	1	1	100	2	40

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5	1	1	0	0	1	20
			Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	Rehab sarana dan prasarana aparatur	5	2	1	1	100	3	60
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	28	6	6	5	83,33333333	11	39,28571429
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	1		Tenaga Kerja.								
			Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka							
			Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	Jumlah pemeran bursa kerja	5	1	1	0	0	1	20
			Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)	Tersedianya dokumen IPK sesuai dengan kebutuhan kerja	5	1	1	0	0	1	20
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah penyuluhan motivasi kerja	50	0	10	10	100	10	20
			Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan.	Jumlah Wirausaha Yang Produktif	5	1	1	0	0	1	20
			Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pengiriman tenaga kerja siap pakai	700	0	140	0	0	0	0
			Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan	40	8	9	5	55,55555556	13	32,5

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja.	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan	175	36	35	0	0	36	20,57142857
			Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan	10	2	2	0	0	2	20
			Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Jumlah Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun dan Prosentase pekerja yang mendapat jaminan sosial							
			Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah pembinaan hubungan industrial dan jamsostek	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian perselisihan perusahaan dengan pekerja	40	8	10	3	30	11	27,5
			Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	Jumlah sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan pembahasan UMK	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah pembahasan masalah ketenagakerjaan	5	2	2	1	50	3	60
			Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Jumlah kepatuhan terhadap penyalur tenaga kerja	25	5	5	5	100	10	40
			Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	Jumlah pendataan wajib lapor ketenagakerjaan dan kepatuhan pengusaha terhadap pekerja	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK)	Jumlah perusahaan yang melaksanakan upah minimum	5	1	1	0	0	1	20
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	7		Perindustrian.								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah Promosi dan IKM yang dibina							
			Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat nasional	Julah keikutsertaan peserta dalam Pameran	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	100	20	20	0	0	20	20
			Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Industri Kecil	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	160	40	25	0	0	40	25
			Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan Menengah tingkat regional di Surabaya (PPUD)	Jumlah Partisipasi dalam pameran	5	1	1	0	0	1	20
			Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produksi Souvenir	Jumlah IKM/IRT yang mengikuti Pelatihan	5	1	1	1	100	2	40
			Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Uji Nilai Gizi Produk Makanan Olahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	80	20	20	0	0	20	25
			Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Pangan serta Fasilitasi Ijin Teknis	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	150	20	30	0	0	20	13,33333333
			Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	80	20	10	0	0	20	25
			Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHT	frekuensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin dalam satu tahun	20	4	4	0	0	4	20

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pengelolaan Energi Migas dan kegeologian	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5	1	4	0	0	1	20
3	8		Transmigrasi.								
			Program Ketransmigrasian	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja							
			Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	Jumlah sosialisasi ketransmigrasian	15	3	3	3	100	6	40

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
'1.08.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%		100%	76%	76%	76%	0,76
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis		9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	100%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas	85 kali		20 kali	13 kali	65%	13 kali	15,29%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%		100%	66%	66%	66%	0,66
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan	4 gedung		4 gedung	4 gedung	100%	4 gedung	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	57 unit		55 unit	28 unit	50,91%	28 unit	49,12%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	70 unit		70 unit	32 unit	45,71%	32 unit	45,71%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	268 unit		214 unit	214 unit	100%	214 unit	79,85%
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	223 orang		223 orang	223 orang	100%	223 orang	100%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%		100%	87%	87%	87%	0,87
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen		8 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	87,5%
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	5		<b>Lingkungan Hidup.</b>								
			Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	95%	100%	95%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	33,33%
			Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian kerusakan hutan dan lahan	4 jenis		2 jenis		0%		0%
			Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekoregion (RPPLH)	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen						
			Kegiatan Koordinasi Izin TPS B3 dan Rekomendasi Izin Pembangunan Limbah Cair	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	60 rekomendasi						

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan	200 unit	20 unit	25 unit		0%		0%
			Kegiatan Peningkatan Edukasi Masyarakat Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	2 kali						
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran air (PPA)	73%	57%	63%				
				Prosentase pengendalian pencemaran udara (PPU)	79%	53%	59%				
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Kerusakan Lahan untuk Produksi Bersama	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan peserta uji emisi	1500 kendaraan	327 kendaraan	500 kendaraan	1103 kendaraan	220,6%	1103 kendaraan	73,53%
			Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan kegiatan	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	100%
			Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim	6 kelurahan						
			Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen						
			Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pencemaran Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kali						
			Kegiatan Inventarisasi Kerusakan Lingkungan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen						
			Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium	Jumlah sarpras laboratorium			45 unit		0%		0%



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	81%	82%				
			Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah adiwiyata	21 sekolah	7 sekolah	7 sekolah		0%		0%
			Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah titik pantau	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	3 kecamatan	100%	3 kecamatan	100%
			Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	15 kasus	5 kasus	5 kasus	3 kasus	60%	3 kasus	20%
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	100%	2 kelurahan	33,33%
			Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Mengenai Izin Lingkungan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	100%
			Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		0%		0%
			Kegiatan PROPER (Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan)	Jumlah perusahaan proper	9 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan		0%		0%
			Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam (SAKA KALPATARU)	Jumlah peserta saka kalpataru	300 orang	100 orang	100 orang		0%		0%
			Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi			1 kali	1 kali	100%		
			Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenal Izin Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	300 orang						

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2%	-6,70%	2%	0,60%			
			Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah B3	90 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	56 perusahaan	186,67%	56 perusahaan	62,22%
			Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan	3 kali		1 kali		0%		0%
			Kegiatan Pemanfaatan Gas Methan di TPA Winongo	Jumlah zona yang tertangani	3 zona		1 zona	1 zona	100%	1 zona	33,33%
			Kegiatan Projasih	Jumlah tenaga projasih	50 orang	45 orang	45 orang	50 orang	100%	50 orang	100%
			Kegiatan Peningkatan TPS	Jumlah TPS	33 lokasi TPS	11 lokasi TPS	11 lokasi TPS		0%		0%
			Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	Jumlah mesin pengolah sampah layak pakai	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Container	Jumlah container	15 unit	10 unit	5 unit		0%		0%
			Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo	Jumlah lokasi controlled landfill	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	100%
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana			3 jenis	2 jenis	66,67%		
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan	jumlah kendaraan operasional persampahan			3 unit		0%		
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengadaan Kendaraan dan Sarpras operasional persampahan	5 jenis						
			Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengolahan Sampah	Jumlah sarpras kebersihan dan pengolahan sampah	9 jenis	16 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	100%
			Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi		0%		0%
			Kegiatan Perluasan Lahan TPA Winongo	Jumlah lokasi perluasan	1 lokasi						
			Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan			225 unit		0%		

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan			25 unit		0%		

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.09.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	50%	0,50	150%	150%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan	6	6	14	9	0,64	15	2,5
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	34	34	30	25	0,83	59	1,74
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	50%	0,50	1,5	150%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	1	0	1	1	1,00	1	1,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	2	2	2	1	0,50	3	1,50
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana	6	6	6	4	0,67	10	1,67

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50%	0,50	1,5	150%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana	4	3	4	2	0,50	5	1,25
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	0,50	1,5	150%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5	5	5	3	0,60	8	1,60
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.								
			Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Ganda dalam Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,70%	98,70%	99%	80%	0,81	1,787	1,79
			Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan	Jumlah pelaporan data Adminduk	100	75	1	1	1,00	76	0,76
			Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan	Jumlah Komputer dan server yang mendapat perawatan software dan hardware	30	22	22	20	0,91	42	1,40
			Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen	1	75	100	100	1,00	175	175,00
			Kegiatan Pemantapan Teknis Pencetakan KTP Elektronik	Jumlah tenaga	35	35	35	35	1,00	70	2,00
			Kegiatan Evaluasi dan Rapat Validasi data Kependudukan	Jumlah Petugas Kelurahan dan Kecamatan yang diundang dalam rapat koordinasi dan validasi data	30	30	30	16	0,53	46	1,53
			Kegiatan Penyebaran Informasi Adminduk melalui Media Elektronik	Jumlah penayangan informasi adminduk melalui media elektronik	2	4	11	9	0,82	13	6,50

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang akurat dan tepat waktu	81%	81%	81%	65%	0,80	1,46	1,80
			Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah dokumen yang ditata dan dirawat	13	13	13	12	0,92	25	1,92
			Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi	460	460	607	607	1,00	1067	2,32
			Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Blanko security dan Blanko non security	20	20	20	0	0	20	1,00
			Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah blanko	1	1	1	0	0	1	1,00
			Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk	30	30	30	16	0,53	46	1,53
			Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan yang akurat dan tepat waktu	93%	93%	90%	78%	87%	1,71	1,84
			Kegiatan Pemantauan Kependudukan di wilayah Kota Madiun	Jumlah Kelurahan yang dipantau	27	27	27	16	0,59	43	1,59
			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang dilakukan evaluasi	30	30	30	16	0,53	46	1,53
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)	Jumlah Dokumen	5	5	4	3	0,75	8	1,60
			Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	500	500	1600	0	0,00	500	1,00
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan Petugas Pelayanan	Jumlah Aparat yang di bimtek	66	66	66	35	0,53	101	1,53

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)	Indeks kepuasan masyarakat	2	2	2	1	0,50	3	1,50

DINAS PERHUBUNGAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.10.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5	2	1	1	1,00	5	1,00
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400	160	80	80	1,00	240	0,60
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	5	2	1	1	1,00	6	1,20
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	65	13	13	13	1,00	69	1,06
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	200	80	40	40	1,00	81	0,41

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	175	70	35	15	0,43	85	0,49
			Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	5	2					
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.000	600	600	600	1,00	1200	0,40
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	40	16	8	4	0,50	20	0,50
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	9		Perhubungan.								
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik							
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal, Sub Terminal dan Halte	Jumlah arus penumpang	65	26	13	13	100,00	39	0,60
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Barang	Jumlah angkutan barang keluar masuk	5	2	1	1	100,00	3	0,60
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan	4.105	1.642	821	0	0,00	1642	0,40
			Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ	Jumlah CCTV dan SIM LLAJ	39	2	1	1	70,00	72	1,85

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan, Jumlah Kendaraan di KIR							
			Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu lalu lintas	1.185	474	237	237	1,00	711	0,60
			Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan	6.645	2.658	1.329	1.329	1,00	3987	0,60
			Kegiatan Pengadaan Paku Marka Jalan	Jumlah paku jalan	2.385	1.114	557	557	1,00	1671	0,70
			Kegiatan Pengadaan Papan Nama Jalan	Jumlah papan nama jalan	985	394	197	197	1,00	591	0,60
			Kegiatan Pengadaan Delinator	Jumlah delinator	475	190	95	95	1,00	285	0,60
			Kegiatan Pengadaan Cermin Tikungan.	Jumlah cermin tikungan	50	20	10	10	1,00	30	0,60
			Kegiatan Pengadaan Warning Light (Flasing/Lampu Peringatan).	Jumlah warning light	20	8	4	4	1,00	12	0,60
			Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan.	Jumlah data	5	2	1	1	1,00	3	0,60
			Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat	5	2	1	0	0,00	0	0,00
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	IKM							
			Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Personil	75	30	15	4	0,27	34	0,45
			Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak kendaraan umum yang diberi penghargaan	175	70	35	35	100,00	105	0,60
			Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	Jumlah pelajar yang diberi penghargaan	2.640	1.056	528	0	0,00	1056	0,40
			Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	Junlah penumpang	2.135	854	427	427	100,00	1281	0,60
			Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor	Jumlah peserta yang terpilih	250	100	50	50	100,00	150	0,60



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	Jumlah pos pengamanan	15	6	3	3	100,00	9	0,60
			Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan	Jumlah kegiatan	500	200	100	100	100,00	300	0,60
			Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah Penilaian	10	4	2	0	0,00	0	0,00
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	Jumlah angkutan/tahun	5	2	1	1	1,00	3	0,60
			Kegiatan Pendataan Angkutan Sekolah Gratis	Jumlah Dokumen				(PAK) 200.000.000	(PAK) 200.000.000		
			Kegiatan Penyusunan Raperda Penyelenggaraan LLAJ	Jumlah Dokumen				(PAK) 200.000.000	(PAK) 200.000.000		

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.11.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%		50%		
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hr Lembur ATK, Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan, Surat Kabar, cetak dan Pengandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	18 Bulan	1,50%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	30 Kali	43 Kali	44 Kali	9 Kali	50%	52 Kali	1,70%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%				
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Gedung kantor	5 Ruang	1 Ruang	2 Gedung (5 Ruang)	4 Ruang	75%	5 Ruang	1%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	15 Unit	6 Unit	15 Unit	7 Unit	50%	13 Unit	0,80%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Pemeliharaan sapras	76 Unit	17 Unit	58 Unit	29 Unit	50%	46 Unit	0,60%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%				
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	2%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%				
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbentuknya dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	60%	9 Dokumen	1,80%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	10		Komunikasi dan Informatika.								
			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Jumlah Media Elektronik milik Pemerintah Kota, Jumlah SDM Penyiaran	100%	100%	85%				
			Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	Jumlah jam siaran	18 Jam/hari	18 Jam/hari	18 Jam/hari	18 Jam/hari	50%	36 Jam	2%
			Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah dokumentasi dan informasi berbagai kebijakan pemerintah	50 Media	50 Media	50 Media	50 Media	50%	100 Media	2%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	Jumlah pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	12 Kali	12 Kali	12 Kali	6 Kali	50%	18 Kali	1,50%
			Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik	Jumlah Kegiatan Jumpa pers	12 Kali	12 Kali	12 Kali	6 Kali	50%	18 Kali	1,50%
			kegiatan Media Cetak Program Pemerintah	Jumlah tabloit sebagai media masa	13 Edisi	14 Edisi	13 Edisi	6 Edisi	50%	20 Edisi	1,50%
			Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Pekan Kim dan Pembinaan KIM	12 Kali	13 Kali	6 x Pembinaan, 1 x Pelatihan, 1 x Pekan KIM	3 Kali	50%	16 Kali	1,20%
			Kegiatan Optimalisasi PPID	Jumlah Optimaslisasi PPID	888 Informasi	444 Informasi	888 Informasi	367 Informasi	41,40%	811 Informasi	0,90%
			Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota	Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan pemerintah Kota	1.584 Dokumentasi	792 Dokumentasi	1.584 Dokumentasi	603 Dokumentasi	38%	1.395 Informasi	0,80%
			Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi Ketentuan Perundang-undangan Di Bidang Cukai Kepada Masyarakat (DBH-CHT)	Jumlah sarana prasarana media sosialisasi cukai	3 Lokasi		3 Jenis (Videotron, Radio dan TV Online)				
			Pelatihan Jurnalistik	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang, 2 Hari, 1 Kali Kegiatan						
			Pelatihan Fotografi Jurnalistik	Jumlah peserta pelatihan	15 Orang, 2 Hari, 3 Kali Kegiatan (Level)						
			Pelatihan Penyiar Radio	Jumlah peserta pelatihan	20 Orang, 2 Hari, 1 Kali Kegiatan						
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan teknologi Informasi, Jumlah Menara Telekomunikasi,	100%		100%				
			Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah jenis pelatihan	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	100%	74 OPD	2%
			Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	Jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara	102 Titik Client + 138 Titik CCTV + 38 Website		102 Titik Client + 138 Titik CCTV + 38 Website	102 Titik Client + 138 Titik CCTV + 38 Website	50%	204 Titik Client + 264 Titik CCTV + 76 Website	2%
			Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	Persentase uptime server dan koneksi jaringan LPSE	3 User		98%	3 User	50%		

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Standart Kebijakan Layanan Transaksi Elektronik	Jumlah dokumen standart	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2%
			Kegiatan Bimtek Aplikasi SPSE	Jumlah peserta pelatihan SPSE	120 PA/KPA						
			Kegiatan Imlementasi Aplikasi e-Gov	Aplikasi e-Kinerja			34 OPD				
			Kegiatan Pemeliharaan Media Online	Jumlah domain	1 Domain Utama						
			Kegiatan Integrasi Sistem Informasi	Jumlah SIM yang diintegrasikan	4 Aplikasi						
			Kegiatan Pembangunan Command Center	Jumlah sarana command center	1 Paket						
			Kegiatan Penyusunan IT Master Plan	Jumlah dokumen							
			Kegiatan Implementasi Aplikasi Perkantoran SiMaya	Jumlah OPD yang menggunakan SiMaya	37 OPD						
			Kegiatan Bimtek Rencana Umum Pengadaan	Jumlah peserta Bimtek	120 PA/KPA						
			Kegiatan Operasional Telecenter Madumongso	Terlaksananya pembinaan TIK melalui Telecenter	1 Tahun						
			Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis Web	Jumlah aplikasi berbasis Web	0 Aplikasi						
			Kegiatan Pengelolaan Call Center 112	Jumlah layanan panggilan darurat	6 Layanan						
2	14		Statistik.								
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen Statistik Daerah yang Tersusun	100%	100%	100%				
			Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	30%	2 Dokumen	1%
			Kegiatan Penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	1 Dokumen						
			Kegiatan Penyusunan Statistik Sosial Ekonomi Regional	Jumlah dokumen	1 Dokumen						
2	15		Persandian.								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	Jumlah SDM Persandian	100%		100%				
			Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian	Jumlah Personil Persandian yang mengikuti pelatihan	37 OPD		37 OPD	0	10%	37 OPD	1%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor kantor yang diadakan	3 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	5 jenis	166%
			Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	Jumlah gedung yang layak huni	0	0	1 unit				
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	45%	45%	145%	145%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	50 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	60%	16 dokumen	32%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	12		Penanaman Modal.								
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	100%	100%	100%	70%	70%	170%	170%
			Promosi Investasi	Jumlah Pameran Investasi	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	50%
			Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	Jumlah Dokumen Investasi	5 kali	2 kali	1 kali	0	0	1 dokumen	20%
			Business Gathering	Jumlah Peserta	130 orang	0	40 dokumen	47 orang	117%	47 orang	36%
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasio Izin yang Diterbitkan	98%	0	94%	35%	37%	35%	36%
			Surveylance ISO 9001 :2008	Jumlah sertifikat manajemen iso 9001 :2008	1 jenis sertifikat	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	100%
			Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Data Perizinan	Jumlah dokumen yang disusun	50 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	10%	15	30%
			Penyebarnya dan Sosialisasi Berbagai Informasi Perizinan	Jumlah baliho/ gambar yang dibuat	45 gambar baliho	2 gambar	10 gambar	0	0	0	0
			Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Perizinan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, keterampilan dan profesionalisme SDM Perizinan	122 orang	24 orang	24 orang	24%	100%	48 orang	39%
			Kegiatan Penataan Arsip	Jumlah yang dikelola	1800 arsip	1764 arsip	1764 arsip	1585 arsip	90%	3349 arsip	100%
			Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.								
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif							
			Kegiatan Pemingkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diikuti	140 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	20 koperasi	100%	45 koperasi	32%
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi serta penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Kesehatan Koperasi	6 kali	1 kali	1 kali	20 koperasi	100%	2 kali	33%
			Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan Pelatihan perkoperasian (Jambore Koperasi Sekolah)	Jumlah Jambora Kopsek yang dilaksanakan	15 kali	3 kali	3 kali	2 kali	100%	5%	33%
			Kegiatan Monev Penyelenggaraan KUMKM	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
			Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Pembinaan	210 orang	40 orang	40 orang	100 orang	100%	140 orang	67%
			Kegiatan Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pembinaan	450 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	200 orang	44%
			Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	400 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	200 orang	50%
			Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi Koperasi Wanita	Jumlah peserta pelatihan	90 orang	0	30 orang	0	0	0	0
			Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Jumlah Pengelola Koperasi/KUD yang mengikuti Pelatihan	250 orang	50 koperasi	50 koperasi	40 koperasi	100%	90 koperasi	36%
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Jumlah KUMKM yang mengikuti Pelatihan	49 kali	10 kali	10 kali	26,9%			

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dalam rangka HARKOPNAS	Jumlah keikutsertaan Pameran	5 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	0	0	0	0
			Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah peserta pelatihan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali/200 umkm	100%	2 kali	40%
			Kegiatan Pameran Produk Unggulan UMKM dalam Rangka HARKOP dan SMESCO	Jumlah Partisipasi dalam pameran	10 kali	2 kali	2 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Pameran Produk UMKM di Tingkat Nasional	Jumlah keikutsertaan Pameran	13 kali	2 kali	3 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM	Jumlah Peserta Sosialisasi	500	100	100	100 umkm	100%	200 umkm	40%
			Kegiatan Pengembangan Unit Pelayanan Klinik Bisnis untuk WUB	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan	1300 WUB	260 WUB	260 WUB	0	0	0	0
			Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda	Jumlah Pameran yang diikuti	15 pameran + 5 rakor	3 pameran + 1 rakor	3 pameran + 1 rakor	1 pameran	25%	4 pameran, 1 rapat	
			Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun	Jumlah Data dan Jenis Pemberdayaan yang dilaksanakan	20 jenis kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	0	0	0	0
			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	1500 orang	300 orang	300 orang	297 orang	99%	567	39,8%
			Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	Jumlah Kegiatan Temu kerja	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	1 kegiatan	40%	3%	30%

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.13.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	-	80%	41,94	41,94	41,94	41,94
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	40,47	1 lembaga	40,47
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	126 kali	-	38 kali	16 kali	46,8	16 kali	46,8
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	-	80%	27,25	27,25	27,25	27,25
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung yang Dipelihara	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	65,27	1 lembaga	65,27
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	2 unit mobil dan 28 unit sepeda motor	-	2 unit mobil dan 28 unit sepeda motor	2 unit mobil dan 10 unit sepeda motor	21,5	2 unit mobil dan 10 unit sepeda motor	21,5
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	% Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik	1 dinas	-	1 dinas	1 dinas	7,27	1 dinas	7,27
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 paket	-	2 paket	2 paket	43,32	2 paket	43,32
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 paket	-	5 paket	3 paket	43,32	3 paket	43,32
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	-	100%	85%	85%	85%	0,85
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 dokumen	-	6 dokumen	5 dokumen	70%	5 dokumen	70%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
2	13		<b>Kepemudaan dan Olah Raga.</b>								
			Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional, Jumlah Peserta Olah Raga							
			Lomba/Pertandingan dan Pembinaan Prestasi Olah Raga Antar Pelajar SD,SMP,SM Tingkat Kota	Jumlah Cabang Olah Raga	14 cabang olah raga	-	14 cabang olah raga	14 cabang olah raga	29,4	14 cabang olah raga	29,4
			Kegiatan Pekan Olahraga SD Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olah Raga	9 cabang olah raga	-	9 cabang olah raga	0	0	0	0
			Liga Pendidikan Sepak Bola (Tingkat SMP dan SMA/SMK)	Jumlah Lembaga	72 lembaga	-	72 lembaga	0	0	0	0
			Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	Jumlah Lembaga	72 lembaga	-	72 lembaga	72 lembaga	41,97	72 lembaga	41,97
			Hari Olah Raga Nasional	Jumlah Orang	500 orang	-	500 orang	0	0	0	0
			Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Siswa	810 siswa	-	810 siswa	0	0	0	0
			Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	200 orang	-	200 orang	200 orang	79,1	200 orang	79,1
			Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Kartoharjo	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Olah Raga	2 kali	-	2 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Manguharjo	Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga	2 kali	-	2 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Taman	Jumlah pelaksanaan kegiatan olah raga	2 kali	-	2 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	Jumlah Paket	3 paket	-	3 paket	0	0	0	0
2	16		<b>Kebudayaan.</b>								
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan, Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan, Jumlah group kesenian dan jumlah							

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
				budaya lokal yang dilestarikan							
			Lomba Vokal Keroncong dan Campur Sari	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	0	0	0	0
			Pekan Seni Pelajar Tingkat Propinsi Jawa Timur	Jumlah Paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	91,84	1 paket	91,84
			Festival Pedalangan dan Pembinaan Dalang Anak Tingkat Kota Madiun	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	1 sub paket	11,07	1 sub paket	11,07
			Grebeg Maulud dan Pameran Seni Budaya	Jumlah Paket	1 paket	-	1 paket	0	0	0	0
			Pentas Seni Secara Periodik, Car Free Day dan Car Free Night	Jumlah Paket	3 paket	-	3 paket	1 paket	33,86	1 paket	33,86
			Pegelaran Wayang Kulit	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	0	0	0	0
			Pelatihan Bahasa Jawa	Jumlah Peserta	100 peserta	-	100 peserta	100 peserta	100	100 peserta	100
			Festival Seni	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	1 paket	61,54	1 paket	61,54
			Festival Pedalangan Tingkat Provinsi	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	2 paket	90,63	2 paket	90,63
			Festival Seni Karawitan Anak Tingkat Kota dan Provinsi	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	1 paket	45,25	1 paket	45,25
			Lomba Dongeng Kesejarahan Bagi Guru	Jumlah Paket	1 paket	-	0	0	0	0	0
			Lomba Geguritan Pitutur Luhur	Jumlah Paket	1 paket	-	0	0	0	0	0
			Lomba Penulisan Naskah Macapat dan Tetembangan Tembang Macapat	Jumlah Paket	1 paket	-	0	0	0	0	0
			Sarasehan Budaya	Jumlah Paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	100	1 paket	100
			Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Jumlah Paket	2 paket	-	2 paket	1 sub paket	8,38	1 sub paket	8,38
			Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Madiun yang dilaksanakan	18 jenis	-	18 jenis	2 jenis	0	2 jenis	0

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Pementasan Kesenian di TMII	Jumlah Pengunjung	200 orang	-	200 orang	0	0	0	0
			Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Kec. Kartoharjo	Jumlah Kegiatan Pentas Seni	6 kali	-	6 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Kec. Manguharjo	Jumlah kegiatan pentas seni	9 kali	-	9 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Kec. Taman	Jumlah kegiatan pentas seni	3 kali	-	3 kali	0	0	0	0
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>								
3	2		<b>Pariwisata.</b>								
			Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan destinasi Wisata							
			Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisata	Jumlah Peserta Pemberdayaan Generasi Muda	75 orang	-	75 orang	0	13,09	0	13,09
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri (hari Jadi Propinsi)	Jumlah Partisipasi	2 kali	-	2 kali	0	0	0	0
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 kali	-	1 kali	1 kali	86,77	1 kali	86,77
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)	Jumlah keikutsertaan Pameran	1 kali	-	1 kali	1 kali	87,5	1 kali	87,5
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata	Jumlah dokumen money yang dihasilkan	2 dokumen	-	2 dokumen	0	0	0	0
			Kegiatan Lomba Fotograpy	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	100 orang	-	100 orang	0	0	0	0
			Kegiatan Gebyar Batik dan Fashion Show Batik 2016	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar batik dan Fashion Show	100 orang	-	100 orang	100 orang	90,24	100 orang	90,24

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas	Jumlah Babak/festifal yang diikuti	2 babak	-	2 babak	0	0	0	0
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata	Jumlah Peserta mengikuti Temu usaha	100 orang	-	100 orang	100 orang	93,32	100 orang	93,32

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.14.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2 paket	
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi	30 kali	30 kali	57 kali	48 kali	90%	30 kali	
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%				0%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	1	1	2		0%	1	0
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yg Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	2 unit	18%	17 unit	1,13%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah Sarana Prasarana yg dipelihara	68 unit	68 unit	68 unit	18 unit	30%	86 unit	1,26%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	1 paket	94%		
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2 paket	200%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%		6%		
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 dok	5 dok	5 dok		0%	5 dok	100%
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	17		<b>Perpustakaan.</b>								
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan, persentase pengunjung perpustakaan			31500 org				
			Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Frekwensi (Kali)	2 kali		1 kali	1 kali	94%	1 kali	50%
			Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yg di kelola	5250 eks		1750 eks	1500 eks	86%	1500 eks	29%
			Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Frekwensi (Kali)	21 kali	10 kali	5 kali	5 kali	53%	15 kali	71%
			Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka	4500 eks	3024 eks	1500 eks	0	0%	3024 eks	67%
			Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Jumlah Paket	1728 org	432 org	432 org	216 org	48%	648 org	38%
			Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka	Jumlah Frekwensi (Kali)	10 kali	2 kali	2 kali	1 kali	50%	3 kali	30%
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Frekwensi (Kali)	300 kali	60 kali	58 kali	51 kali	87%	111 kali	37%
			Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelola Perpustakaan	Jumlah Peserta Sosialisasi pengelola Perpustakaan	466 org		75 org	75 org	100%	75 org	16%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	120 perpus	118 org	71 perpus	0	0%	118 org	98%
			Sosialisasi, Bimtek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah	Jumlah Pengelola Perpustakaan yg Ditugaskan	70 org	15 org	15 org	3 org	23%	18 org	28%
2	18		Kearsipan.								
			Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola, persentase arsip yang diselamatkan							
			Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Unit Kearsipan	8 unit	2 unit	2 unit	2 unit		4 unit	50%
			Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah Dokumen Yang Menjadi Duplikasi	10 dokumen	2 dokumen	6 dok	0	0%	2 dok	20%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah Frekwensi (Kali)	6 kali	2 kali	2 kali	1 kali	50%	3 kali	50%
			Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelola Kearsipan	600 org	200 org	200 org	200 org	92%	400 org	67%
			Kegiatan Sosialisasi Bimtek SDM Pengelola Kearsipan Ke Luar Daerah	Jumlah Pengelola Kearsipan yg Ditugaskan	39 org	12 org	15 org	7 org	49%	19 org	48,7%
			Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan	132 unit	82 unit	31 unit	0	0%	82 org	62%

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
2.01.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	35,31%	100%		39,93%		42,86%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa,peralatan dan perlengkapan perkantoran	50 paket	20 paket	10 paket	10 paket selama 6 bulan (pengadaan tiap bulan)	50%	20 paket + 10 paket selama 6 bulan	50%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah	392 kali	120 kali	67 kali	20 kali	29,85%	140 kali	35,71%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	26,67%	100%		0%		26,67%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah lokasi gedung/bangunan	3 lokasi x 5 tahun	2 lokasi x 2 tahun (tidak dilakukan pemeliharaan lokasi gedung pasar ikan karena digunakan instansi lain)	3 lokasi	2 lokasi (Gedung Dinas dan Rumah Potong Hewan proses pemeliharaannya baru dimulai)	0%	4 lokasi	26,67%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah mobil dinas	3 lokasi x 5 tahun	3 unit x 2 tahun	3 unit	3 unit (pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan)	50%	3 unit x 2 tahun dan 3 unit selama 6 bulan	50%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	284 unit	109 unit	55 unit	36 unit	65,45%	145 unit	51,06%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	62,96%	100%	35 unit	100%	86 unit	106%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana prasarana kantor	3 paket, 81 unit	6 paket, 51 unit	35 unit	35 unit	100%	86 unit	106,17%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	40%	100%		40%		48%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	50 dokumen	20 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	40%	24 dokumen	24%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	3		Pangan.								
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan dan protein	90,50%	95,89%	90,25%	Belum bisa dihitung	0%	95,89%	105,96%
			Kegiatan Monev dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari	Jumlah kegiatan monev dan optimalisasi	1 kegiatan, 1 dokumen monev	1 dokumen monev	1 kegiatan	(Rapat koordinasi, study banding, rapat monev, pengadaan bibit)	50%	1 dokumen monev, rapat koordinasi, study banding, rapat monev, pengadaan kegiatan	75%
			Kegiatan Lomba Cipta Menu	Jumlah kegiatan lomba cipta menu	5 kegiatan lomba, 10 x pameran	2 kegiatan lomba, 4 kali pameran	1 kegiatan lomba, 2 kali pameran	belum dilaksanakan karena menunggu jadwal dari Provinsi dan pusat	0%	2 kegiatan lomba, 4 kali pameran	40%
			Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen yang dikoordinasi Dewan Ketahanan Pangan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	dokumen selesai di akhir tahun	0%	2 dokumen	40%
			Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan	Jumlah Kegiatan Pengembangan	2 dokumen neraca bahan makanan (NBM) dan 4 kelurahan mandiri pangan x 2 tahun	1 dokumen neraca bahan makanan (NBM) dan 4 kelurahan mandiri pangan	1 dokumen neraca bahan makanan (NBM) dan 4 kelurahan mandiri pangan	dokumen selesai di akhir tahun	0%	1 dokumen neraca bahan makanan (NBM) dan 4 kelurahan mandiri pangan	50%
			Sosialisasi Keamanan Pangan	Jumlah Kegiatan sosialisasi	3 kali kegiatan (240 peserta)	1 kali kegiatan (60 peserta)	1 kali kegiatan sosialisasi (575 peserta)	1 kali kegiatan sosialisasi (575 peserta)	100%	2 kali kegiatan (635 orang)	66,67%
			Kegiatan Penanganan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah dokumen penanganan kewaspadaan pangan dan gizi	2 dokumen penanganan kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	1 dokumen	dokumen selesai di akhir tahun	0%	1 dokumen	50%
			Kegiatan Penyusunan SPM Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen yang disusun SPM Ketahanan Pangan	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	dokumen selesai di akhir tahun	0%	2 dokumen	67%



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Akses pangan	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	-	1 dokumen	dokumen selesai di akhir tahun	0%	-	0%
			Kegiatan Subsidi Pangan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah	Jumlah RTS-PM	5.560 raskin dan 3.200 raskinda x 5 tahun (raskin menjadi bantuan pangan nontunai dikelola dinas sosial, raskinda menjadi subsidi pangan rastra daerah, pada 2017 rastra daerah telah menjadi BNPT sehingga untuk 2018 dan 2019 akan dikelola dinas sosial)	2.721 raskin	3.200 raskinda (penyaluran 14 kali dalam setahun)	2.844 rastra daerah (penyaluran 6 kali dari 12 kali satu tahun)	38%	2.721 raskin dan 2.844 rastra daerah	29%
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	1		Kelautan dan Perikanan.								
			Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan dan Ragam Produksi Olahan yang bernilai tambah	929,91 ton	463,41 ton	211,68 ton	121,75 ton	57,52%	585,16 ton	62,93%
			Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	jumlah pelatihan	10 kali penyuluhan, 2 kali study banding	7 kali penyuluhan (4 kali penyuluhan pembudidaya ikan, 2 kali penyuluhan pengolah dan pemasar ikan), 2 kali study banding	1 kali pelatihan pembudidaya ikan, 1 kali study banding	1 kali pelatihan pembudidaya ikan, 1 kali study banding	100%	8 kali penyuluhan, 3 kali study banding	91,67%
			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah petani budidaya ikan	245 orang	60 orang, 2 kali penyuluhan kali 30 orang di 2016, 2015 tidak ada)	50 orang	dilaksanakan bulan Juli	0%	60 orang	24,49%
			Kegiatan Pembenihan Ikan	jumlah benih ikan yang dihasilkan BBI	685.000 ekor	332.050 ekor	185.000 ekor	195.580 ekor	105,72%	527.670 ekor	77,03%
			Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	15,4 kg/kap/tahun	14,7 kg/kap/tahun	14,8 kg/kap/tahun	belum bisa dihitung	0%	14,7 kg/kap/tahun	95,45%
3	3		Pertanian.								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi tanaman Pangan (Pajale/Padi, Jagung dan Kedelai)	92.500 ton (jumlah 5 tahun)	36.527 ton	18.500 ton	6540 ton	35,35%	43.067 ton	46,56%
			Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah Lokasi Pembuatan Pupuk Organik	18 lokasi	12 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	15 lokasi	83,33%
			Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jumlah infrastruktur pendukung pertanian	12 paket (saluran, plengseng, paving, gubuk tani)	10 paket (2 unit irigasi air tanah dan rumah pompa, 6 paket rehab JUT, jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi air tanah, 2 paket pembangunan irigasi air tanah dan pengembangan JUT)	1 paket JUT 2.025 m2	- perencanaan - masuk tahap lelang pekerjaan	3%	10 paket	83,33%
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian	20 paket (obat-obatan/pestisida:ins ektisida, fungisida, rodentisida, bakterisida, molusida, alsintan, tanaman display green house, bibit tanaman, APD:alat perlindungan diri masker, sarung tangan)	6 paket (obat-obatan/pestisida,power sprayer, alsintan, combine harvester, power thresher, sprayer elektrik)	3 paket (obat-obatan/pestisida, alsintan, bibit tanaman)	1 paket (bibit tanaman), tidak ada pengadaan alsintan, paket obat-obatan/pestisida dilaksanakan di kegiatan lain)	33,33%	7 paket	35,00%
			Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN penerima PUAP	6 gapoktan x 3 tahun	6 gapoktan x 2 tahun	6 gapoktan	6 gapoktan (3 kali dari 6 kali)	50%	18 gapoktan	83%
			Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lokasi percontohan SRI	9 unit	6 unit	3 unit	dilaksanakan di musim kemarau II (MK) Juli sampai Oktober	11%	6 unit	67%
			Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN Kota Madiun	15 gapoktan kali 5 tahun	15 gapoktan kali 2 tahun	15 gapoktan	15 gapoktan, 1 paket obat-obatan / pestisidda)	61%	15 gapoktan kali 3 tahun	60,00%
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Produksi Daging dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	7.500 ton dan 300 kasus	2.893,78 ton dan 148 kasus	1.500 ton dan 55 kasus	739,70 ton dan 157 kasus	49,31% dan 285,45%	3.633,48 ton	48,45% dan 101,6 %

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	jumlah demplot/ percontohan budidaya peternakan	14 kali, 15 unit	6 kali, 1 unit demplot (sejak 2016 bantuan demplot tidak dapat dilaksanakan terkendala status badan hukum peternak)	4 kali, 3 unit	1 kali penyuluhan, tidak ada demplot	25%	7 kali penyuluhan	50%
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang mendapat pengobatan&pemeriksaan kesehatan	6.935 ekor: kambing/domba 6.255 ekor, sapi 680 ekor, 10 kali vaksinasi, 5 kali pemeriksaan hewan korban	5.905 ekor : kambing/domba 5.328 ekor, sapi/kerbau 667 ekor, 3 kali vaksinasi kepada 900 ekor ayam, 2 kali pemeriksaan hewan korban	875 ekor : kambing/domba 700 ekor, sapi 175 ekor, vaksinasi ayam 5 kali, pemeriksaan hewan korban 1 kali	1.844 ekor: kambing/domba 1.670 ekor, sapi 174 ekor	210,74%	7.749 ekor	111,74%
			Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan daging	1.826 hari	731 hari	365 hari	181 hari	49,59%	912 hari	49,95%
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan	Jumlah hewan peliharaan yang mendapat pengobatan&pemeriksaan kesehatan	750 ekor : anjing 300 ekor, kucing 450 ekor	(kegiatan baru dilaksanakan di 2017)	200 ekor : 75 ekor anjing dan 125 ekor kucing	kegiatan belum dilaksanakan	0%	0	0%

DINAS PERDAGANGAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
2.02.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100,00%	8 jenis	100,00%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	19 kali	21 kali	23 kali	16 kali	69,57%	16 kali	69,57%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00%	1 gedung	100,00%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas dalam kondisi baik	26 unit	41 unit	39 unit	22 unit	56,41%	22 unit	56,41%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	44 unit	50 unit	51 unit	18 unit	35,29%	18 unit	35,29%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakian Dinas beserta kelengkapannya	112 orang	110 orang	104 orang	109 orang	100,00%	109 orang	100,00%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 dok	5 dok	5 dok	4 dok	80,00%	4 dok	80,00%
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	6		Perdagangan.								
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Peningkatan Produk yang dilaksanakan							
			Kegiatan Pameran Dagang	Jumlah keikutsertaan Pameran	3 kali	3 kali	3 kali		0,00%		0,00%
			Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	Jumlah Partisipasi dalam pameran Pembangunan	4 kali	4 kali	4 kali	2 kali	50,00%	2 kali	50,00%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah pengumpulan informasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali		0,00%		
			Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir	Jumlah Pelaksanaan Jejaring yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	1 kali	
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/Usaha Informal							
			Kegiatan Pembinaan dan pengawasan barang yang beredar dan ijin perdagangan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	6 kali	2 kali	33,33%	2 kali	33,33%
			Kegiatan Sosialisasi Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah Konsumen yang mengikuti sosialisasi			90 orang	30 orang	33,33%	30 orang	33,33%
			Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4 kali		0,00%		0,00%
			Pengawasan Barang Dalam Keadaan Tebungkus (BDKT)	Jumlah Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4 kali		0,00%		0,00%
			Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (UTTP)	8.000 UTTP	8.000 UTTP	7.000 UTTP	1.200 UTTP	17,14%	1.200 UTTP	17,14%
			Program Pembinaan PKL dan Asongan	Cakupan PKL yang di bina							
			Kegiatan Pembinaan PKL	Jumlah PKL yang dibina	600 pkl	600 pkl	600 pkl	200 pkl	33,33%	200 pkl	33,33%
			Kegiatan Pengawasan Mutu dagangan PKL melalui pelatihan kuliner	Jumlah pkl yang mengikuti Pelatihan	150 pkl	150 pkl	150 pkl		0,00%		0,00%
			Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL Kota Madiun	Jumlah PKL yang tertata	150 pkl	150 pkl	150 pkl		0,00%		0,00%
			Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola							
			Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0,00%		0,00%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar yang dikembangkan sarana dan prasarana pasarnya	17 pasar	17 pasar	17 pasar	1 pasar	5,88%	1 pasar	5,88%
			Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	Jumlah pasar yang dibersihkan oleh unsur masyarakat	17 pasar	17 pasar	17 pasar	17 pasar	100,00%	17 pasar	100,00%
			Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun	Jumlah Pasar yang di jaga petugas keamanan	17 pasar	17 pasar	17 pasar	17 pasar	100,00%	17 pasar	100,00%
			Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional	Jumlah Undian berhadiah dan cenderamata yang diberikan kepada wajib retribusi/sewa pasar tradisional	150 buah	150 buah	150 buah	150 buah	100,00%	150 buah	100,00%
			Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar	Jumlah peserta yang dilibatkan dalam kegiatan gerakan kembali ke pasar	500 peserta	500 peserta	500 peserta	500 peserta	100,00%	500 peserta	100,00%
			Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kebersihan, pemeliharaan bangunan, listrik dan fasilitas pendukung pasar-pasar	17 pasar	17 pasar	17 pasar	17 pasar	100,00%	17 pasar	100,00%
			Kegiatan Operasi Penertiban Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Angsuran dan Sewa Tempat Jualan	jumlah pasar yang akan ditertibkan penagihan tunggaannya	17 pasar	17 pasar	17 pasar	17 pasar	100,00%	17 pasar	100,00%
			Kegiatan Pendataan Pengunjung Pasar yang dikelola Dinas Pasar	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0	0		Rutin								
1.16.01.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	97%	100%	8%	0,8%	105%	1,05%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	35 Jenis	35 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	1%	42 Jenis	1,2%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120 Kali	24 Kali	24 Kali	17 Kali	70%	41 Kali	34%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	76%	100%	31%	31%	107%	1,07%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	3 buah	3 buah	3 buah	-	-	3 buah	1%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	37%	37%	137%	1,37%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	21 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	37%	6 dokumen	28%
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	1		Unsur Staf.								
			Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Daerah Lain	15 buah	4 buah	5 buah	3 buah	6%	7 buah	46%
			Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Rakernas Apeksi, Muskomwil Apeksi dan JKPI	15 kali	3 kali	3 kali	2 kali	66%	5 kali	33%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Fasilitas Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	Rakor Pawitan DIROGO	5 kali	-	1 kali	-	0%	-	0%
			Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	Jumlah MOU	15 dokumen	-	5 dokumen	1 dopkumen	2%	1 dokumen	6%
			Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota Madiun	60 kali	17 kali	20 kali	10 kali	50%	27 kali	45%
			Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda	20 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	-	-	3 dokumen	15%
			Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah	upacara peringatan Hari Otonomi Daerah	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	4%
			Kegiatan BinteK Administrasi Kelurahan	Terlaksananya BinteK tentang Administrasi kelurahan	750 orang	150 orang	150 orang	-	-	150 orang	2%
			Kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	5 dokumen	25%
			Kegiatan Koordinasi Penentuan Tapal Batas kelurahan	Patok Tapal Batas kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	0%	1 dokumen	1%
			Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	jenis kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	15 jenis	3 jenis	3 jenis	-	0%	3 jenis	2%
			Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	jumlah rapat koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	40 kali	8 kali	8 kali	2 kali	25%	10 kali	25%
			Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	jumlah kunjungan kerja Walikota ke Kelurahan	135 kali	27 kali	27 kali	-	10%	1 dokumen	33%
			Kegiatan Pemekaran Kecamatan	Jumlah dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	0%	1 dokumen	33%
			Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	Jumlah kelurahan yang Mengikuti Evaluasi Kelurahan Berhasil	9 kali	-	3 kali	1 kali	33%	1 kali	11%



1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.16.01.02			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%		100%		100%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan penunjang	6 jenis	7 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	100%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daera	178 kali	70 kali	36 kali	19 kali	53%	106 kali	60%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	1 unit	1 unit	1 unit	0	0%	1 unit	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	5 unit	7 unit	7 unit	1 unit	14%	5 unit	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	6 jenis	6 jenis	5 jenis	0	0%	6 jenis	100%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%		100%		50%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	2 paket	50%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%		40%		48%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	40%	2 dokumen	48%
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	1		<b>Unsur Staf.</b>								
			Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prosentase Capaian SPM	100%	100%	75%	83,74%	112%	83,74%	83,74%
			Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen		0%	2 dokumen	40%
			Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah laporan penerapan SPM yang disusun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen		0%	2 dokumen	40%
			Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survey	50 dokumen	20 dokumen	10 dokumen		0%	20 dokumen	40%
			Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik Tingkat Jawa Timur	Jumlah keikutsertaan gelar pameran pelayanan publik	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	66,67%
			Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	512 orang	128 orang	128 orang	128 orang	100%	256 orang	50%
			Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan	3 dokumen		1 dokumen		0%		0%
			Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase SKPD dengan Nilai Akuntabilitas Baik, Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai Road Map RB	100%	75%	80%	94,12%	117,65%		
			Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen	34 OPD		34 OPD	34 OPD	100%	34 OPD	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	9 dokumen		3 dokumen	2 dokumen	66,67%	2 dokumen	22,22%
			Kegiatan Pengembangan E-SAKIP	Pengembangan Sistem	1 sistem		1 sistem		0%		0%
			Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang dibina dan jumlah keikutsertaan gelar KBK Tingkat Provinsi	841 orang, 43 risalah, 2 risalah	232 orang	203 orang, 43 risalah, 2 risalah	203 orang		435 orang	
			Kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah Dokumen	28 OPD		28 OPD		0%		0%

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.16.01.03			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	60,41%	60,41%	200%	200%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	13	13	13	13	1	26	2
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	491	491	491	205	0,42	696,00	1,42
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	25,84%	25,8%	125,8%	125,8%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	2	2	5	4	0,8	6	3

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	38	34	38	38	1	72	1,9
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	3	3	5	3	0,6	6	2
			Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas	4	4	4	4	1	8	2
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	5,71%	5,71%	105,7%	105,71%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	1	1	3	3	1	4	4
			Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	Jumlah gedung	1	1	1	0	0	1	1
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	5850	5850	5850	0	0	5850	1
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	35,25%	35,25%	135,3%	135,25%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5	5	5	5	1	10	2
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	1		Unsur Staf.								
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang Pemerintahan	537	537	537	9,86%			
			Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	Jumlah Kegiatan	537	537	537	10	0,02	547	1,02
			Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani sekretariat	Jumlah Olahraga Yang Dilaksanakan dan Jenis Penghargaan	66	49	49	24	0,49	73	1,11

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.16.01.04			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%		100%				
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	2 paket	
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69 kali	12 kali	15 kali	7 kali	46,66 %	19 kali	27,53 %
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%		100%				
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	108	24 unit	21 unit	6 unit	28,57	30 unit	27,77%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%		100%				
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	32 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	40%	7 dokumen	21,87%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	1		<b>Unsur Staf.</b>								
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	100%		100%				
			Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perda, dok. kompilasi dan sosialisasi	16 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	66,66%	5 jenis	31,25%
			Legislasi Daerah (Prolegda)	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100%
			Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, jdih, lemb. lepas perda dan buku peraturan perundang-undangan	20 jenis	4 jenis	4 jenis	3 jenis	75%	7 jenis	35%
			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa hukum	15 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	66,66%	5 jenis	33,33%

**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH**

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1.16.01.05			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	8%	8%	108%	108%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 paket	8 paket	8 paket	4 paket	50%	12 paket	150%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	55 kali	35 kali	50 kali	11 kali	22%	46 kali	84%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	8%	8%	108%	108%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	1 unit ruangan bagian adm. Perekonomian dan kesra	1 unit ruangan bagian adm. Perekonomian dan kesra	1 unit ruangan bagian adm. Perekonomian dan kesra	-	-	-	-
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas	4 unit kendaraan dinas (1 mobil dinas dan 3 kendaraan roda dua)	4 unit kendaraan dinas (1 mobil dinas dan 3 kendaraan roda dua)	4 unit kendaraan dinas (1 mobil dinas dan 3 kendaraan roda dua)	1 unit kendaraan dinas	25%	5 unit kendaraan dinas	125%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	8 unit laptop, 3 unit AC, 3 unit printer dan 1 unit mesin ketik	2 AC dan 1 komputer	8 unit laptop, 3 unit AC, 3 unit printer dan 1 unit mesin ketik	2 unit laptop, 1 printer	20%	2 AC, 1 komputer, 2 unit laptop dan 1 printer	40%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	80%	80%	180%	180%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5 dokumen (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, Lkj)	5 dokumen (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, Lkj)	5 dokumen (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, Lkj)	4 dokumen (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, Lkj)	80%	5 dokumen (RKT, Renja, PK, Laporan Triwulan, Lkj)	80%
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	1		<b>Unsur Staf.</b>								
			Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Jumlah kegiatan pendukung stabilitas ekonomi	6 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (DBH-CHT)	Jumlah informasi yang disampaikan	3 macam penyampaian informasi	370 orang	370 orang	3 macam penyampaian informasi	100%	3 macam penyampaian informasi	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jenis Kegiatan TPID	3 jenis kegiatan TPID	3 jenis kegiatan TPID	3 jenis kegiatan TPID	2 jenis kegiatan TPID	67%	5 jenis kegiatan TPID	167%
			Kegiatan Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD	Kontribusi PAD	3 BUMD	Kontribusi PAD	3 BUMD	100%	3 BUMD	100%
			Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang LKM	Jumlah LKM yang sesuai kriteria OJK	200 bh	200 orang	200 bh	200 bh	100%	400 bh	200%
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	12 kali	-	12 kali	6 kali	50%	6 kali	50%
			Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ	Jumlah Peserta Yang Dikirim	10 orang	-	10 orang	-	-	-	-
			Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama Islam	7 PHBI	7 PHBI	7 PHBI	4 PHBI	57%	11 PHBI	157%
			Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah Jamaah Haji	130 orang	120 orang	130 orang	-	-	-	-

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.16.01.06			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	6 paket peralatan dan perlengkapan kantor	6 paket peralatan dan perlengkapan kantor	6 paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket peralatan dan perlengkapan kantor	62,09	4 paket peralatan dan perlengkapan kantor	66,67
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	60 perjalanan dinas	61 kali perjalanan dinas	44 perjalanan dinas	6 kali perjalanan dinas	66,94	6 kali perjalanan dinas	68,18
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit gedung	1 unit gedung	1 unit gedung	1 unit gedung	91,25	1 unit gedung	50,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit kendaraan dinas	1 unit kendaraan dinas	1 unit kendaraan dinas	1 unit kendaraan dinas	37,85	1 unit kendaraan dinas	50,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana prasarana kantor	30 unit peralatan kantor	30 unit peralatan kantor	30 unit peralatan kantor	20 unit peralatan kantor	13,09	20 unit peralatan kantor	66,67
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana prasarana kantor	220 peralatan dan perlengkapan kantor	220 peralatan dan perlengkapan kantor	220 peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit peralatan dan perlengkapan kantor	100	4 unit peralatan dan perlengkapan kantor	100
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	26,53	3 dokumen	60,00
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	1		Unsur Staf.								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi	100%	100%	100%				
			Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	0,07	-	0,07
			Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	63,22	150 orang	66,67
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen/Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	12,68	6 dokumen	50%
			Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	12,60	-	12,60
			Kegiatan Operasional ULP	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelang	150 paket lelang	139 paket lelang	150 paket lelang	139 paket lelang	56,85	99 paket lelang	56,85

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.17.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 paket	13 paket	9 paket	9 paket	100	22 paket	200,00
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	44 kali	114 kali	40 kali	47 kali	117,5	161 kali	365,91

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik				p6			
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	3 unit	2 unit	3 unit	2 unit	66,67	4,00 unit	133,33
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat	10 unit	27 unit	10 unit	16 unit	160,00	43 unit	430,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	10 jenis	5 jenis	9 jenis	3 jenis	33,33	8 jenis	80,00
			Kegiatan Pengelolaan Rumah Dinas Ketua DPRD	Jumlah rumah dinas yang dikelola	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	2 unit	200,00
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	11 jenis	11 jenis	9 jenis	1 jenis	11,11	12 jenis	109,09
			Kegiatan Review Rencana Pembangunan Gedung DPRD	Jumlah gedung yang dibangun	1 paket	0	0	0	-	-	-
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	5 jenis	4 jenis	4 jenis	0	-	4 jenis	80,00
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	9 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	85,71	12 dokumen	133,33
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	2		Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.								
			Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu							
			Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda	14 perda	13 perda	11 perda	0	-	13 perda	92,86

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing/rapat kerja/dengar pendapat dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama	52 kali	76 kali	50 kali	30 kali	60,00	106 kali	203,85
			Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, rapat pimpinan, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat badan musyarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan legislasi dan panitia khusus	56 kali	45 kali	54 kali	33 kali	61,11	45 kali	80,36
			Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna	14 kali	6 kali	11 kali	7 kali	63,64	13 kali	92,86
			Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses	3 kali	3 kali	3 kali	1 kali	33,33	4 kali	133,33
			Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja dalam satu tahun	13 kali	10 kali	11 kalo	24 kali	218,18	34 kali	261,54
			Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek dan Workshop dalam satu tahun	8 kali	6 kali	8 kali	4 kali	50,00	10 kali	125,00
			Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik	26 kali	97 kali	22 kali	57 kali	259,09	154 kali	592,31
			Kegiatan Fraksi	Jumlah Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi	14 kali	10 kali	11 kali	4 kali	36,36	14 kali	100,00
			Kegiatan Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun	Jumlah dokumen Appraisal	0	0	0		-	0 kali	-

INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.20.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis/tahun	8 jenis	8 jenis/tahun	8 jenis	50	8 jenis/tahun	60
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	57 org/kali/tahun	112 org/kali	57 org/kali/tahun	17 org/kali	29,82	129 org/kali	45
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	1 unit/ 8 jenis yang dibeli/tahun	1 unit/ 8 jenis yang dibeli/tahun	1 unit/ 8 jenis yang dibeli/tahun			1 unit/ 8 jenis yang dibeli/tahun	40
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit kendr roda 4 & 31 pjkl kend roda 2/ tahun	1 unit kend roda 4 & 26 pjkl kend roda 2/tahun	1 unit kend roda 4 & 31 pjkl kend roda 2/tahun	1 unit kend roda 4 & 3 pjkl kend roda 2/tahun	33	1 unit kend roda 4 & 31 pjkl kend roda 2/tahun	46
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	6 jenis/tahun	6 jenis/tahun	6 jenis/tahun	6 jenis/tahun	40	6 jenis/tahun	48
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana yang dipenuhi	13 jenis	9 jenis	2 jenis	2 jenis	100	11 jenis	85
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	50 dokumen	20 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	60	26 dokumen	52
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	3		Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entits yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik							
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa	368 obrik	185 obrik	60 obrik	33 obrik	55	218 obrik	59
			Kegiatan Penanganan Pengaduan/tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Persentase kasus pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
			Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil reviu	25 dokumen	0	7 dokumen	2 dokumen	28	2 dokumen	8
			Kegiatan Probiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan yang telah diprobity audit	35 kegiatan	14 kegiatan	20 kegiatan	8 kegiatan	40	22 kegiatan	62
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimtek dan ber sertifikat							
			Mengikuti Pelatihan Teknis Seminar, Workshop, Bimtek dan Raker	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll	130 org/kali	85 org/kali	30 org/kali	0	0	85 org/kali	65
			Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bintek	220 org/kali	60 org/kali	60 org/kali	40 org/kali	66	100 org/kali	45
			Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pembinaan	450 org	124 org	100 org	0	0	124 org	27
			Program Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Prosedur Pengawas an yang telah dipenuhi dan ditetapkan							
			Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur pengawasan yang tersusun	8 dokumen	0	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	63
			Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Persentase temuan pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti	94%	97,41%	92%	72,92%	79	72,92%	77,57
			Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen LHP Reguler dan Rikusun	640 dokumen	316 dokumen	110 dokumen	111 dokumen	100	427 dokumen	66,7

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase temuan pemeriksaan eksternal ( BPK Ri ) yang telah ditindaklanjuti	84%	77,78%	82%	78,65%	96	78,65%	94
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Entitas yang telah dimonitor dan dievaluasi	33 dokumen	9 dokumen	8 dokumen	0	0	9 dokumen	27
			Program Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP, Nilai Rata-rata pada komponen yang dinilai, Persentase PD yang telah melaksanakan SPI							
			Kegiatan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Jumlah dokumen hasil penilaian PMPRB Kota Madiun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0	0	2 dokumen	40
			Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	SKPD yang diusulkan sebagai WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	4 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	0	0	1 SKPD	25
			Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen laporan verifikasi	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	50
			Kegiatan Evaluasi Sakip PD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi Laporan Kinerjanya	34 SKPD/tahun	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	100	34 SKPD	60
			Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan hasil reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	60
			Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Jumlah SKPD yang dimonitoring	14 SKPD/tahun	14 SKPD	14 SKPD	14 SKPD	100	14 SKPD	60
			Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen Laporan Pengendalian Gratifikasi	6 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0	0	1 dokumen	17

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.21.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%				
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan ,barang dan jasa kantor	360	144	72	60	41,58	204	56,63%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	360	144	72	96	66,7	240	66,68%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%				
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	5	2	1	0	0	2	40,00%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	28	28	28	4	14,42	32	114,42%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sapras kantor yang layak pakai	5	2	1	0	20	2	48,00%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%				
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah paket peralatan	5	2	1	0	0	2	40,00%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%				0,00%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	75	18	9	11	60	29	38,40%
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	4		Perencanaan.								



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	2	2	2				
			Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi TKPK	50	8	4	3	40	11	22,40%
			Kegiatan Penyelenggaraan Portal TKPK	Jumlah Portal	5	2	1	0	20	2	48,00%
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen yang disusun	10	3	2	1	40	4	42,00%
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Koordinasi dan Perjalan Dinas	20	8	4	4	50	12	60,00%
			Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Dokumen yang disusun	5	2	1	2	85	4	74,00%
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1	1	1				
			Penyusunan Ekonomi Dalam Angka	Jumlah Dokumen yang disusun	5	1	1	0	30	1	26,00%
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility	Jumlah koordinasi	5	1	1	0	20	1	24,00%
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SDGs (Sustainable Development Goals)	Jumlah dokumen	5	1	1	0	30	1	26,00%
			Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	3	3	2				
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Dokumen yang disusun	5	1	1	0	35	1	27,00%
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah koordinasi	5	1	1	1	50	2	30,00%
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Dokumen yang disusun	5	1	1	0	40	1	28,00%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Survey Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen yang disusun	5	1	1	1	50	2	30,00%
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen yang disusun	5	1	1	0	20	1	24,00%
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun	12	12	11				
			Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen yang disusun	10	4	2	2	50	6	60,00%
			Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang	Jumlah kegiatan	5	2	1	2	95	4	78,00%
			Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	10	4	2	4	90	8	76,00%
			Kegiatan Bimtek/Workshop Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan	4	1	1	0	20	1	30,00%
			Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi	40	16	8	7	45	23	58,00%
			Verifikasi Pra RKA dan Pra RKPA	Jumlah dokumen yang diferifikasi	10	4	2	1	35	5	54,00%
			Penyusunan KUA-P dan PPAS-P	Jumlah Dokumen yang disusun	10	4	2	1	25	5	50,00%
			Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran	Jumlah kegiatan	20	8	4	3	40	11	56,00%
			Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	210	84	42	67	80	151	72,00%
			Kegiatan Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen renja SKPD	10	4	2	2	50	6	60,00%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPP)	Pengembangan Sistem	20	8	4	0	0	8	40,00%
4	7		Penelitian dan Pengembangan.								
			Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Jumlah Kajian dan Penelitian	3	3	2				
			Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen yang disusun	5	2	1	0	10	2	44,00%
			Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang disusun	5	2	1	0	20	2	48,00%
			Kegiatan Penyusunan Data dan Potensi Kota Madiun	Jumlah Dokumen yang disusun	10	4	2	2	40	6	56,00%
			Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen yang disusun	5	2	1	1	55	3	62,00%
			Kegiatan Koordinasi Bidang Kelitbangan	Jumlah Koordinasi dan Perjalan Dinas	10	2	2	2	100	4	40,00%

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1.19.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	60%	60	100%	100
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	100
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	50 kali	30 kali	65 kali	42 kali	65	42 kali	84
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	40%	40	100%	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	38 kendaraan dinas	38 kendaraan dinas	38 kendaraan dinas	7 kendaraan dinas	18	38 kendaraan dinas	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	11 jenis	8 jenis	8 jenis	7 jenis	88	8 jenis	73
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	0%	0	100%	100
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	4 jenis	7 jenis	4 jenis		0	7 jenis	175
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	50	100%	100
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	7 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	57	6 dokumen	86
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	5		<b>Keuangan.</b>								
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum	100%	100%	100%	50%	50	100%	100

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen		0	2 dokumen	100
			Penyusunan DPA dan DPPA	jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50	3 dokumen	150
			Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum		0	2 produk hukum	100
			Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	100	2 produk hukum	100
			Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum	2 produk hukum		0	2 produk hukum	100
			Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur aplikasi	3 fitur	2 fitur	1 fitur		0	2 fitur	67
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 buku	2 buku	2 buku		0	2 buku	100
			Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Jumlah laporan penerimaan daerah dari SKPD sesuai dengan laporan penerimaan dari kas umum daerah	16 buku	16 buku	16 buku	6 buku	38	16 buku	100
			Pendampingan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengguna aplikasi yang di dampingi	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	100	34 SKPD	100
			Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah peserta bintek	533 orang	345 orang	350 orang		0	345 orang	65
			Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen tentang standar biaya umum dan khusus	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		0	2 dokumen	100
			Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran	Jumlah ringkasan dan penjabaran realisasi SKPD per triwulan	4 data	4 data	4 data	1 data	25	4 data	100
			Penyusunan LKPD Kota Madiun	Jumlah dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	0
			Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah	10 kali	1 kali	10 kali	9 kali	90	9 kali	90
			Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 buku	12 buku	12 buku			12 buku	100

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	Presentase pelayanan perbendaharaan sesuai dengan landasan hukum	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
			Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah dokumen anggaran kas,SPD,SP2D	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	100
			Pengelolaan Administrasi Gaji	Jumlah dokumen administrasi gaji	14 dokumen	18 dokumen	14 dokumen	21 dokumen	150	18 dokumen	129
			Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun	Jumlah laporan rekonsiliasi hibah pemkot madiun	4 buku	3 buku	4 buku	1 buku	25	3 buku	75
			Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan	Jumlah arsip yang dikelola	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	100	34 SKPD	100
			Penyusunan Data-data Pemerintah Pusat	Jumlah data	60 data	63 data	17 data	31 data	182	63 data	105
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
			Penghapusan Aset Daerah	Jumlah aset yang dihapus dari neraca	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	67	3 jenis	100
			Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun	Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikasi	15 bidang tanah	16 bidang tanah	30 bidang tanah		0	16 bidang tanah	107
			Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	2 jenis	1 jenis	2 jenis		0	1 jenis	50
			Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun	Jumlah pengamanan aset tetap tanah dan bangunan milik pemkot	3 pengamanan	2 pengamanan	1 pengamanan	1 pengamanan	100	2 pengamanan	67
			Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Laporan rekonsiliasi aset daerah dan belanja modal daerah	18 buku	18 buku	18 buku	7 buku	39	18 buku	100
			Kegiatan Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah	Jumlah wajib retribusi kekayaan daerah	50 WR	100 WR	50 WR		0	100 WR	200
			Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Jumlah kasus TPTGR	1 kasus	1 kasus	1 kasus		0	1 kasus	100
			Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah	Jumlah aset milik pemkot yang dipelihara	5 gedung	1 gedung	2 gedung	2 gedung	100	1 gedung	20
			Pemeliharaan aplikasi persediaan	Jumlah perbaikan/penambahan fitur aplikasi	2 fitur		1 fitur	1 fitur	100	1 fitur	50

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pendampingan Penatausahaan aset daerah	Jumlah pengguna aplikasi SIM barang daerah yang didampingi	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	34 SKPD	100	34 SKPD	100
			Kegiatan Penyusunan RKBM dan RKPMD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		0	2 dokumen	100
			Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen kajian	1 dokumen	3 dokumen	2 dokumen		0	3 dokumen	300
			Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Jumlah database SIG	1 database	1 database	1 database		0	1 database	100
			Bintek pengelolaan barang milik daerah	Jumlah peserta bintek		373 orang	183 orang		0	373 orang	0

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.19.03			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	8 jenis	8 jenis	8 jenis	2 jenis	25%	10 jenis	125%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	190 kali	190 kali	190 kali	4 kali	2,11%	194 kali	102%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Perbaikan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	200%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	3 Unit	150%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1 Unit	20%	6 Unit	120%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	200%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen SKPD	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	8 Dokumen	22,86%	43 Dokumen	123%
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	5		<b>Keuangan.</b>								
			Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat							
			Kegiatan Pemeliharaan Basis data PBB	Dokumen SPOP, LSPOP dan SismiOP	60000 WP	60000 WP	60000 WP	60000 WP	100%	120000 WP	200%
			Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Daerah	Data Wajib pajak yang akurat	900 WP	900 WP	900 WP	900 WP	100%	1800 WP	200%
			Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	Tempat pemasangan reklame yang siap pakai	98 Frame	98 Frame	22 Frame	22 Frame	100%	120 Frame	122%
			Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terpenuhi							



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	200%
			Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	200%
			Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	0%	1 Paket	100%
			Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak PBB	6000 SPPT 81 DHKP	6000 SPPT 81 DHKP	6000 SPPT 81 DHKP	6000 SPPT 81 DHKP	100%	12000 SPPT 162 DHKP	200%
			Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	Penyelesaian permohonan keringan bagi wjib pajak	1500 Berkas	1500 Berkas	1500 Berkas	375 Berkas	25%	1875 Berkas	125%
			Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	Penyebarluasan informasi perpajakan daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	200%
			Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya	10 LHP	10 LHP	10 LHP	3 LHP	30%	13 LHP	130%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.18.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%				
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis kegiatan	12	12	12	12	1,00	24	2,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas	45	36	20	15	0,75	51	1,13
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	1,00	200%	2,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung	2	2	2	2	1,00	4	2,00
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan	18	18	18	2	0,11	20	1,11
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	jenis barang	11	11	11	11	1,00	22	2,00
			Pemeliharaan dan Biaya Operasional Gedung Diklat	jumlah gedung	1	1	1	1	1,00	2	2,00
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	57,14%	0,57	157,14%	1,57
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis dokumen	37	8	7	4	0,57	12	0,32
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	6		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.								
			Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan	100%	98,90%	100%			98,90%	0,99
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	93%	79,27%	93%	83%	0,89	162,27%	1,74
			Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	jumlah dokumen database kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,00	100%	1,00
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan Aparatur yang Terealisasi	100%		100%	66%	66%	66%	0,66
			Kegiatan Pengadaan CPNS	Jumlah peserta ujian CPNS	5000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah permasalahan kepegawaian yang selesai ditangani	60	52	60	32	0,53	84	1,40
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya	200	321	200	157	0,79	478	2,39
			Program Penataan Aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai	100%	160,48%	100%	60,21%	0,60	220,69%	2,21
			Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah pegawai yang ditempatkan	675	1011	382	230	0,60	1241	1,84
			Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase Fasilitas Kesejahteraan ASN	100%		100%	61,56%	0,62	61,56%	0,62
			Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	jumlah dokumen SK kenaikan pangkat dan SK gaji berkala	3000	3176	2352	1666	0,71	4842	1,61
			Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	jumlah PNS yang menerima SK pensiun	100	182	153	80	0,52	262	2,62
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	100%	97,39%	100%	162,50%	1,63	259,89%	2,60
			Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III	10	8	2	2	1,00	10	1,00
			Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV	10	73	2	2	1,00	75	7,50
			Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	100	70	100	151	1,51	221	2,21

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
							(%)		(%)

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.23.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	35	7	7	7	1	14	0
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	345	69	69	17	0	86	0
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	10	1	1	1	1	2	0
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	112	24	24	0	0	24	0
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	35	7	7	7	1	14	0
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	25	9	9	5	1	14	1
4			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN								
4	8		Kesatuan Bangsa dan Politik.								
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
			Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	21.350	4.270	4.270	3.300	1	7570	0
			Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	3.000	600	600	0	0	600	0

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat	9	9	9	9	9	9	9
			Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	21445	4175	720	300	0	4475	0
			Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta sarasehan	875	175	175	0	0	175	0
			Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan FKUB	45	9	10	5	1	14	0
			Kegiatan Pelestarian Budaya Bangsa	Jumlah peserta pembinaan	1000	200	200	0	0	200	0
			Kegiatan Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop	750	150	150	0	0	150	0
			Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	600	150	150	0	0	150	0
			Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	Jumlah peserta pembinaan	3100	685	800	0	0	685	0
			Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	750	150	150	0	0	150	0
			Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Parpol dan orkesmas yang memahami regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah parpol penerima bantuan	50	10	10	10	1	20	0
			Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan	4.200	0	2.000	1.998	1	1998	0

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Pemuda	Jumlah pengurus LSM/Orkemas yang memperoleh pembinaan	500	100	100	100	1	200	0
			Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM	Jumlah peserta sarasehan	3.000	600	600	300	1	900	0
			Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat	7	7	7	7	7	7	7
			Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah demo	65	1	14	0	0	1	0
			Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas	Jumlah peserta pembinaan	4.510	900	900	300	0	1200	0
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian	Jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	1.125	288	225	190	1	478	0
			Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	Jumlah Rakor Dengan Instansi Terkait	28	12	14	0	0	12	0
			Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	28	12	19	9	0	21	1

KECAMATAN KARTOHARJO

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
1.22.01.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	42,41%	42,41%	142,41%	142,41%
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	45,30%	14 jenis	200%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	16 kali	16 kali	16 kali	2 kali	12,50%	18 kali	112,50%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	54,94%	54,94%	154,94%	154,94%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	38,25%	2 gedung	138,25%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	48,74%	32 unit	148,74%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	66,54%	6 jenis	166,54%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100,00%	200%	100%
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	99,03%	2 paket	199,03%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100%	8 dokumen	100%	5 dokumen	75,27%	16 dokumen	175,27%
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	0,00%	13 dokumen	200%
			Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	200%
			Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	200%
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	9		<b>Kecamatan.</b>								

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masya rakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Jumlah Linmas Aktif	370 orang	370 orang	370 orang	370 orang	100,00%	740 orang	200%
			Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100,00%	200%	200%
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100,00%	200%	200%
			Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan & Kecamatan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	20 kali	200%
			Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
			Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	2 kali	200%
			Sosialisasi Ahli Waris	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ahli waris	1 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	100%
			Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan	100%		100%	44,76%	44,76%	44,76%	44,76%
			Penyelenggaraan Kelurahan Oro-oro Ombo	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	100%		100%	46,37%	46,37%	46,37%	46,37%
			Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Jumlah Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	100%		100%	35,49%	35,49%	35,49%	35,49%
			Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	100%		100%	48,53%	48,53%	48,53%	48,53%
			Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	100%		100%	42,53%	42,53%	42,53%	42,53%
			Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	100%		100%	44,85%	44,85%	44,85%	44,85%
			Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pilangbango	100%		100%	43,12%	43,12%	43,12%	43,12%



1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	100%		100%	44,24%	44,24%	44,24%	44,24%
			Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	100%		100%	48,32%	48,32%	48,32%	48,32%
			Penyelenggaraan Kelurahan kanigoro	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	100%		100%	51,54%	51,54%	51,54%	51,54%

KECAMATAN MANGUHARJO

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.22.02.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	10 paket	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	100%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 kali perjalanan, 1766 bantuan transport	10 paket	36 kali perjalanan, 1766 bantuan transport	10 kali perjalanan, 730 bantuan transport	33%	10 kali perjalanan, 730 bantuan transport	33%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1 gedung	10 paket	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	16 unit	1 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	3 jenis	10 paket	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	100%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
			Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0	0	0	0
			Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	9		<b>Kecamatan.</b>								
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masya rakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Jumlah Linmas Aktif							
			Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	0	0	0	0
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan							
			Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan							
			Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	2 kali	2 kali	1 kali	0	0	0	0
			Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase Terelesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan							
			Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sogaten	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan patihan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan ngegong	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan kidul	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	--------------

KECAMATAN TAMAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RENSTRA Tahun 2017 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017 (Tahun n)		Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)	
								Realisasi Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
									(%)		(%)
1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
0			RUTIN								
0	0		Rutin								
1.22.03.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran							
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	10 paket	7 jenis	2 jenis	21,97%	2 jenis	21,97%
			Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	36 kali	34 kali	36 kali	4 kali	15,64%	4 kali	15,64%
			Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik							
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1 gedung	10 gedung	1 gedung	-	-	-	-
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	2 mobil 14 motor	1 mobil 50 motor	2 mobil 14 motor	1 mobil	23,32%	1 mobil	23,32%
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	4 jenis	10 paket	5 jenis	3 jenis	45,65%	3 jenis	45,65%
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu							
			Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	22,84%	3 dokumen	22,84%
			Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Jumlah dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	21,66%	1 dokumen	21,66%
			Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
4			<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>								
4	9		<b>Kecamatan.</b>								
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masya rakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Jumlah Linmas Aktif							
			Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase kehadiran peserta	428 orang	400 orang	426 orang	95 orang	4,54%	95 orang	4,54%
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan							
			Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	10 kali	100%
			Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan							
			Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	-
			Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan							
			Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Mojorejo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1			2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)
			Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kuncen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Manisrejo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kejuron	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Josenan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Demangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyelenggaraan Kelurahan Taman	Jumlah terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Taman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### **BAB III**

#### **RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi adanya perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2017, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2017 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2017. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam Perubahan RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam perubahan anggaran.

Dalam rangka pencapaian keenam prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per prioritas seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**  
**1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		SKPD Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
0		RUTIN										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1	1	Pendidikan.				25.773.952.000	49.359.946.248	23.585.994.248				
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100%	100%	100.000.000	110.000.000	10.000.000		100%	753.110.000	
		Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov		49 lembaga	49 lembaga	100.000.000	75.000.000	- 25.000.000		49 lembaga	75.000.000	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Sosialisasi dan seleksi Bantuan Beasiswa Mahasiswa			250 Mahasiswa	-	35.000.000	35.000.000	keg.baru	250 Mahasiswa	35.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Dasar		100%	100%	25.673.952.000	49.249.946.248	23.575.994.248		100%	64.056.031.248	
		Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo		18 lembaga	18 lembaga	4.787.761.000	5.145.961.000	358.200.000		18 lembaga	5.074.561.000	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo		20 lembaga	20 lembaga	6.088.083.000	6.451.083.000	363.000.000		20 lembaga	6.451.083.000	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Taman		19 lembaga	19 lembaga	6.229.872.000	6.662.472.000	432.600.000		19 lembaga	6.662.472.000	Dinas Pendidikan
		Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1		1 lembaga	1 lembaga	1.024.392.000	1.318.556.000	294.164.000		1 lembaga	1.318.556.000	Dinas Pendidikan



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	770.026.000	781.178.000	11.152.000		1 lembaga	781.178.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	652.063.000	723.911.000	71.848.000		1 lembaga	723.911.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	993.948.000	1.192.709.000	198.761.000		1 lembaga	1.192.709.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	385.555.000	505.720.000	120.165.000		1 lembaga	505.720.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	556.995.000	646.695.000	89.700.000		1 lembaga	646.695.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	712.490.000	871.027.000	158.537.000		1 lembaga	871.027.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	570.423.000	605.423.000	35.000.000		1 lembaga	605.423.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	494.629.000	675.457.000	180.828.000		1 lembaga	675.457.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	565.200.000	660.645.000	95.445.000		1 lembaga	660.645.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	581.025.000	678.765.000	97.740.000		1 lembaga	678.765.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	531.803.000	583.230.000	51.427.000		1 lembaga	583.230.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	410.195.000	501.761.000	91.566.000		1 lembaga	501.761.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Best Practise Pendidikan Karakter	Jumlah Lembaga		92 lembaga	92 lembaga	319.492.000	500.000.000	180.508.000		92 lembaga	500.000.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK 2016)	Jumlah Lembaga			4 lembaga	-	752.925.655	752.925.655	keg.baru	4 lembaga	752.925.655	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Kartoharjo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	299.288.594	299.288.594		1 lembaga	299.288.594	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Kartoharjo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	81.695.671	81.695.671		1 lembaga	81.695.671	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Kartoharjo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	73.889.635	73.889.635		1 lembaga	73.889.635	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Klegen	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	312.138.849	312.138.849		1 lembaga	312.138.849	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Klegen	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	134.360.079	134.360.079		1 lembaga	134.360.079	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Klegen	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	301.731.928	301.731.928		1 lembaga	301.731.928	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 04 Klegen	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	92.992.450	92.992.450		1 lembaga	92.992.450	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Oro Oro Ombo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	273.714.220	273.714.220		1 lembaga	273.714.220	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Rejomulyo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	94.914.389	94.914.389		1 lembaga	94.914.389	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Rejomulyo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	60.278.230	60.278.230		1 lembaga	60.278.230	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Kanigoro	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	118.945.678	118.945.678		1 lembaga	118.945.678	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Kanigoro	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	142.844.447	142.844.447		1 lembaga	142.844.447	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Kanigoro	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	144.066.817	144.066.817		1 lembaga	144.066.817	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Sukosari	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	51.846.463	51.846.463		1 lembaga	51.846.463	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Pilangbango	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	209.500.491	209.500.491		1 lembaga	209.500.491	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Tawangrejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	137.836.155	137.836.155		1 lembaga	137.836.155	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Tawangrejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	94.563.173	94.563.173		1 lembaga	94.563.173	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Kelun	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	158.370.141	158.370.141		1 lembaga	158.370.141	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Manguharjo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	337.746.339	337.746.339		1 lembaga	337.746.339	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	266.608.673	266.608.673		1 lembaga	266.608.673	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Nambangan Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	110.329.468	110.329.468		1 lembaga	110.329.468	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Madiun Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	125.123.026	125.123.026		1 lembaga	125.123.026	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Madiun Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	136.903.387	136.903.387		1 lembaga	136.903.387	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Madiun Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	428.891.666	428.891.666		1 lembaga	428.891.666	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 04 Madiun Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	304.419.921	304.419.921		1 lembaga	304.419.921	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 05 Madiun Lor	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	354.299.357	354.299.357		1 lembaga	354.299.357	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	141.169.681	141.169.681		1 lembaga	141.169.681	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	112.986.616	112.986.616		1 lembaga	112.986.616	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	275.030.803	275.030.803		1 lembaga	275.030.803	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 04 Nambangan Kidul	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	142.772.203	142.772.203		1 lembaga	142.772.203	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Winongo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	287.753.948	287.753.948		1 lembaga	287.753.948	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Winongo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	73.717.399	73.717.399		1 lembaga	73.717.399	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Ngegong	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	125.840.397	125.840.397		1 lembaga	125.840.397	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Patihan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	305.181.285	305.181.285		1 lembaga	305.181.285	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Pangongangan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	109.074.783	109.074.783		1 lembaga	109.074.783	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Pangongangan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	276.061.491	276.061.491		1 lembaga	276.061.491	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Sogaten	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	158.797.904	158.797.904		1 lembaga	158.797.904	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Taman	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	391.314.108	391.314.108		1 lembaga	391.314.108	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Taman	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	49.844.539	49.844.539		1 lembaga	49.844.539	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Taman	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	94.130.101	94.130.101		1 lembaga	94.130.101	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Pandean	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	306.856.877	306.856.877		1 lembaga	306.856.877	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Pandean	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	259.055.263	259.055.263		1 lembaga	259.055.263	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Banjarejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	387.647.249	387.647.249		1 lembaga	387.647.249	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Mojorejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	127.772.832	127.772.832		1 lembaga	127.772.832	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Mojorejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	455.543.142	455.543.142		1 lembaga	455.543.142	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Manisrejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	311.702.193	311.702.193		1 lembaga	311.702.193	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Manisrejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	270.979.130	270.979.130		1 lembaga	270.979.130	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Manisrejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	149.312.864	149.312.864		1 lembaga	149.312.864	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 04 Manisrejo	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	217.889.494	217.889.494		1 lembaga	217.889.494	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Demangan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	135.308.468	135.308.468		1 lembaga	135.308.468	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Demangan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	151.263.562	151.263.562		1 lembaga	151.263.562	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 01 Josenan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	155.193.076	155.193.076		1 lembaga	155.193.076	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 02 Josenan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	153.513.445	153.513.445		1 lembaga	153.513.445	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN 03 Josenan	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	93.837.729	93.837.729		1 lembaga	93.837.729	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan BOS Pada SDN Kejuron	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	72.892.336	72.892.336		1 lembaga	72.892.336	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS Pada SDN Kuncen	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	76.056.037	76.056.037		1 lembaga	76.056.037	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 1	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	764.961.074	764.961.074		1 lembaga	764.961.074	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 2	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	686.539.471	686.539.471		1 lembaga	686.539.471	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 3	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	574.155.055	574.155.055		1 lembaga	574.155.055	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 4	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	900.813.047	900.813.047		1 lembaga	900.813.047	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 5	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	534.778.204	534.778.204		1 lembaga	534.778.204	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 6	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	677.438.225	677.438.225		1 lembaga	677.438.225	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 7	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	775.007.807	775.007.807		1 lembaga	775.007.807	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 8	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	552.671.936	552.671.936		1 lembaga	552.671.936	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 9	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	561.327.409	561.327.409		1 lembaga	561.327.409	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 10	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	577.026.686	577.026.686		1 lembaga	577.026.686	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 11	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	663.704.131	663.704.131		1 lembaga	663.704.131	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 12	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	755.246.765	755.246.765		1 lembaga	755.246.765	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 13	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	721.823.896	721.823.896		1 lembaga	721.823.896	Dinas Pendidikan
	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 14	Jumlah Lembaga			1 lembaga	-	531.135.688	531.135.688		1 lembaga	531.135.688	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
2	17	Perpustakaan.			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
							244.125.000	235.970.000	- 8.155.000				
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan, persentase pengunjung perpustakaan		25.900 org, 14,6%	25.900 org, 14,6%	244.125.000	235.970.000	- 8.155.000		25.900 org, 14,6%	798.740.000	
		Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Pustaka yg di kelola		1500 eksemplar	1500 eksemplar	20.000.000	29.375.000	9.375.000		1500 eksemplar	29.375.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Frekwensi (Kali)		48 kali	48 kali	135.925.000	156.125.000	20.200.000		48 kali	156.125.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan		71 perpustakaan	71 perpustakaan	88.200.000	50.470.000	- 37.730.000		71 perpustakaan	88.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN							26.018.077.000	49.595.916.248	23.577.839.248				

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		SKPD Penanggung Jawab	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	2	Kesehatan.					86.075.181.000	99.777.780.275	13.702.599.275				
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase upaya kesehatan masyarakat		55%	55%	10.786.874.000	8.817.811.000	- 1.969.063.000		55%	14.993.642.000	
		Kegiatan Upaya Kesehatan Reproduksi	angka kehamilan pada usia remaja (15-19 th)		23/1000	23/1000	528.406.000	524.606.000	- 3.800.000		23/1000	524.606.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	Prosentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan		55%	55%	1.606.688.000	1.356.478.000	- 250.210.000		55%	1.356.478.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Prosentase TTU dan TPM sehat		83%	83%	496.266.000	383.191.000	- 113.075.000		83%	383.191.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	persentase kelurahan bersanitasi total berbasis masyarakat (STBM)		22,22%	22,22%	808.923.000	724.773.000	- 84.150.000		22,22%	724.773.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman	Prosentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat		82%	82%	114.704.000	127.209.000	12.505.000		82%	127.209.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
		Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	persentase sekolah sehat		82,23%	82%	792.538.000	538.829.000	- 253.709.000		82%	538.829.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali		sebelum 70%	sesudah 70%	sebelum 3.201.282.000	sesudah 1.986.987.000	selisih (+/-) - 1.214.295.000		70%	1.986.987.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI		67%	67%	450.903.000	456.938.000	6.035.000		67%	456.938.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita	persentase terbentuknya posyandu PURI		96%	96%	1.751.225.000	1.687.644.000	- 63.581.000		96%	1.687.644.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target		90,67%	90,67%	430.507.000	423.949.000	- 6.558.000		90,67%	423.949.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target		90%	90%	265.663.000	277.263.000	11.600.000		90%	277.263.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target		93,76%	93,76%	339.769.000	329.944.000	- 9.825.000		93,76%	329.944.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah Kasus pada KLB		16 kasus	16 kasus	1.188.478.000	1.142.238.000	- 46.240.000		16 kasus	2.170.160.000	
	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka Kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)		60/100.000 penduduk	60/100.000 penduduk	908.847.000	864.347.000	- 44.500.000		60/100.000 penduduk	864.347.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Prosentase penemuan kasus HIV		3,5%	3,5%	279.631.000	277.891.000	- 1.740.000		3,5%	277.891.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	persentase fasilitas pelayanan kesehatan ter akreditasi		40%	40%	598.473.000	480.452.000	- 118.021.000		40%	36.857.318.000	



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan	Prosentase penyediaan tenaga P3K sesuai kebutuhan		100%	100%	332.976.000	265.614.000	- 67.362.000		100%	265.614.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus	Prosentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV		100%	100%	265.497.000	214.838.000	- 50.659.000		100%	214.838.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	persentase penanganan pengaduan masyarakat / Persentase Pencapaian Kinerja BLUD		80% / 100%	80% / 100%	73.501.356.000	79.908.519.275	6.407.163.275		80%	9.108.519.275	
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%	80%	1.014.923.000	1.013.510.000	- 1.413.000		80%	1.013.510.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%	80%	1.384.624.000	1.545.200.000	160.576.000		80%	1.545.200.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%	80%	1.316.081.000	1.475.399.275	159.318.275		80%	1.475.399.275	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo	persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%	80%	1.574.957.000	1.855.817.000	280.860.000		80%	1.855.817.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%	80%	1.511.911.000	1.411.638.000	- 100.273.000		80%	1.411.638.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo.	persentase penanganan pengaduan masyarakat		80%	80%	1.698.860.000	1.806.955.000	108.095.000		80%	1.806.955.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	Jenis barang dan jasa yang disediakan	RSUD Kota Madiun	43 Jenis	43 Jenis	65.000.000.000	70.800.000.000	5.800.000.000		43 Jenis	70.800.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standart	RSUD Kota Madiun	86,74%	86,74%	-	9.428.760.000	9.428.760.000		86,74%	11.481.945.000	
	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	0	77 jenis	-	6.821.945.000	6.821.945.000	keg.baru	77 jenis	6.821.945.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang di rehab	RSUD Kota Madiun	0	1 paket	-	239.115.000	239.115.000	keg.baru	77 jenis	239.115.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	0	17 jenis	-	2.367.700.000	2.367.700.000	keg.baru	17 jenis	2.367.700.000	Rumah Sakit Umum Daerah
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
2	8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.				2.210.529.000	1.433.454.000	- 777.075.000				
	Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	persentase peserta KB aktif		78,5%	78,5%	2.210.529.000	1.433.454.000	- 777.075.000		78,5%	3.380.855.000	
	Kegiatan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berencana dan Kesehatan	jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi		1 kelurahan	1 kelurahan	442.547.000	-	- 442.547.000		1 kelurahan	-	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	jumlah pertemuan yang dilaksanakan		5 kali	5 kali	106.239.000	290.227.000	183.988.000		5 kali	290.227.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga	jumlah dokumen profil		1 Dokumen	1 Dokumen	134.386.000	-	- 134.386.000		1 Dokumen	-	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB	persentase pembentukan kelompok KB pria		89%	89%	100.537.000	47.876.000	- 52.661.000		89%	47.876.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS, IMP dan Keluarga Harmonis	jumlah lomba yang dilaksanakan		6 lomba	6 lomba	413.500.000	213.363.000	- 200.137.000		6 lomba	213.363.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS	persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB		1,30%	1,30%	181.130.000	141.630.000	- 39.500.000		1,30%	141.630.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pembinaan Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK), Sub.PPKBK dan Keluarga Kecil Bahagia dan Kesejahteraan (KKBS)-RT	jumlah pembinaan yang dilaksanakan		4 kali	2 kali	607.350.000	592.365.000	- 14.985.000		2 kali	592.365.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan	persentase laporan yang lengkap dan tepat waktu		100%	100%	140.000.000	125.350.000	- 14.650.000		100%	125.350.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS	jumlah dokumen laporan SPM		1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	-	- 44.000.000		1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Sosialisasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	jumlah pertemuan yang dilaksanakan		2 kegiatan	2 kegiatan	40.840.000	22.643.000	- 18.197.000		2 kegiatan	22.643.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN						88.285.710.000	101.211.234.275	12.925.524.275				

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		SKPD Penanggung Jawab	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
2	1	Tenaga Kerja.					813.178.000	2.283.034.000	1.469.856.000				
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Pencari Kerja yang ditempatkan		73%	73%	653.048.000	2.104.604.000	1.451.556.000		595%	2.377.688.000	
		Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan		180 orang	260 orang	653.048.000	1.404.604.000	751.556.000	usulan dari Musrenbang	260 orang	1.404.604.000	Dinas Tenaga Kerja
		Kegiatan Updating Data Pengangguran	jumlah keluarga			55.000 KK	-	700.000.000	700.000.000		2 kegiatan	206.360.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja yang mendapat jaminan sosial		1.500, 90 dan 86%	1.500, 90 dan 86%	160.130.000	178.430.000	18.300.000		1.500, 90 dan 86%	792.037.000	
		Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah pembinaan hubungan industrial dan jamsostek		1 paket	1 paket	81.470.000	89.770.000	8.300.000	dukungan anggaran untuk akomodasi panitia dan peserta	1 paket	89.770.000	Dinas Tenaga Kerja
		Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	Jumlah pendataan wajib lapor ketenagakerjaan dan kepatuhan pengusahaan terhadap pekerja		100 Perusahaan	100 Perusahaan	78.660.000	88.660.000	10.000.000		100 Perusahaan	88.660.000	Dinas Tenaga Kerja

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
2	10	Komunikasi dan Informatika.			sebelum	sesudah	sebelum 3.240.469.000	sesudah 10.498.728.000	selisih (+/-) 7.258.259.000				
		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase Informasi Publik Pemda yang di publikasikan		100%	100%	2.658.769.000	9.043.569.000	6.384.800.000		2.079 kali, 1 media, 3 jenis	9.349.569.000	
		Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	Jumlah jam siaran		18 jam operasi	18 jam operasi	190.000.000	251.500.000	61.500.000		18 jam operasi	190.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah dokumentasi dan informasi berbagai kebijakan pemerintah		400 kali	400 kali	1.850.000.000	2.050.000.000	200.000.000	Penambahan belanja jasa publikasi karena bertambahnya kegiatan pemerintah yang harus dipublikasikan	400 kali	2.050.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Pekan Kim dan Pembinaan KIM		8 kali	8 kali	335.000.000	680.000.000	345.000.000		8 kali	335.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kegiatan Optimalisasi PPID	Jumlah Optimaslisasi PPID		888 kali	888 kali	177.493.000	300.000.000	122.507.000	Bertambah karena perlunya Monev dalam rangka memenuhi Inpres No.10 th.2016 ttg RADPPK	888 kali	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota	Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan pemerintah Kota		528 kali	528 kali	106.276.000	282.500.000	176.224.000	Bertambahnya kegiatan pemerintah yang harus diliput dan didokumentasikan baik dalam daerah maupun luar daerah	528 kali	230.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat (DBH-CHT)	Jumlah media sosialisasi cukai			3 Jenis Sarpras (Videotron, Radio, dan TV Online)	-	5.479.569.000	5.479.569.000	Kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	3 Jenis Sarpras (Videotron, Radio, dan TV Online)	5.479.569.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan teknologi Informasi		3 (tiga) user : pemerintah, swasta, masyarakat	3 (tiga) user : pemerintah, swasta, masyarakat	581.700.000	1.455.159.000	873.459.000		3 (tiga), 66, 3 jenis	1.544.367.000	
	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah jenis pelatihan		3 Jenis	3 Jenis	50.000.000	160.586.000	110.586.000	Penambahan pelatihan guna menambah kompetensi TIK pada SDM OPD yang belum memenuhi standart	3 Jenis	160.586.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	Jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara		102 Client + 138 titik CCTV	102 Client + 138 titik CCTV	473.000.000	769.873.000	296.873.000	Penambahan perangkat suku cadang jaringan internet dan intranet untuk perindahan OPD	102 Client + 138 titik CCTV	769.873.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	Persentase uptime server dan koneksi jaringan LPSE		98%	98%	58.700.000	174.426.000	115.726.000	Bertambah pelatihn untuk 120 KPA, penyedia dan 120 operator KPA	98%	174.426.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan Implementasi Aplikasi e-Gov	Tersedianya aplikasi e-kinerja untuk pelaksanaan remunerasi 2018			34 OPD	-	350.274.000	350.274.000	Implementasi aplikasi e-kinerja	34 OPD	350.274.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.				731.381.000	1.048.770.000	317.389.000				

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Persentase Penumbuhan jumlah Usaha Mikro	0,004	0,004	731.381.000	1.048.770.000	317.389.000		10 kali	1.722.199.000	
		Kegiatan Pameran Produk UMKM di Tingkat Nasional	Jumlah keikutsertaan Pameran	3 kali	4 kali	212.744.000	307.424.000	94.680.000		4 kali	307.424.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda	Jumlah Pameran yang diikuti	3 kali	4 kali	196.728.000	344.765.000	148.037.000		4 kali	344.765.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun	Jumlah Data dan Jenis Pemberdayaan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	147.750.000	171.115.000	23.365.000		3 kegiatan	147.750.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	Jumlah Kegiatan Temu kerja	2 kegiatan	3 kegiatan	174.159.000	225.466.000	51.307.000		3 kegiatan	225.466.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	12	Penanaman Modal.				154.567.000	456.967.000	302.400.000				

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
		Program Peningkatan [ dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai Investasi	310 M	310 M	43.300.000	185.700.000	142.400.000		310 M	283.713.000	
		Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	Jumlah Dokumen Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	43.300.000	185.700.000	142.400.000		1 Dokumen	103.300.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasio Izin yang Diterbitkan	94%	94%	111.267.000	271.267.000	160.000.000		94%	356.267.000	
		Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Perizinan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, keterampilan dan profesionalisme SDM Perijinan	24 orang	24 orang	111.267.000	271.267.000	160.000.000		24 orang	111.267.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	14	Statistik.				-	-	-				
2	15	Persandian.				-	-	-				
2	18	Kearsipan.				46.675.000	27.432.000	- 19.243.000				
		Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola	42.671 berkas	42.671 berkas	46.675.000	27.432.000	- 19.243.000		35% (51 unit)	465.860.000	
		Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan	31 Unit	31 Unit	46.675.000	27.432.000	- 19.243.000		31 Unit	46.675.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	6	Perdagangan.				2.739.908.000	3.107.539.000	367.631.000				



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Ekspor Perdagangan		15%	15%	259.928.000	321.114.000	61.186.000		7 kali	368.168.000	
	Kegiatan Pameran Dagang	Jumlah keikutsertaan Pameran		3 kali	3 kali	160.088.000	204.160.000	44.072.000		3 kali	204.160.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	Jumlah Partisipasi dalam pameran Pembangunan		4 kali	4 kali	99.840.000	116.954.000	17.114.000		4 kali	116.954.000	Dinas Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	persentase Bina Kelompok Perdagangan/Usaha Informal		75%	75%	993.380.000	1.092.825.000	99.445.000		0%	1.197.464.000	
	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan barang yang beredar dan ijin perdagangan	Jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan		6 kali	6 kali	93.380.000	107.500.000	14.120.000		6 kali	107.500.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (UTTP)		1 kali	1 kali	900.000.000	985.325.000	85.325.000		1 kali	985.325.000	Dinas Perdagangan
	Program Pembinaan PKL dan Asongan	Persentase PKL yang di bina		75%	75%	158.000.000	-	- 158.000.000		75%	295.525.000	
	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL Kota Madiun	Jumlah PKL yang tertata		1 kali	0	158.000.000	-	- 158.000.000		0	-	Dinas Perdagangan
	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Omset Pasar Tradisional		435.424.000.000	435.424.000.000	1.328.600.000	1.693.600.000	365.000.000		0	4.082.078.000	
	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar yang dikembangkan sarana dan prasarana pasarnya		17 Pasar	17 Pasar	1.328.600.000	1.693.600.000	365.000.000		17 Pasar	1.693.600.000	Dinas Perdagangan
3	7	Perindustrian.				294.062.000	1.098.513.000	804.451.000				
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM dan IRT		283 Unit	283 Unit	294.062.000	1.098.513.000	804.451.000		283 Unit	1.509.004.000	
	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan		20 orang	15 orang	38.281.000	89.171.000	50.890.000	dukungan akomodasi dan transport peserta	15 orang	89.171.000	Dinas Tenaga Kerja

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Fasilitas Pameran Industri Mikro, Kecil dan Menengah tingkat regional di Surabaya (PPUD)	Jumlah Partisipasi dalam pameran		1 kali	1 kali	78.647.000	109.337.000	30.690.000	dukungan anggaran untuk perjalanan dinas peserta	1 kali	109.337.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitas Uji Nilai Gizi Produk Makanan Olahan	Jumlah Peserta Sosialisasi		20 orang	20 orang	45.330.000	53.500.000	8.170.000	dukungan anggaran untuk perjalanan dinas uji lab di bogor	20 orang	53.500.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Pangan serta Fasilitas Ijin Teknis	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan		1 kali	1 kali	43.648.000	50.148.000	6.500.000	dukungan anggaran untuk transport peserta	1 kali	50.148.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan		1 kali	1 kali	62.116.000	94.600.000	32.484.000	dukungan anggaran untuk akomodasi peserta dan perjalanan dinas panitia	1 kali	94.600.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies (DBH-CHT)	frekuensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin dalam satu tahun		4 kali	4 kali	26.040.000	38.757.000	12.717.000	dukungan anggaran untuk perjalanan dinas uji lab di jember	4 kali	38.757.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui pengembangan desain furniture bagi IKM/IRT Kota Madiun (DBH-CHT)	jumlah pelatihan ketrampilan kerja			1 kali	-	142.000.000	142.000.000	usulan dari musrenbang (keg. Baru)	1 kali	142.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Fasilitas Promosi Industri Kecil Menengah Kota Madiun(DBH-CHT)	jumlah pelatihan ketrampilan kerja			2 kali	-	371.000.000	371.000.000	usulan dari musrenbang (keg. Baru)	2 kali	371.000.000	Dinas Tenaga Kerja

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan pengembangan desain dan Motif Batik bagi IKM Kota Madiun (DBH-CHT)	jumlah pelatihan ketrampilan kerja		sebelum	sesudah 3 kali	sebelum -	sesudah 150.000.000	selisih (+/-) 150.000.000	usulan dari musrenbang (keg. Baru)	3 kali	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
3	8	Transmigrasi.				-	-	-				
4		FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN										
4	1	Unsur Staf.				350.000.000	600.000.000	250.000.000				
		Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas ekonomi		0	350.000.000	600.000.000	250.000.000		0	817.650.000	
		Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (DBH-CHT)	Jumlah informasi yang disampaikan	3 macam penyampaian informasi	3 macam penyampaian informasi	350.000.000	600.000.000	250.000.000		3 macam penyampaian informasi	600.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN						8.370.240.000	19.120.983.000	10.750.743.000				

#### 4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		SKPD Penanggung Jawab
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	6	Sosial.					2.414.371.000	2.564.977.000	150.606.000				
		Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan PMKS		85,98%	85,98%	2.414.371.000	2.564.977.000	150.606.000		10 panti	3.421.957.000	
		Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Bimbingan motivasi kepada keluarga miskin		150 orang	150 orang	138.484.000	160.049.000	21.565.000		150 orang	160.049.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Bagi PMKS	Bimbingan motovasi pelayanan dan bantuan sosial		320 orang	320 orang	361.580.000	375.080.000	13.500.000		320 orang	375.080.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial..	berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKS		1117 orang	1117 orang	288.600.000	296.120.000	7.520.000		1117 orang	296.120.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah kesiap siagaan penanganan bencana		23 orang	23 orang	142.163.000	149.663.000	7.500.000		23 orang	149.663.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
		Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Jumlah Kesejahteraan Lanjut Usia dan tertib administrasi Karang Werda dan lanjut usia		sebelum 27 kelompok	sesudah 27 kelompok	sebelum 1.298.765.000	sesudah 1.358.165.000	selisih (+/-) 59.400.000		27 kelompok	1.308.165.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	Tersedianya data fakir miskin kota madiun		27 kelurahan	27 kelurahan	184.779.000	225.900.000	41.121.000		27 kelurahan	225.900.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
2	3	Pangan.					10.000.000.000	4.856.910.000	- 5.143.090.000				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita		90,25	90,25	10.000.000.000	4.856.910.000	- 5.143.090.000		ada	6.061.770.000	
		Kegiatan Subsidi Pangan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah	Jumlah RTS-PM		3200 raskinda	2844 raskinda	10.000.000.000	4.856.910.000	- 5.143.090.000		2844 raskinda	4.856.910.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	1	Kelautan dan Perikanan.					-	-	-				
3	3	Pertanian.					2.688.042.000	2.383.148.000	- 304.894.000				
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas tanaman pangan per satuan luas (ton/ha)		7,06	7,06	2.575.142.000	2.262.095.000	- 313.047.000		18.500 ton	2.779.245.000	
		Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jumlah infrastruktur pendukung pertanian		1 paket JUT 2.025 m2	1 paket JUT 2.025 m2	2.152.804.000	1.809.607.000	- 343.197.000		1 paket JUT 2.025 m2	1.809.607.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN penerima PUAP		6 gapoktan	6 gapoktan	73.000.000	77.500.000	4.500.000		6 gapoktan	77.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN Kota Madiun		sebelum 15 gapoktan	sesudah 15 gapoktan	sebelum 349.338.000	sesudah 374.988.000	selisih (+/-) 25.650.000		15 gapoktan	374.988.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Kasus Penyakit Hewan		60 kasus	60 kasus	112.900.000	121.053.000	8.153.000		1.500 ton dan 60 kasus	259.443.000	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang mendapat pengobatan&pemeriksaan kesehatan		kambing/domba 700 ekor, sapi 175 ekor, dan vaksinasi ayam, pemeriksaan hewan qurban	kambing/domba 700 ekor, sapi 175 ekor, dan vaksinasi ayam, pemeriksaan hewan qurban	112.900.000	121.053.000	8.153.000		kambing/domba 700 ekor, sapi 175 ekor, dan vaksinasi ayam, pemeriksaan hewan qurban	121.053.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN						15.102.413.000	9.805.035.000	- 5.297.378.000				

5. Peningkatan Pelayanan Publik

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		SKPD Penanggung Jawab	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.					5.801.966.000	6.467.246.000	665.280.000				
		Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		3,6	3,6	26.586.000	70.436.000	43.850.000		3,6	601.586.000	
		Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP		24 orang	24 orang	26.586.000	70.436.000	43.850.000		24 orang	104.586.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentrmanan Masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Perhari		6 kali	6 kali	155.000.000	270.485.000	115.485.000		6 kali	1.055.615.000	
		Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Jumlah Giat Pemerintah Pengamanan		240 kegiatan	336 kegiatan	155.000.000	270.485.000	115.485.000		336 kegiatan	270.485.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		100%	100%	65.000.000	89.825.000	24.825.000		100%	89.825.000	
		Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal		100%	100%	65.000.000	89.825.000	24.825.000		100%	89.825.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		100%	100%	2.615.880.000	2.335.250.000	- 280.630.000		100%	2.335.250.000	

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana ( Kebakaran )		sebelum 150 orang	sesudah 150 orang	sebelum 208.000.000	sesudah 210.250.000	selisih (+/-) 2.250.000		150 orang	210.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (DAMKAR), Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Peserta yang mengikuti Apel Siaga HUT Damkar, Rakornas, dan Rakorda Penanggulangan Bencana		67 orang	67 orang	102.880.000	-	- 102.880.000		67 orang	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana / korban bencana ( Pengadaan Hydran )		1 paket	2 unit	2.305.000.000	2.125.000.000	- 180.000.000		2 unit	2.125.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota		57	57	2.245.000.000	2.988.750.000	743.750.000		57	3.552.120.000	
	Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Kapasitas anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas perlindungan masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Anggota Satlinmas		1300 orang	1300 orang	2.245.000.000	2.803.950.000	558.950.000		1300 orang	2.842.950.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Pengukuhan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota Satlinmas yang dikukuhkan		0	1300 orang	-	184.800.000	184.800.000		1300 orang	147.350.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		100%	100%	694.500.000	712.500.000	18.000.000		100%	1.318.500.000	
	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana		1.095 shif	1.095 shif	694.500.000	712.500.000	18.000.000		1.095 shif	712.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											



1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		11,29	1129%	1.744.244.000	1.660.286.000	- 83.958.000		1129%	2.963.780.000	
		Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS	Jumlah Kelurahan kegiatan Evaluasi		1 kelurahan	1 kelurahan	325.625.000	304.807.000	- 20.818.000		1 kelurahan	304.807.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Pelatihan		6 kali	6 kali	612.499.000	630.119.000	17.620.000		6 kali	630.119.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Pemantapan Focal Point dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan Pemantapan Focal Point		1 paket	1 paket	163.880.000	177.620.000	13.740.000		1 paket	177.620.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas	Jumlah kegiatan Penguatan lembaga		30 lembaga	30 lembaga	161.500.000	198.555.000	37.055.000		30 lembaga	198.555.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Kegiatan lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan		3 peserta	3 peserta	63.500.000	-	- 63.500.000		3 peserta	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kegiatan Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik	Jumlah Pencanangan		4 kelurahan	4 kelurahan	417.240.000	349.185.000	- 68.055.000		4 kelurahan	349.185.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		100%	100%	180.100.000	317.040.000	136.940.000		100%	863.385.000	

1	2		3	4	5		6			7	8	9	10
		Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kota Laya Anak		sebelum 6 kali	sesudah 6 kali	sebelum 180.100.000	sesudah 317.040.000	selisih (+/-) 136.940.000		6 kali	275.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.					733.067.000	730.069.000	- 2.998.000				
		Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil		83,8	83,8	546.791.000	209.472.000	- 337.319.000		0,838	1.140.459.000	
		Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah Blanko		2 jenis	2 jenis	546.791.000	209.472.000	- 337.319.000		2 jenis	209.472.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan		83,8	83,8	186.276.000	520.597.000	334.321.000		0,838	1.412.570.000	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)	Indeks Kepuasan Masyarakat		2 jenis	2 jenis	186.276.000	520.597.000	334.321.000		2 jenis	520.597.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	Kepemudaan dan Olah Raga.					1.152.104.000	1.004.548.750	- 147.555.250				
		Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Perlombaan Olah Raga yang diselenggarakan,jumlah kegitaan peningkatan kesegaran jasmani,jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah sarana prasarana olah raga yang diadakan		3 paket, 4 paket, 3 paket, 3 cabor	3 paket, 4 paket, 3 paket, 3 cabor	1.152.104.000	1.004.548.750	- 147.555.250		5 prestasi, 18.400 peserta	3.916.588.750	
		Lomba/Pertandingan dan Pembinaan Prestasi Olah Raga Antar Pelajar SD,SMP,SM Tingkat Kota	Jumlah Cabang Olah Raga		14 Cabor	14 Cabor	1.035.604.000	912.400.000	- 123.204.000		14 Cabor	912.400.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Mental Spiritual Pemuda		200 orang	200 orang	116.500.000	92.148.750	- 24.351.250		200 orang	92.148.750	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
2	16	Kebudayaan.					520.000.000	714.085.000	194.085.000				
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kesenian yang dilombakan, jumlah festival seni yang diselenggarakan, jumlah fasilitasi keragaman budaya		4 paket, 13 paket, 3 paket	4 paket, 13 paket, 3 paket	520.000.000	714.085.000	194.085.000		12 paket, 100%, 7 paket, 1 group, 5 paket	5.852.223.000	
		Pentas Seni Secara Periodik, Car Free Day dan Car Free Night	Jumlah Paket		3 paket	3 paket	520.000.000	714.085.000	194.085.000		3 paket	714.085.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2	Pariwisata.					1.080.062.000	2.016.207.000	936.145.000				
		Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan		9 kegiatan	9 kegiatan	1.080.062.000	2.016.207.000	936.145.000		3 kali	2.098.713.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisata	Jumlah Peserta Pemberdayaan Generasi Muda		75 orang	75 orang	397.289.000	620.452.000	223.163.000		75 orang	620.452.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri (hari Jadi Propinsi)	Jumlah Partisipasi		2 kegiatan	2 kegiatan	177.790.000	377.790.000	200.000.000				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		1 kegiatan	1 kegiatan	134.669.000	335.651.000	200.982.000		1 kegiatan	307.743.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)	Jumlah keikutsertaan Pameran		1 kegiatan	1 kegiatan	168.814.000	468.814.000	300.000.000		1 kegiatan	368.814.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Gebyar Batik dan Fashion Show Batik 2016	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar batik dan Fashion Show		sebelum 100 orang	sesudah 100 orang	sebelum 201.500.000	sesudah 213.500.000	selisih (+/-) 12.000.000		100 orang	213.500.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
4	<b>FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>											
4	1	<b>Unsur Staf.</b>				<b>12.144.393.000</b>	<b>14.202.394.000</b>	<b>2.058.001.000</b>				
	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Daerah Lain		4 kali	4 kali	624.364.000	583.851.000	- 40.513.000		4 kali	806.459.000	
	Kegiatan Fasilitas/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	Rakernas Apeksi, Muskomwil Apeksi dan JKPI		3 kali	3 kali	521.744.000	496.463.000	- 25.281.000		3 kali	496.463.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	PAWITAN DIROGO		1 kali	1 kali	102.620.000	87.388.000	- 15.232.000		1 kali	87.388.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda		5 kali/1.285 buah/1.355 orang	5 kali/1.285 buah/1.355 orang	1.219.300.000	1.664.268.000	444.968.000		5 kali/1.285 buah/1.355 orang	2.041.402.000	
	Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan	Kegiatan bintek administrasi kelurahan		150 orang	150 orang	183.300.000	148.900.000	- 34.400.000		150 orang	148.900.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	jumlah rapat koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah		8 kali	8 kali	261.000.000	241.838.000	- 19.162.000		8 kali	241.838.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	jumlah kunjungan kerja Walikota ke Kelurahan		sebelum 27 kelurahan	sesudah 27 kelurahan	sebelum 775.000.000	sesudah 1.273.530.000	selisih (+/-) 498.530.000		27 kelurahan	465.530.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi ketatalaksanaan		75%	75%	-	75.000.000	75.000.000		75%	891.866.000	
	Kegiatan Penyusunan Pedoman tentang pakaian Dinas	Jumlah Dokumen		0	1 dokumen	-	75.000.000	75.000.000	Keg. Baru	1 dokumen	75.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan nilai akuntabilitas baik		80%	80%	367.780.000	650.000.000	282.220.000		80%	1.360.634.000	
	Kegiatan Pengembangan E-SAKIP	Pengembangan Sistem		1 paket	-	125.000.000	-	- 125.000.000		-	-	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah Dokumen		28 OPD	28 OPD	242.780.000	400.000.000	157.220.000		28 OPD	400.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kegiatan Penyusunan Desain Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen		0	1 dokumen	-	250.000.000	250.000.000	Keg. Baru	1 dokumen	250.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		536 dan 1 pelatihan	536 dan 1 pelatihan	2.487.314.000	2.484.314.000	- 3.000.000		47 kali	2.748.314.000	
	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	Jumlah Kegiatan		537 kali	537 kali	2.487.314.000	2.484.314.000	- 3.000.000		537 kali	2.484.314.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik		100%	100%	2.058.270.000	2.927.709.000	869.439.000		100%	3.027.709.000	
	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda/perda, dok. kompilasi dan sosialisasi		3 Jenis	3 Jenis	1.080.000.000	1.616.425.000	536.425.000		3 Jenis	1.616.425.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah himpunan lemb. daerah, jdih, lemb. lepas perda dan buku peraturan perundang-undangan		4 Jenis	4 Jenis	255.726.000	404.126.000	148.400.000		4 Jenis	404.126.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa hukum		3 Jenis	3 Jenis	722.544.000	907.158.000	184.614.000		3 Jenis	907.158.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi			0	4.442.285.000	4.711.385.000	269.100.000		0	4.711.385.000	
	Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ	Jumlah Peserta Yang Dikirim		10 orang	15 orang	272.240.000	351.000.000	78.760.000		15 orang	351.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Agama Islam		12 kegiatan	12 kegiatan	3.982.885.000	4.132.885.000	150.000.000		12 kegiatan	4.132.885.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
		Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah Jamaah Haji		sebelum 130 orang	sesudah 205 orang	sebelum 187.160.000	sesudah 227.500.000	selisih (+/-) 40.340.000		205 orang	227.500.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen		4 dokumen	4 dokumen	945.080.000	1.105.867.000	160.787.000		4 dokumen	1.458.856.000	
		Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasas		150 orang	150 orang	289.000.000	371.846.000	82.846.000		150 orang	371.846.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen/Laporan		24 Dokumen	24 Dokumen	250.000.000	277.000.000	27.000.000		24 Dokumen	277.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
		Kegiatan Operasional ULP	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelang		150 paket	150 paket	406.080.000	457.021.000	50.941.000		150 paket	406.080.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4	2	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.					11.243.597.000	15.002.098.000	3.758.501.000				
		Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu		100%	100%	11.243.597.000	15.002.098.000	3.758.501.000		100%	19.788.944.000	
		Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan menjadi Perda		11 Dokumen	62 Dokumen	2.284.032.000	5.018.723.000	2.734.691.000		62 Dokumen	5.018.723.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
		Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, rapat pimpinan, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat badan musyarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan legislasi dan panitia khusus		sebelum 54 kali	sesudah 90 kali	sebelum 734.051.000	sesudah 984.594.000	selisih (+/-) 250.543.000		90 kali	984.594.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna		11 kali	30 kali	328.953.000	400.288.000	71.335.000		30 kali	400.288.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses		3 kali	3 kali	1.442.525.000	1.594.625.000	152.100.000		3 kali	1.594.625.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja dalam satu tahun		11 kali	10 kali	5.801.326.000	5.802.976.000	1.650.000		10 kali	5.802.976.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik		22 kali	22 kali	652.710.000	1.120.892.000	468.182.000		22 kali	1.120.892.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kegiatan Apprasial tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun	Jumlah Dokumen		0	7 dokumen	-	80.000.000	80.000.000	keg. Baru	7 dokumen	80.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	3	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.					1.350.724.000	1.257.911.000	- 92.813.000				
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entits yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik		82%	82%	194.250.000	167.050.000	- 27.200.000		82%	820.568.000	
		Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil reviu		7 Dokumen	9 dokumen	111.750.000	128.700.000	16.950.000		9 dokumen	128.700.000	Inspektorat



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Proby Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan yang telah diprobity audit		20 kegiatan	10 kegiatan	82.500.000	38.350.000	- 44.150.000		10 kegiatan	38.350.000	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat		100%	100%	378.560.000	484.715.000	106.155.000		90 orang/kali	378.445.000	
	Mengikuti Pelatihan Teknis Seminar, Workshop, Bimtek dan Raker	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll		30 orang/kali	18 orang/kali	132.420.000	162.520.000	30.100.000		18 orang/kali	140.520.000	Inspektorat
	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bintek		50 orang/kali	40 orang/kali	171.140.000	162.925.000	- 8.215.000		40 orang/kali	162.925.000	Inspektorat
	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pembinaan		100 orang	100 orang	75.000.000	159.270.000	84.270.000		100 orang	75.000.000	Inspektorat
	Program Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi		88%	88%	146.840.000	113.940.000	- 32.900.000		75%	368.540.000	
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Persentase temuan pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti		92%	92%	146.840.000	113.940.000	- 32.900.000		92%	112.140.000	Inspektorat
	Program Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase PD yang telah melakukan SAKIP		100%	100%	631.074.000	492.206.000	- 138.868.000		100%, 70 poin, 100%	635.655.000	
	Kegiatan Evaluasi Sakip PD	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi Laporan Kinerjanya		34 SKPD	34 OPD	153.300.000	109.534.000	- 43.766.000		34 OPD	109.534.000	Inspektorat
	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan hasil reviu Laporan Kinerja Kota Madiun		1 Dokumen	1 Dokumen	82.810.000	33.810.000	- 49.000.000		1 Dokumen	33.810.000	Inspektorat
	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Jumlah SKPD yang dimonitoring		14 SKPD	14 OPD	66.400.000	45.576.000	- 20.824.000		14 OPD	45.576.000	Inspektorat

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
		Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah dokumen Laporan Pengendalian Gratifikasi		sebelum 2 Dokumen	sesudah 2 Dokumen	sebelum 328.564.000	sesudah 303.286.000	selisih (+/-) - 25.278.000		2 Dokumen 284.561.000	Inspektorat
4	4	Perencanaan.					825.622.000	849.906.000	24.284.000			
		Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		2 Dokumen	2 Dokumen	47.400.000	78.000.000	30.600.000		2 Dokumen 487.960.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Koordinasi dan Perjalan Dinas		1 paket	1 paket	47.400.000	78.000.000	30.600.000		1 paket 78.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah		2 dokumen	2 dokumen	361.370.000	292.500.000	- 68.870.000		2 dokumen 463.405.000	
		Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	137.500.000	136.300.000	- 1.200.000		1 Dokumen 136.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000	101.200.000	- 11.300.000		1 Dokumen 101.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	111.370.000	55.000.000	- 56.370.000		1 Dokumen 55.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun		11 dokumen	11 dokumen	416.852.000	479.406.000	62.554.000		11 dokumen 2.360.676.000	
		Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang	Jumlah kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	360.730.000	388.284.000	27.554.000		2 kegiatan 388.284.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2		3	4	5		6			7	8	9	10
		Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah		sebelum 42 kali	sesudah 42 kali	sebelum 56.122.000	sesudah 91.122.000	selisih (+/-) 35.000.000		42 kali	86.122.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	5	Keuangan.					1.534.801.000	2.386.763.000	851.962.000				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkat an Pajak Daerah		2%	2%	353.800.000	762.716.000	408.916.000		2%	3.198.084.000	
		Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah		10 kali	24 kali	353.800.000	462.460.000	108.660.000		24 kali	462.460.000	Badan Pengelola an Keuangan dan Aset Daerah
		Kegiatan Perumusan dan sosialisasi tambahan penghasilan ASN	Jumlah sosialisasi remunerasi		0	428 ASN	-	300.256.000	300.256.000		428 ASN	300.256.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah				0%	40.000.000	54.264.000	14.264.000		0%	430.306.000	
		Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun	Jumlah laporan rekonsiliasi hibah pemkot madiun		4 buku	4 buku	40.000.000	54.264.000	14.264.000		4 buku	54.264.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah		100%	100%	549.300.000	865.760.000	316.460.000		100%	5.566.062.000	
		Penghapusan Aset Daerah	Jumlah aset yang dihapus dari neraca		3 Jenis	3 Jenis	190.000.000	139.160.000	- 50.840.000		3 Jenis	139.160.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun	Jumlah pengamanan aset tetap tanah dan bangunan milik pemkot		1 pengamanan	1 pengamanan	175.000.000	110.000.000	- 65.000.000		1 pengamanan	110.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah	Jumlah aset milik pemkot yang dipelihara		2 Jenis	3 jenis	45.000.000	86.600.000	41.600.000		3 jenis	86.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen kajian		sebelum 2 Dokumen	sesudah 1 dokumen	sebelum 93.000.000	sesudah 295.000.000	selisih (+/-) 202.000.000		1 dokumen	245.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Jumlah database SIG		1 database	1 database	46.300.000	235.000.000	188.700.000		1 database	235.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah	Persentase Data Wajib Pajak yang Akurat		100%	100%	115.000.000	96.772.000	- 18.228.000		100%	171.772.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Basis data PBB	Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP		60.000 Wajib Pajak	60.000 Wajib Pajak	53.000.000	40.964.000	- 12.036.000		60.000 Wajib Pajak	40.964.000	Badan Pendapatan Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Daerah	Data Wajib pajak yang akurat		200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	62.000.000	55.808.000	- 6.192.000		200 Wajib Pajak	55.808.000	Badan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terpenuhi		1,96%	1,96%	476.701.000	607.251.000	130.550.000		100%	1.692.364.000	
	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak		1 paket	1 paket	476.701.000	607.251.000	130.550.000		1 paket	569.951.000	Badan Pendapatan Daerah
4	6	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.				2.680.996.000	3.468.197.000	787.201.000				
	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan		93%	93%	200.360.000	243.785.000	43.425.000		93%	243.785.000	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian		100%	100%	184.160.000	123.361.000	- 60.799.000		100%	123.361.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	jumlah dokumen database kepegawaian		1 Dokumen	1 Dokumen	16.200.000	120.424.000	104.224.000		1 Dokumen	120.424.000	Badan Kepegawaian Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan Aparatur yang Terealisasi		100%	100%	835.216.000	191.940.000	- 643.276.000		100%	197.848.000	
	Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah peserta ujian CPNS		4000 peserta	0	768.716.000	51.480.000	- 717.236.000		0	51.480.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Jumlah Pegawai		30 orang	40 orang	66.500.000	85.460.000	18.960.000		40 orang	85.460.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Ujian Dinas	Jumlah Peserta			30 orang PNS	-	55.000.000	55.000.000	Keg. Baru	30 orang PNS	42.238.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penataan Aparatur	Persentase Realisasi Penataan Pegawai		100%	100%	514.000.000	630.214.000	116.214.000		100%	630.214.000	
	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah pegawai yang ditempatkan		637 orang PNS	660 orang PNS	514.000.000	630.214.000	116.214.000		660 orang PNS	630.214.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Jumlah SK terkait kesejahteraan PNS		3.200	3.200	87.915.000	88.048.000	133.000		93%	209.862.000	
	Kegiatan Pemberhentian Pegawai yang Pensiun	jumlah PNS yang menerima SK pensiun		133 orang PNS	133 orang PNS	87.915.000	88.048.000	133.000		133 orang PNS	88.048.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi		100%	100%	1.043.505.000	2.314.210.000	1.270.705.000		100%	2.125.210.000	
	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III		10 orang PNS	2 orang PNS	225.680.000	65.250.000	- 160.430.000		2 orang PNS	65.250.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV		10 orang PNS	2 orang PNS	185.320.000	56.560.000	- 128.760.000		2 orang PNS	56.560.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional		100 orang PNS	150 orang PNS	632.505.000	866.700.000	234.195.000		150 orang PNS	759.700.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Asessment Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti Assessment		0	198 orang PNS	-	1.250.700.000	1.250.700.000	Keg. Baru	198 orang PNS	1.243.700.000	Badan Kepegawaian Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop	Jumlah Peserta		sebelum 0	sesudah 100 orang	sebelum -	sesudah 75.000.000	selisih (+/-) 75.000.000	Keg. Baru	100 orang	75.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
4	7	Penelitian dan Pengembangan.				-	-	-				
4	8	Kesatuan Bangsa dan Politik.				-	-	-				
4	9	Kecamatan.				6.584.853.000	7.239.090.550	654.237.550				
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masya rakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban		1.270 orang	1.270 orang	243.200.000	421.586.000	178.386.000		500 orang, 400 orang	265.000.000	
	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan lingkungan		100%	100%	120.000.000	265.000.000	145.000.000		100%	265.000.000	Kecamatan Kartoharjo
	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat		100%	100%	123.200.000	156.586.000	33.386.000		100%	156.586.000	Kecamatan Manguharjo
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	393.345.000	209.577.550	- 183.767.450		100%	300.000.000	
	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan		1 kali	1 kali	165.500.000	92.982.000	- 72.518.000		1 kali	92.982.000	Kecamatan Manguharjo
	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan		1 kali	1 kali	227.845.000	116.595.550	- 111.249.450		1 kali	116.595.550	Kecamatan Taman
	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase Terselasaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan		17.750 rekomendasi	17.750 rekomendasi	5.948.308.000	6.607.927.000	659.619.000		17.750 rekomendasi	3.239.795.000	

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Penyelenggaraan Kelurahan Oro-oro Ombo	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan oro-oro ombo		sebelum 100%	sesudah 100%	sebelum 384.901.000	sesudah 410.541.000	selisih (+/-) 25.640.000		100%	384.901.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo		850 Dokumen	100%	321.539.000	371.833.000	50.294.000		100%	362.833.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Klegen		100%	100%	393.647.000	425.287.000	31.640.000		100%	393.647.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan rejomulyo		2700 dokumen	100%	373.406.000	424.132.000	50.726.000		100%	422.332.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan sukosari		100%	100%	249.586.000	275.226.000	25.640.000		100%	249.586.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan pilang bango		1250 dokumen	100%	278.956.000	344.122.000	65.166.000		100%	326.322.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan tawang rejo		100%	100%	276.822.000	302.462.000	25.640.000		100%	276.822.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan kelun		1100 dokumen	100%	304.924.000	355.607.000	50.683.000		100%	353.007.000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Penyelenggaraan Kelurahan kanigoro	Jumlah Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan Kanigoro		sebelum 1900 dokumen	sesudah 100%	sebelum 421.680.000	sesudah 472.145.000	selisih (+/-) 50.465.000		100%	470.345.000	Kecamatan Kartoharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	Persentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan manguharjo		3000 Dokumen	3000 Dokumen	347.340.000	391.475.000	44.135.000		3000 Dokumen	391.475.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	Persentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan sogaten		5000 Dokumen	5000 Dokumen	296.179.000	330.799.000	34.620.000		5000 Dokumen	330.799.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Persentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan patihan		4500 Dokumen	4500 Dokumen	275.382.000	310.002.000	34.620.000		4500 Dokumen	310.002.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Persentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan ngegong		1500 Dokumen	1500 Dokumen	254.630.000	279.250.000	24.620.000		1500 Dokumen	279.250.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	Persentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan winongo		2500 Dokumen	2500 Dokumen	345.121.000	379.741.000	34.620.000		2500 Dokumen	379.741.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Persentase Terselesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan madiun lor		4000 Dokumen	4000 Dokumen	345.946.000	380.566.000	34.620.000		4000 Dokumen	380.566.000	Kecamatan Manguharjo



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Persentase Terelesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan pangongangan		sebelum 2000 Dokumen	sesudah 2000 Dokumen	sebelum  265.294.000	sesudah  289.914.000	selisih (+/-)  24.620.000		2000 Dokumen	289.914.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	Persentase Terelesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan nambangan lor		3600 Dokumen	3600 Dokumen	422.634.000	454.884.000	32.250.000		3600 Dokumen	454.884.000	Kecamatan Manguharjo
	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Persentase Terelesaikannya Permohonan Rekomendasi di Kelurahan nambangan kidul		2000 Dokumen	2000 Dokumen	390.321.000	409.941.000	19.620.000		2000 Dokumen	409.941.000	Kecamatan Manguharjo
0		RUTIN										
0	0	Rutin				75.577.624.000	128.279.751.500	52.702.127.500				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran		100%	100%	48.381.474.000	53.407.944.000	5.026.470.000		100%	3.411.675.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lembaga		1 lembaga	1 lembaga	3.010.680.000	3.258.550.000	247.870.000		1 lembaga	3.258.550.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	729.583.000	788.003.000	58.420.000		100%	788.003.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	RSUD Kota Madiun	52 orang	52 orang	874.950.000	1.070.350.000	195.400.000		52 orang	1.070.350.000	Rumah Sakit Umum Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, Alat Listrik,Perangko, Materai, Surat Kabar,Foto copy dll)		10 Jenis	10 Jenis	1.131.131.000	1.432.016.000	300.885.000		10 Jenis	1.432.016.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		75 Jenis	75 Jenis	260.435.000	442.392.000	181.957.000		75 Jenis	442.392.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan		7 Jenis	7 Jenis	1.299.000.000	1.620.150.000	321.150.000		7 Jenis	1.620.150.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		11 Unit	11 Unit	346.750.000	350.950.000	4.200.000		11 Unit	350.950.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 paket	10 paket	400.000.000	595.755.000	195.755.000		10 paket	576.105.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan bahan penunjang ATK, alat listrik dan elektronik, benda pos, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, cetak dan penggandaan		10 Jenis	10 Jenis	287.627.000	269.977.000	- 17.650.000	penyerahan aset ke Dinas Sosial, PP dan PA	10 Jenis	269.977.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		9 Jenis	9 Jenis	575.840.000	628.640.000	52.800.000		9 Jenis	628.640.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan		5 Jenis	5 Jenis	461.906.000	522.417.000	60.511.000		5 Jenis	522.417.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	1 paket	1.323.864.000	1.370.205.000	46.341.000		1 paket	1.370.205.000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hr Lembur ATK, Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan, Surat Kabar, cetak dan Pengandaan		sebelum 1 paket	sesudah 12 bulan	sebelum 1.171.985.000	sesudah 1.250.945.000	selisih (+/-) 78.960.000	bertambah honor tenaga kontrak 2017, honor bendh,pembuat daftar gaji,kurir cs,peralatan rumah tangga,tenaga upahan,belanja mamin menyesuaikan OPD Baru	12 bulan	1.250.945.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor		14 Jenis	14 Jenis	395.000.000	547.840.000	152.840.000		14 Jenis	547.840.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		2 paket	2 paket	325.000.000	354.000.000	29.000.000		2 paket	354.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan		1 paket	1 paket	200.000.000	232.090.000	32.090.000		1 paket	212.090.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		7 Jenis	7 Jenis	730.000.000	680.000.000	- 50.000.000		7 Jenis	680.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor		13 jenis	13 jenis	1.824.537.000	2.102.152.000	277.615.000		13 jenis	2.102.152.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	1 paket	232.639.000	198.269.000	- 34.370.000		1 paket	198.269.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		sebelum 9 paket	sesudah 14 paket	sebelum 567.519.000	sesudah 671.750.000	selisih (+/-) 104.231.000		14 paket	671.750.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor		8 Jenis	8 Jenis	150.000.000	153.850.000	3.850.000		8 Jenis	153.850.000	Inspektorat
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan ,barang dan jasa kantor		72 buah	72 buah	228.357.000	247.907.000	19.550.000		72 buah	247.907.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis kegiatan		9 Jenis	9 Jenis	360.000.000	316.545.000	- 43.455.000		9 Jenis	316.545.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor		7 jenis	7 jenis	24.543.763.000	24.327.000.000	- 216.763.000		7 jenis	16.925.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang		8 Jenis	8 Jenis	399.313.000	412.963.000	13.650.000		8 Jenis	390.213.000	Badan Pendapatan Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		7 jenis	7 jenis	182.200.000	188.700.000	6.500.000		7 jenis	188.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa,peralatan dan perlengkapan perkantoran		10 paket	10 paket	325.000.000	340.850.000	15.850.000		10 paket	340.850.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 Jenis	8 Jenis	309.225.000	358.550.000	49.325.000		8 Jenis	358.550.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7 jenis	7 jenis	718.198.000	794.398.000	76.200.000		7 jenis	794.398.000	Kecamatan Kartoharjo
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	7 jenis	793.560.000	800.940.000	7.380.000		7 jenis	800.940.000	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		9 paket	9 paket	774.871.000	811.271.000	36.400.000		9 paket	811.271.000	Kecamatan Taman
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		40 kali	40 kali	83.500.000	113.500.000	30.000.000		40 kali	83.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas		12 kali	23 kali	55.000.000	125.000.000	70.000.000		23 kali	125.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		45 kali	45 kali	58.814.000	173.874.000	115.060.000		45 kali	250.182.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		10 kali	10 kali	179.550.000	257.620.000	78.070.000		10 kali	257.620.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		108 kali	108 kali	73.351.000	143.046.000	69.695.000		108 kali	143.046.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial		82 orang	117 orang	160.214.000	211.616.000	51.402.000		117 orang	211.616.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas		20 kali	27 kali	45.000.000	60.000.000	15.000.000		27 kali	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah		34 kali	1 tahun	89.945.000	230.398.000	140.453.000		1 tahun	230.398.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		38 kali	81 kali	65.000.000	150.000.000	85.000.000		81 kali	150.000.000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		28 kali	44 kali	26.300.000	78.000.000	51.700.000	bertambah untuk memenuhi undangan berkaitan tupoksi Diskominfo	44 kali	78.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah		sebelum 30 kali	sesudah 30 kali	sebelum 50.020.000	sesudah 161.000.000	selisih (+/-) 110.980.000		30 kali	161.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi		57 kali	66 kali	60.000.000	80.800.000	20.800.000		66 kali	76.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah		46 kali	50 kali	42.848.000	78.048.000	35.200.000		50 kali	78.048.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah		40 kali	80 kali	1.680.981.000	3.292.000.000	1.611.019.000		80 kali	3.292.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		46 orang/kali	46 orang/kali	91.700.000	111.700.000	20.000.000		46 orang/kali	91.700.000	Inspektorat
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah		72 kali	72 kali	93.574.000	124.950.000	31.376.000		72 kali	124.950.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah perjalanan dinas		9 kali	20 kali	43.200.000	87.058.000	43.858.000		20 kali	87.058.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		65 kali	100 kali	300.000.000	450.000.000	150.000.000		100 kali	475.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun		19 kali	29 kali	65.207.000	119.572.000	54.365.000		29 kali	119.572.000	Dinas Perdagangan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah		sebelum 1 paket	sesudah 19 kali perjalanan dinas, 1787 bantuan transport	sebelum 184.337.000	sesudah 220.337.000	selisih (+/-) 36.000.000		19 kali perjalanan dinas, 1787 bantuan transport	220.337.000	Kecamatan Manguharjo
	Program pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik		100%	100%	4.851.910.000	5.895.306.000	1.043.396.000		100%	395.130.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai		100%	100%	7.500.000	10.558.000	3.058.000		100%	10.558.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung		4 Gedung	4 Gedung	798.451.000	898.451.000	100.000.000		4 Gedung	898.451.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung		1 gedung	1 gedung	25.000.000	50.000.000	25.000.000		1 gedung	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan		4 Unit	4 Unit	20.000.000	44.737.000	24.737.000		4 Unit	44.737.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan		3 kegiatan	2 kegiatan	83.700.000	101.950.000	18.250.000	penyerahan aset ke Dinas Sosial, PP dan PA	2 kegiatan	76.950.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung		2 unit	2 unit	50.000.000	211.650.000	161.650.000		2 unit	211.650.000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Gedung kantoir		1 Gedung	2 gedung	7.000.000	24.750.000	17.750.000	Untuk biaya pengecatan frame 5di 5 lokasi	2 gedung	24.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman		sebelum 1 Unit	sesudah 1 Unit	sebelum 5.000.000	sesudah 20.000.000	selisih (+/-) 15.000.000		1 Unit	20.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung		5 unit	5 unit	224.992.000	231.292.000	6.300.000		5 unit	231.292.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung		1 Gedung	1 Gedung	12.500.000	22.500.000	10.000.000		1 Gedung	22.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung		1 Gedung	1 Gedung	26.500.000	56.500.000	30.000.000		1 Gedung	56.500.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung		1 Gedung	1 Gedung	10.000.000	20.000.000	10.000.000		1 Gedung	11.842.000	Kecamatan Kartoharjo
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung		1 Gedung	1 Gedung	68.148.000	105.698.000	37.550.000		1 Gedung	105.698.000	Kecamatan Manguharjo
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara		24 Unit	30 unit	135.000.000	306.175.000	171.175.000		30 unit	470.775.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		22 Unit	22 Unit	134.899.000	106.976.000	- 27.923.000		22 Unit	106.976.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional		5 Jenis	2 jenis	49.352.000	29.572.000	- 19.780.000	penyerahan aset ke Dinas Sosial, PP dan PA	2 jenis	29.572.000	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas		14 unit	15 unit%	105.000.000	194.723.000	89.723.000		15 unit%	194.723.000	Dinas Perhubungan



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman		sebelum 8 Unit	sesudah 17 unit	sebelum 30.000.000	sesudah 40.000.000	selisih (+/-) 10.000.000		17 unit	40.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang dirawat		20 Unit	20 Unit	440.000.000	447.450.000	7.450.000		20 Unit	447.450.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan		20 Unit	20 Unit	40.000.000	24.352.000	- 15.648.000		20 Unit	24.352.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas dalam kondisi baik		39 unit	48 unit	460.000.000	519.060.000	59.060.000		48 unit	519.060.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas		15 unit	16 unit	25.904.000	48.448.000	22.544.000		16 unit	48.448.000	Kecamatan Taman
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai		100%	100%	69.700.000	76.424.000	6.724.000		100%	76.424.000	Dinas Kersehatan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang rutin di maintain		45 Unit	45 Unit	25.000.000	35.000.000	10.000.000		45 Unit	35.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara		5 paket	5 paket	82.050.000	76.500.000	- 5.550.000		5 paket	76.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai		3 Jenis	3 Jenis	55.000.000	75.000.000	20.000.000		3 Jenis	75.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor		5 jenis	5 jenis	80.700.000	120.700.000	40.000.000		5 jenis	120.700.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor		24 Unit	24 Unit	16.962.000	8.700.000	- 8.262.000		24 Unit	8.700.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	jenis barang		10 Jenis	10 Jenis	35.000.000	24.800.000	- 10.200.000		10 Jenis	24.800.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai		44 Unit	45 unit	51.000.000	109.900.000	58.900.000		45 unit	109.900.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara		8 Jenis	8 Jenis	55.000.000	70.000.000	15.000.000		8 Jenis	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas		4 paket	4 paket	1.153.980.000	1.274.668.000	120.688.000		4 paket	1.274.668.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Rumah Dinas Ketua DPRD	Jumlah rumah dinas yang dikelola		1 Unit	1 Unit	368.572.000	391.772.000	23.200.000		1 Unit	391.772.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pemeliharaan dan Biaya Operasional Gedung Diklat	jumlah gedung		1 Gedung	1 Gedung	100.000.000	117.000.000	17.000.000		1 Gedung	111.900.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	22.194.590.000	68.759.612.500	46.565.022.500		100%	18.272.062.000	
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	RSUD Kota Madiun	3 paket	6 paket	550.000.000	1.351.300.000	801.300.000		6 paket	773.082.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Paket		1 paket	1 paket	18.272.062.000	19.805.252.000	1.533.190.000		1 paket	18.272.062.000	Dinas Pendidikan
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor				15 jenis	-	2.910.000.000	2.910.000.000	Keg. Baru	15 jenis	2.910.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor			7 jenis	-	1.200.000.000	1.200.000.000	Keg. Baru	7 jenis	1.200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan prasarana kantor yang diadakan		0	4 jenis	-	970.976.000	970.976.000	Keg. Baru	4 jenis	137.876.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang diadakan		1 paket	1 paket	87.500.000	28.618.350.000	28.530.850.000		1 paket	28.568.350.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang diadakan		1 paket		-	807.265.000	807.265.000	Keg. Baru		300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor		17 Jenis	17 Jenis	417.000.000	1.667.000.000	1.250.000.000		17 Jenis	467.000.000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana		1 paket	1 paket	106.900.000	2.262.928.000	2.156.028.000	kebutuhan peralatan kantor memadai komputer,laptop printer	1 paket	1.175.928.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor kantor yang diadakan		2 Jenis	3 jenis	97.000.000	1.380.571.000	1.283.571.000		3 jenis	674.371.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Paket		1 paket	4 paket	100.000.000	514.980.000	414.980.000		4 paket	337.980.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana		1 Jenis	5 jenis	25.575.000	206.550.000	180.975.000		5 jenis	94.225.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor			sebelum 3 unit	sesudah	sebelum -	sesudah 50.000.000	selisih (+/-) 50.000.000	Keg. Baru			Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor			12 unit	-	200.000.000	200.000.000	Keg. Baru	12 unit	75.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana prasarana kantor		217 Unit	217 Unit	30.000.000	80.000.000	50.000.000		217 Unit	30.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor		3 paket	3 paket	652.050.000	2.127.650.500	1.475.600.500		3 paket	1.789.050.500	Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli		9 Jenis	3 paket	265.063.000	537.313.000	272.250.000		3 paket	315.313.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana yang dipenuhi		2 Jenis	2 Jenis	50.000.000	85.450.000	35.450.000		2 Jenis	50.000.000	Inspektorat
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jenis Barang			3 jenis	-	163.665.000	163.665.000	Keg. Baru	3 jenis	163.665.000	Badan Kepegawaian Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		4 jenis	8 jenis	100.000.000	340.000.000	240.000.000		8 jenis	305.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana prasarana kantor		35 unit	39 unit	177.500.000	315.500.000	138.000.000		39 unit	245.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana prasarana kantor		0	20 unit	-	77.500.000	77.500.000	Keg. Baru	20 unit	77.500.000	Dinas Perdagangan
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor		2 paket	2 paket	400.000.000	777.000.000	377.000.000		2 paket	600.000.000	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana		1 paket	3 paket	200.000.000	576.595.000	376.595.000		3 paket	576.595.000	Kecamatan Manguharjo
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		73 orang	96 orang	150.000.000	159.900.000	9.900.000		96 orang	225.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		600 buah	870 buah	80.000.000	199.927.000	119.927.000		870 buah	199.927.000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD		4 Jenis	4 Jenis	243.940.000	278.940.000	35.000.000		4 Jenis	278.940.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan (Reviu Rencana Pembangunan Gedung DPRD)	Jumlah Gedung			1 paket	-	50.000.000	50.000.000	keg. Baru	1 paket	50.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kegiatan Rehab gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang layak huni		1 Unit	1 Unit	190.000.000	502.000.000	312.000.000		1 Unit	190.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	Kegiatan Rehab gedung dan Bangunan	Jumlah gedung		-	paket	-	356.750.000	356.750.000	keg. Baru	paket	356.750.000	Kecamatan Kartoharjo
	Kegiatan Rehab gedung dan Bangunan	Jumlah gedung		-	2 paket	-	186.250.000	186.250.000	Keg. Baru	2 paket	186.250.000	Kecamatan Manguharjo
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu		100%	100%	149.650.000	216.889.000	67.239.000		100%	102.860.000	
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000	94.600.000	34.600.000		10 Dokumen	94.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu		sebelum 10 Dokumen	sesudah 10 Dokumen	sebelum 20.000.000	sesudah 39.500.000	selisih (+/-) 19.500.000		10 Dokumen	39.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		9 Dokumen	9 Dokumen	34.650.000	37.682.000	3.032.000		9 Dokumen	37.682.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen		7 Dokumen	10 dokumen	35.000.000	45.107.000	10.107.000		10 dokumen	45.107.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN						123.154.153.000	185.595.592.800	62.441.439.800				

6. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2017					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		SKPD Penanggung Jawab	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.					115.909.042.000	118.278.036.850	2.368.994.850				
		Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pem buangan air tidak tersumbat		73	7300%	19.003.000.000	22.291.750.000	3.288.750.000		7300%	20.535.500.000	
		Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah daerah bebas banjir		13 paket	13 paket	8.200.000.000	9.448.750.000	1.248.750.000		13 paket	8.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	Jumlah daerah bebas banjir		2 paket	2 paket	10.000.000.000	10.032.500.000	32.500.000		2 paket	10.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah daerah bebas banjir		3 Kecamatan	3 Kecamatan	750.000.000	1.250.000.000	500.000.000		3 Kecamatan	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000	1.560.500.000	1.507.500.000		1 Dokumen	1.560.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengendalian Banjir	Persentase Kawasan Bebas Banjir		100%	100%	20.000.000.000	23.389.500.000	3.389.500.000		100%	24.019.500.000	
		Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	Jumlah daerah bebas banjir		5 paket	5 paket	20.000.000.000	23.389.500.000	3.389.500.000		5 paket	23.389.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		100%	100%	43.587.842.000	24.903.502.000	- 18.684.340.000		0%	30.481.902.000	
		Kegiatan Penataan Lapangan Olah Raga.	Jumlah Lokasi Lapangan Olah Raga		4 lokasi	4 lokasi	5.500.000.000	6.101.000.000	601.000.000		4 lokasi	5.989.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
		Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi		400 Org	400 Org	173.930.000	248.252.000	74.322.000		400 Org	243.652.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Pujasera Sumber Umis (DED)	Jumlah Gedung		1 Gedung	1 Gedung	500.000.000	5.300.000	- 494.700.000		1 Gedung	5.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah.		14 lembaga	14 lembaga	18.705.051.000	14.961.350.000	- 3.743.701.000		14 lembaga	14.961.350.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Dinas Kesehatan (DED)	Jumlah Dokumen Perencanaan		1 Dokumen	1 Dokumen	580.072.000	-	- 580.072.000		1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	Jumlah gedung instalasi farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun		1 Unit	1 Unit	1.847.595.000	-	- 1.847.595.000		1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Paviliun Rumah Sakit (perencanaan dan MK)	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan paviliun rumah sakit yang disusun dan jumlah lahan pembangunan paviliun rumah sakit yang diurug dan dipadatkan		1 dokumen dan 1,6 Hektar	1 dokumen dan 1,6 Hektar	3.667.666.000	-	- 3.667.666.000		1 dokumen dan 1,6 Hektar	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran ( Garasi Damkar Satpol PP)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana / korban bencana ( Pengadaan Hydran )		1 paket	1 paket	3.800.000.000	1.800.000.000	- 2.000.000.000		1 paket	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Review DED Pasar Bunga)	Jumlah Pasar yang dikembangkan		3 Pasar	3 Pasar	200.000.000	-	- 200.000.000		3 Pasar	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Puskesmas Manguharjo	Jumlah paket rehab puskesmas yang dilaksanakan		1 paket	1 paket	5.895.339.000	-	- 5.895.339.000		1 paket	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kegiatan Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	Jumlah gedung laundry rumah sakit yang dibangun		1 Unit	1 Unit	2.489.689.000	-	- 2.489.689.000		1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhab		sebelum 1 paket	sesudah 1 paket	sebelum 228.500.000	sesudah -	selisih (+/-) - 228.500.000		1 paket	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Perencanaan Saluran Lingkungan	jumlah perencanaan			1 paket	-	1.385.000.000	1.385.000.000	Keg. Baru		1.385.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Pemerintah (Gedung KORPRI)	jumlah gedung			1 gedung	-	402.600.000	402.600.000	Keg. Baru		397.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik		89,5	8950%	19.393.200.000	20.929.022.400	1.535.822.400		8950%	46.627.372.700	
	Kegiatan Pembangunan Jalan Inspeksi	Panjang jalan yang dibangun		6 km	6 km	5.375.000.000	5.382.500.000	7.500.000		6 km	5.375.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen DED		2 buah	2 buah	618.000.000	265.553.000	- 352.447.000		2 buah	265.553.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Survey dan Pengukuran.	Tersedianya dokumen usulan kegiatan		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	16.394.300	1.394.300		1 Dokumen	16.394.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Pembangunan Jalan.	Jumlah lokasi		6 lokasi	6 lokasi	5.160.200.000	6.437.662.000	1.277.462.000		6 lokasi	6.437.662.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Pembangunan Pelengkap jalan.	Jumlah lokasi yang dibangun		1 lokasi	1 lokasi	8.145.000.000	8.743.674.000	598.674.000		1 lokasi	8.533.524.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Monitoring Teknis	Jumlah dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	41.666.600	1.666.600		1 Dokumen	41.666.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	41.572.500	1.572.500		1 Dokumen	41.572.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik		372.000 km	372.000 km	13.520.000.000	26.294.262.450	12.774.262.450		372.000 km	30.963.127.800	
	Kegiatan Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	16.547.950	1.547.950		1 Dokumen	16.394.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	Jumlah lokasi		11 lokasi	11 lokasi	4.600.000.000	8.952.020.000	4.352.020.000		11 lokasi	8.952.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	Jumlah lokasi		25 lokasi	25 lokasi	4.200.000.000	8.457.608.500	4.257.608.500		25 lokasi	8.457.608.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	Jumlah lokasi		28 lokasi	28 lokasi	3.900.000.000	7.670.899.000	3.770.899.000		28 lokasi	7.670.899.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	Jumlah lokasi		1 lokasi	1 lokasi	250.000.000	355.440.000	105.440.000		1 lokasi	355.440.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	Jumlah lokasi		1 lokasi	1 lokasi	250.000.000	392.100.000	142.100.000		1 lokasi	392.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	Jumlah lokasi		1 lokasi	1 lokasi	250.000.000	393.666.000	143.666.000		1 lokasi	393.666.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.981.000	981.000		1 Dokumen	55.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW		100%	100%	405.000.000	470.000.000	65.000.000		100%	1.190.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yg diperdakan		100%	100%	150.000.000	200.000.000	50.000.000		100%	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase Surat Teguran yg diterbitkan		100%	100%	80.000.000	150.000.000	70.000.000		100%	80.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah Dokumen SKRK		50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000	120.000.000	70.000.000		50 Dokumen	120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi		250 peserta	250 peserta	125.000.000	-	- 125.000.000		250 peserta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.				4.319.775.000	15.364.381.000	11.044.606.000				

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah layak huni		99,40%	99,40%	-	2.100.000.000	2.100.000.000		99,40%	4.225.000.000	
	Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Paket			1 paket	-	100.000.000	100.000.000	Keg. Baru	1 paket	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)	Jumlah Lokasi			27 kelurahan	-	1.500.000.000	1.500.000.000	Keg. Baru	27 kelurahan	1.500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Perumahan	Jumlah unit			1 unit	-	50.000.000	50.000.000	Keg. Baru	1 unit	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Sosialisasi pada Warga Penghuni Rusunawa	Jumlah Peserta			70 orang	-	200.000.000	200.000.000	Keg. Baru	70 orang	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Perencanaan dan Sosialisasi RTLH	Jumlah Paket			1 paket	-	75.000.000	75.000.000	Keg. Baru	1 paket	75.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun	Jumlah Paket			1 paket	-	50.000.000	50.000.000	Keg. Baru	1 paket	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	BOP Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Jumlah Dokumen			1 dokumen	-	75.000.000	75.000.000	Keg. Baru	1 dokumen	75.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Inventarisasi Fasum Fasos Perumahan	Jumlah Lokasi			25 lokasi	-	50.000.000	50.000.000	Keg. Baru	25 lokasi	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH yang dipelihara		14,5 ha	14,5 ha	4.319.775.000	13.264.381.000	8.944.606.000		19,4 ha	16.191.959.000	
	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU	jumlah titik		335 Titik	335 Titik	2.226.000.000	2.432.344.000	206.344.000		335 Titik	2.432.344.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	jumlah lampu hemat energi		sebelum 66 buah	sesudah 530 buah	sebelum 480.000.000	sesudah 3.719.644.000	selisih (+/-) 3.239.644.000		292 buah	2.195.144.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	jumlah lokasi		6 lokasi	6 lokasi	150.000.000	200.000.000	50.000.000		6 lokasi	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU	jumlah kendaraan operasional		1 Unit	6 unit	193.775.000	2.005.450.000	1.811.675.000		3 unit	1.056.175.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih).	Jumlah Pekerja		57 orang	67 orang	1.070.000.000	1.225.063.000	155.063.000		67 orang	1.225.063.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan lampu		4017 Titik	4017 titik + peralatan keamanan & pakaian kerja PJU	200.000.000	275.000.000	75.000.000		4017 titik + peralatan keamanan & pakaian kerja PJU	275.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	Jumlah Lokasi			7 lokasi	-	1.409.525.000	1.409.525.000	Keg. Baru	7 lokasi	1.014.400.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Lapangan Demangan Madiun	Jumlah Lokasi			1 lokasi	-	400.000.000	400.000.000	Keg. Baru	1 lokasi	400.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Prometer (Program Madiun Terang)	Jumlah Tenaga			10 orang	-	75.000.000	75.000.000	Keg. Baru	10 orang	75.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Jenis			2 jenis	-	100.000.000	100.000.000	Keg. Baru	2 jenis	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi (DBH-CHT)	jumlah lampu hemat energi			401 buah	-	1.422.355.000	1.422.355.000	Keg. Baru	401 buah	1.422.355.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
2	4	Pertanahan.				25.000.000	275.000.000	250.000.000				
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8	8	25.000.000	275.000.000	250.000.000		8	355.000.000	
		Kegiatan Fasilitas Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	jumlah fasilitas ijin lokasi dan IPPT	6 kali	15 kali	25.000.000	50.000.000	25.000.000		6 kali	25.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi	Jumlah lokasi		10 lokasi	-	50.000.000	50.000.000	Keg. Baru	10 lokasi	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	Jumlah Lokasi		10 lokasi	-	75.000.000	75.000.000	Keg. Baru	10 lokasi	75.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kegiatan Pembuatan Naskah Akademik Ijin Lokasi	Jumlah Dokumen		1 dokumen	-	100.000.000	100.000.000	Keg. Baru	1 dokumen	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	5	Lingkungan Hidup.				2.322.075.000	3.205.315.000	883.240.000				
		Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber air yang berfungsi dengan layak dan baik	100%	100%	142.075.000	196.975.000	54.900.000		100%	380.475.000	
		Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan	112 Titik	112 Titik	142.075.000	196.975.000	54.900.000	Honorarium Tim	112 Titik	196.975.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun dan Volume Sampah yang Tertangani	100%, 103.015,7 M3	100%, 103.015,7 M3	2.180.000.000	3.008.340.000	828.340.000		100%, 103.015,7 M3	7.745.690.000	

1		2	3	4	5		6			7	8	9	10
					sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
		Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Persampahan (DBH-CHT)	jumlah pengadaan sarana dan prasarana		1 paket	1 paket	580.000.000	908.720.000	328.720.000		1 paket	908.720.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan (DBH-CHT)	jumlah pengadaan kendaraan operasional persampahan		5 Unit	6 unit	1.600.000.000	2.099.620.000	499.620.000		6 unit	2.099.620.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	9	Perhubungan.					1.135.000.000	2.409.660.300	1.274.660.300				
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Sarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik LLAJ		78	78%	576.000.000	824.413.000	248.413.000		7800%	1.063.413.000	
		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal, Sub Terminal dan Halte	Jumlah arus penumpang		6776500 Penumpang	6776500 Penumpang	296.000.000	219.013.000	- 76.987.000		6776500 Penumpang	219.013.000	Dinas Perhubungan
		Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan		617 unit	650 unit	85.000.000	296.200.000	211.200.000		650 unit	296.200.000	Dinas Perhubungan
		Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ	Jumlah CCTV dan SIM LLAJ		9 Titik	17 titik	195.000.000	309.200.000	114.200.000		17 titik	309.200.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan		70	70	-	402.698.300	402.698.300		70, 6.249	1.548.638.300	
		Kegiatan Pembangunan Pos Pengamanan Terpadu	Jumlah Pos Pengamanan		0	1 unit	-	103.000.000	103.000.000	keg. Baru	1 unit	103.000.000	Dinas Perhubungan
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Lalu Lintas	Jumlah Peralatan		0	185 unit	-	181.100.000	181.100.000	keg. Baru	185 unit	181.100.000	Dinas Perhubungan
		Kegiatan Akreditasi PKB	Jumlah sertifikat		0	1 sertifikat	-	118.598.300	118.598.300	keg. Baru	1 sertifikat	118.598.300	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	IKM		80	80	559.000.000	1.182.549.000	623.549.000		80	1.797.249.000	
		Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Personil		15 kegiatan	15 kegiatan	400.000.000	588.669.000	188.669.000		15 kegiatan	588.669.000	Dinas Perhubungan
		Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	Jumlah pos pengamanan		4 Pos	4 Pos	91.000.000	106.000.000	15.000.000		4 Pos	106.000.000	Dinas Perhubungan
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	Jumlah angkutan/tahun		9000000 Kendaraan	12000000 kendaraan	68.000.000	87.880.000	19.880.000		12000000 kendaraan	87.880.000	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5		6			7	8	9	10
				sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
	Kegiatan Pendataan Angkutan Sekolah Gratis	Jumlah Dokumen			1 dokumen	-	200.000.000	200.000.000	keg. Baru	1 dokumen	200.000.000	Dinas Perhubungan
	Kegiatan Penyusunan Raperda Penyelenggaraan LLAJ	Jumlah Dokumen			1 dokumen	-	200.000.000	200.000.000	keg. Baru	1 dokumen	200.000.000	Dinas Perhubungan
						123.710.892.000	139.532.393.150	15.821.501.150				

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan untuk acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD). Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2017 ini disusun mengacu kepada:

1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
2. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 mengacu pada APBN-P Tahun 2017 dan Substansi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2017.

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**